



SEMINAR SEJARAH NASIONAL III

# PANEL HISTORIGRAFI TRADISIONAL

Direktorat  
Layanan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL  
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL  
1982/1983

959.8557  
MILIK DEP. P DAN K  
TIDAK DIPERDAGANGKAN



SEMINAR SEJARAH NASIONAL III

# PANEL HISTORIGRAFI TRADISIONAL

PERPUSTAKAAN  
DIREKTORAT SEJARAH &  
NILAI TRADISIONAL

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL  
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL  
1982/1983

## KATA PENGANTAR

Bertepatan dengan Hari Pahlawan tanggal 10 Nopember 1981, di Hotel Wisata Internasional, Jakarta, telah berlangsung Seminar Sejarah Nasional III, hingga tanggal 15 Nopember 1981, dengan tema "Melalui Penelitian dan Penulisan Sejarah Nasional dan Lokal kita bina Semangat Persatuan dan Kesatuan Bangsa".

Dalam hal ini penelitian dan penulisan Sejarah Nasional dan Sejarah Lokal hendaknya kita lihat pada konteks yang luas, yaitu dalam rangka pembinaan kebudayaan, termasuk pula semangat persatuan dan kesatuan bangsa.

Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan, bahwa "Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia". Itu mengandung arti, bahwa Pemerintah berkewajiban mewujudkan identitas nasional berlandaskan aneka ragam kebudayaan Indonesia; dan juga mewujudkan pedoman pola tingkah laku yang akan menyatukan bangsa yang terdiri dari banyak suku bangsa dengan latar belakang kebudayaan yang beraneka ragam itu.

Di sini perlu kita perhatikan adanya kenyataan, bahwa masyarakat bangsa Indonesia itu merupakan masyarakat yang majemuk dengan aneka ragam latar belakang sejarah dan kebudayaannya. Di samping itu, dengan pengembangan kebudayaan nasional itu diharapkan akan menjadi pegangan ataupun pedoman tingkah laku pergaulan sosial antar warga negara ke luar batas lingkungan suku atau daerah. Kemudian, masih perlu diperhitungkan, bahwa terdapat pula beberapa masalah sebagai akibat pembangunan yang pada hakekatnya merupakan proses perubahan di segala bidang.

Kesemuanya itu berlangsung dalam lingkup ruang dan waktu, yang perlu kita buat inventarisasi dan dokumentasinya sebagai dukungan data yang memadai. Data dan informasi kesejahteraan itu pada khususnya diperlukan antara lain untuk menyusun kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan ke-

budayaan nasional dalam rangka usaha pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Demikian pula diperlukan untuk melihat berbagai kecenderungan yang terjadi dalam proses integrasi nasional secara menyeluruh. Dan yang lebih utama ialah agar masyarakat terbina kesadaran sejarahnya sebagai satu bangsa.

Di dalam Seminar Sejarah Nasional III itu dapat ditemukan berbagai fihak yang menaruh minat dalam kesejarahan. Didalam forum Seminar itulah dipersembahkan hasil penelitian para sejarawan, dan mereka memanfaatkannya untuk mempertajam konsep, menyempurnakan metode dan metodologi untuk mempertinggi kemampuan mengungkapkan kembali sejarah bangsa di tingkat nasional maupun daerah. Juga diharapkan untuk mencapai keseragaman bahasa dan penafsiran berbagai peristiwa sejarah bangsa, sehingga dapat menjernihkan berbagai masalah kesejarahan dan mempermudahi penanaman kesadaran sejarah pada masyarakat.

Manteri kesejarahan dalam Seminar Sejarah Nasional III itu meliputi keseluruhan sejarah nasional Indonesia, yang dibagi ke dalam enam panel, yaitu : prasejarah; sejarah kuno; sejarah pasca kuno meliputi masa sejarah masuk dan berkembangnya Islam; sejarah perlawanan terhadap kolonialisme, sejarah awal abad ke-XX dan pergerakan nasional; dan sejarah mutakhir.

Kesemua materi kesejarahan tersebut berasal dari berbagai penjuru tanah air yang merupakan pusat-pusat pemikiran kesejarahan (Jakarta, Bali, Banda Aceh, Bandung, D.I. Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Riau, Banjarmasin, Palembang, Bima, Ujung pandang, Sulawesi Utara, Medan dan Samarinda). Demikian pula tulisan tersebut merupakan hasil penelitian ilmiah yang orisinal, berskala nasional ataupun lokal; dan belum pernah dipublikasikan.

Pada akhirnya, dengan diterbitkannya bahan hasil Seminar Sejarah Nasional III ini diharapkan kesadaran sejarah pada masyarakat luas menjadi meningkat.

Jakarta, 21 Agustus 1982

## **PIDATO MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PADA PEMBUKAAN SENIMAR SEJARAH NASIONAL III**

Hadirin sekalian yang saya hormati.  
Saudara-saudara sebangsa, sebahasa dan setanah air.

Kita berkumpul di sini hari ini untuk bersama-sama melalui seminar sejarah nasional yang ketiga kalinya. Pembahasan tentang sejarah merupakan suatu aktipitas intelektual yang tidak pernah basi walaupun andaikata tema pembahasan yang dipilih tetap sama. Secara naluri selalu ada kecenderungan pada diri manusia untuk mengetahui masa lalu dan berdasarkan pengetahuan tersebut berharap mendapat pelajaran guna menduga, bahkan membangun masa depan yang dikehendaki.

Pengamatan umum ini kiranya tercermin juga pada tema yang ditetapkan oleh seminar kali ini. Tema ini berupa "melalui Penelitian dan Penulisan Sejarah Nasional dan Lokal Kita Bina Semangat Persatuan dan Kesatuan Bangsa". Dari bunyi tema ini segera dapat diketahui bahwa para peserta seminar tidak hanya menganggap bahwa penelitian merupakan aktipitas yang berguna, tetapi bahwa sejarah layak dijadikan objek penelitian karena ia mengandung suatu arti (sense). Arti yang dikandung oleh sejarah ini harus digali melalui penelitian untuk kemudian dimasyarakatkan melalui penulisan dan selanjutnya dijadikan modal bagi pembinaan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.

Baik seminar sebagai aktipitas intelektual maupun tema yang dipilih oleh seminar sejarah ini, sangat saya hargai. Melalui semua ini kita ingin menegaskan bahwa kita tidak ingin dikutuk oleh sejarah bahwa kita tidak belajar dari sejarah. Sebab memang acapkali justru dari sejarah kita belajar bahwa kita tidak belajar dari sejarah. Namun harus diakui bahwa usaha untuk menarik pelajaran dari sejarah bukanlah pekerjaan yang sederhana. Usaha memperoleh angka yang tinggi dari

studi sejarah, bahkan usaha meraih *judicium* yang membanggakan dari ujian mata pelajaran sejarah pasti jauh lebih mudah dari usaha memahami arti (*sense*) dari sejarah manusiawi. Betapa tidak. Dengan bermodalkan diktat orang lain atau "singkatan" dari bahan kuliah yang dibuat oleh teman, seorang mahasiswa dapat saja mendapat angka yang lumayan dari ujian yang ditempuhnya. Namun untuk menggali, apalagi dapat menemui arti dari sejarah, si pelajar sejarah dituntut untuk menghayati, sesedikitnya membiasakan diri dengan, falsafah. Falsafah dalam artian pengusutan tentang hakikat dari realitas, baik sebagai keseluruhannya ataupun mengenai salah satu atau beberapa aspek dari sekian banyak aspek yang dikandungnya. Mengingat arti *essensial* dari falsafah adalah pemikiran yang sistematis sedangkan bekerjanya pikiran manusia pada dasarnya sama, apapun obyek yang dijadikan bahan pemikiran itu, kiranya dapat dikatakan bahwa tidak ada satu falsafah tertentu yang secara khusus disediakan hanya bagi pemikiran sejarah.

Realitas berkaitan erat dengan fakta dan setiap ahli sejarah pasti akan menggunakan fakta tanpa ragu-ragu. Memang bagi ahli sejarah fakta-fakta mengenai masa lalu manusia merupakan perbendaharaan dari bahan pekerjaannya. Tetapi ada baiknya ahli sejarah bertanya pada diri sendiri apakah yang disebut fakta yang dianggapnya sebagai realita itu dan dimana ia dapat atau telah memperolehnya. Apakah yang dianggapnya sebagai fakta-realitas itu adalah obyek di luar dirinya, seperti batu atau kayu yang dapat ditemui atau dikutip disepanjang jalan? Apakah fakta-realitas itu sebenarnya bukan hasil ciptaan pikirannya sendiri yang tidak ada bandingnya (*counterpart*) di luar dirinya?

Pertanyaan seperti ini perlu diajukan mengingat, menurut hemat saya, yang disebut sebagai fakta-realitas itu tidaklah seluruhnya subyektif dan tidak pula seluruhnya objektif, tetapi merupakan benda separuh-buatan, sesuatu "semi-manufactured article". Andaikata benda yang terdapat di luar diri-

nya itu memang tidak bersesuaian dengan apa yang ada di dalam benak pikiran manusia, si pemikir tidak akan dapat mengenalnya dan lalu mengambilnya sebagai fakta. Di fihak lain, si pemikir telah memilih sejumlah bahan faktual ini dari sekumpulan massa yang mungkin kurang disadarinya bahwa jumlahnya melimpah ruah tidak terbatas. Tetapi kalau dia tidak mengadakan pemilihan dan tidak mempelajari beberapa contoh yang telah dipilihnya itu, dia tidak akan memperoleh fakta yang dapat diolahnya secara mental.

Didalam melaksanakan proses pengolahan intelektual inilah perlu adanya penghayatan cabang falsafah yang dikenal sebagai "epistemologi", yaitu teori pengetahuan. Sebab pertanyaan mengenai hakikat dari fakta pada gilirannya menimbulkan persoalan tentang hubungan antara hipotesa dengan generalisasi disatu fihak dan di lain fihak tentang fakta-fakta yang berkaitan dengan hipotesa dan generalisasi tersebut. Hipotesa dan generalisasi tidak begitu saja timbul dalam pikiran. Kehadirannya dalam pikiran karena desakan, suggesti, dari pengamatan atas fakta, tetapi perlu disadari bahwa fakta yang cukup suggestif ini belum tentu, bahkan jauh dari, konklusif. Kalau hipotesa dan generalisasi ini perlu dikukuhkan, validitasnya perlu diuji melalui lebih banyak lagi fakta yang relevan yang dapat dikuasai oleh si pemikir. Tetapi berapa banyak yang dapat dikuasainya? Setiap saat perbendaharaan fakta yang telah dimiliki dapat saja diragukan oleh lain-lain fakta yang selama ini belum diketahui atau belum dipertimbangkan dan berkat kehadiran fakta-fakta baru ini mungkin saja koleksi fakta yang suggestif tersebut runtuh berantakan. Memang pikiran manusia tidak mempunyai kemampuan untuk mutlak memperoleh pengetahuan tertentu. Gambaran yang dibuatnya mengenai sesuatu gejala dalam batas cakrawalanya sendiri merupakan tidak lebih dari suatu pendekatan terhadap kebenaran yang mutlak.

Hal ini tidak hanya berlaku terhadap pemikiran manusia tentang hal non-manusia, tetapi juga tentang studi mengenai

hal-ikwal manusiawi. Data yang dapat dikumpulkan oleh orang-orang yang mempelajari hal-hal yang lain dari manusia memang sulit untuk dapat dikatakan lengkap dan pemilihan data itu sendiri juga dapat dikatakan arbitrar dan kebetulan. Jadi sejauh mengenai seleksi dan kontruksi intelektual di bidang studi bukan-manusia, kita betul-betul tergantung pada faktor kebetulan. Namun sejauh mengenai studi tentang hal-ikhwat manusia, kita masih tergantung pada beberapa faktor tambahan lainnya, seperti prasangka, pilih-kasih, kekacauan yang disadari atau tidak disadari. Hal ini karena pelajar tentang hal-ikhwat yang bukan-manusia merupakan pengamat yang tidak terlibat pada hal yang dipelajarinya sedangkan orang yang mempelajari hal-ikhwat manusia merupakan sekaligus peserta dan peninjau. Di samping benda di pentas dia berada pula di auditorium. Dia melakukan peranan ganda dan ini pula yang mempersulit situasi kerja intelektualnya.

Pelajar hal-ikhwat manusia sulit untuk melepaskan diri karena ia terlibat, secara emosional dan moral, dalam setiap perbuatan makhluk manusia yang dapat diketahuinya. Mungkin saja ia tidak akan mengutuk seekor harimau yang membantai habis seorang manusia karena mengetahui bahwa binatang buas ini bertindak mengikuti naluri yang berjalanan erat dengan susunan psikosomatik hewani. Tetapi ia pasti mengutuk atau sesedikitnya mengulas sesuatu tindakan seorang manusia dan penilaian moralnya diiringi dengan perasaan yang bobotnya berubah sesuai dengan derajat kebaikan atau keburukan dari tindakan yang berada dalam pengamatannya itu.

Inilah sebabnya mengapa tadi saya katakan betapa perlunya seorang pelajar sejarah menghayati falsafah dan khususnya epistemologi atau teori pengetahuan. Adalah bijaksana apabila seorang pemikir tentang apapun mempelajari lebih dahulu bagaimana bekerjanya pikiran manusia. Apabila hal ini diabaikannya ia tidak akan menyadari keterbatasan dari kekuatan pemikiran manusia. Bahkan disamping kelemahan-kelemahan yang umum terdapat pada pemikiran manusia,



Hadirin sekalian yang saya hormati.

Biar bagaimanapun kita yang hidup dewasa ini sangat jauh lebih beruntung dari nenek moyang kita dahulu. Apakah manusia pertama di bumi pertiwi ini diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam bentuknya yang sempurna seperti makhluk manusia dewasa ini atau tumbuh secara evolutif seperti yang kita lihat dari fosil di lapisan-lapisan lumpur sepanjang tebing dan beting Bengawan Solo, dari manapun mereka berasal dan datang, dapat kita bayangkan betapa sulit dan beratnya hidup mereka itu. Walaupun secara berangsur-angsur mereka mampu membangun perlindungan dan meramu makanan, mereka tidak mempunyai keluarga yang dapat memberikan tuntutan ataupun yang dapat dipakai sebagai contoh. Namun yang paling terasa tidak mereka punyai adalah suatu masa lalu. Mereka tidak mempunyai buku sejarah yang dapat menceritakan bagaimana manusia hidup sebelumnya. Mereka tidak mempunyai musik atau cabang kesenian lainnya, tidak mempunyai falsafah, tidak mempunyai konsep yang seragam tentang waktu.

Kita dewasa ini lebih berbahagia dari mereka karena kita kini mempunyai satu masa lalu, mempunyai satu sejarah. Bagi kita sejarah ini merupakan satu warisan nasional. Sekarang kita berkumpul untuk menyimak, menggali "arti" dari warisan kita ini. Dan arti ini, kalau saya tidak keliru menangkapnya, adalah semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Bukankah tema seminar kita ini adalah, saya ulangi, melalui penelitian dan penulisan sejarah nasional dan lokal kita bina semangat persatuan dan kesatuan bangsa.

Bahwa seminar sejarah ini dengan tema seperti ini di mulai pada tanggal 10 Nopember, sungguh merupakan satu kesengajaan yang membanggakan. Tanggal 10 Nopember, yang dengan setia kita peringati setiap tahun, adalah hari pahlawan, hari yang dihiasi dengan semangat patriotik. Sedangkan membina semangat persatuan dan kesatuan bangsa, saya kira dapat digolongkan pada usaha yang didorong oleh semangat patriotik.

pemikiran manusia tentang hal-ikhwal manusia mempunyai keterbatasan okkupasionalnya sendiri. Orang yang mempelajari hal-ikhwal manusia harus menyadari akibat dari kedudukannya sebagai peserta yang sekaligus peninjau. Keadaan seperti ini intrinsik dengan objek studinya, yaitu sesama makhluk manusia seperti dirinya sendiri juga, dan apabila hal ini kurang disadarinya ada resiko ia akan memouat kekeliruan yang mudah sekali dihindarkan oleh orang yang mempelajari hal-ikhwal yang tidak mengenai makhluk manusia.

Para peserta seminar yang terpelajar.

Falsafah, atau sesedikitnya epistemologi, juga diperlukan didalam menggali atau berusaha menemui arti dari sejarah. Hal ini mengingat adanya ambiguitas dalam perkataan "arti", yaitu arah atau pengertian.

Secara poetis orang seringkali mengatakan tentang "arus" atau "gelombang" sejarah dan sebagai arus atau gelombang, sejarah membawa, menghanyutkan atau mengantarkan seseorang ke satu realitas dan meninggalkan atau membiarkan yang lain dalam kebingungan. Bila "arti" dari sejarah ini ditafsirkan sebagai "arus" atau "gelombang", kiranya ia ditanggapi sebagai "arah". Artinya, kita seperti melihat di dalam rangkaian momen yang berkesinambungan itu adanya satu arah yang berkelanjutan, yang ditentukan satu dan lainnya oleh kejadian kausal. Tetapi arah, orientasi atau arus ini tidak hanya sekadar diterima sebagaimana adanya. Orang cenderung pula untuk menilainya, bahkan dijadikan sumber dan ukuran dari setiap nilai. Bila demikian pada waktu yang bersamaan "arti" dari sejarah ini diberikan satu tafsiran yang lain, yaitu pengertian, makna atau dasar pengakuan (*raison d'etre*). Dengan perkataan lain mempunyai "arti" sekaligus ditanggapi sebagai lawan dari "tanpa arti", lawan dari "non-sens". Jadi "tujuan" secara implisit dimasukkan dalam pengertian "arti" ini.

Soalnya lalu, apakah cukup bahwa sejarah mengandung suatu orientasi atau arah untuk dapat dinyatakan mempunyai

arti? Sebaliknya, apakah satu sejarah tanpa arah tidak mungkin dinyatakan mempunyai arti?

Menjawab pertanyaan seperti ini menjadi mudah selama kita menggunakan suatu waktu yang berdimensi tunggal, yang disimbolkan melalui satu garis lurus. Disini sejarah berjalan sepanjang satu garis lurus yang mengarah dari masa lalu ke masa depan. Kesesuaiannya, walaupun ada, membuktikan adanya kesinambungan dari momen yang beruntun saling menyusul, satu arah yang jelas terbaca dari keseluruhan kejadian. Arah yang berkelanjutan ini, walaupun tidak dengan sendirinya dapat ditafsirkan sebagai suatu "arti" yang berupa dasar pengakuan, sesedikitnya dapat ditanggapi sebagai suatu kondisi.

Agar supaya kesinambungan tersebut pada waktu yang bersamaan dapat ditafsirkan sebagai "pengertian", kita terpaksa untuk memasukkan "tujuan", yang juga bersifat linear. Artinya, momen yang berkesinambungan dari sejarah tidak hanya merupakan satu rangkaian yang berkesesuaian, satu arah yang berkelanjutan, tetapi juga satu penyelesaian. Dengan perkataan lain, pada "arah" atau "orientasi" ini perlu dibubuhi satu tujuan, yang juga terletak pada garis lurus yang sama, dan yang dalam dirinya merupakan "raison de'etre" dan sumber nilai bagi keseluruhan proses sejarah yang bersangkutan.

Bila demikian, bila pengetahuan kesejarahan telah mencapai tingkat perkembangan yang seperti ini, studi mengenai morphologi sejarah menjadi sama pentingnya dengan studi mengenai momen dan kejadian yang kita awasi kaitan yang satu dengan lainnya. Morphologi dari sejarah menjadi semakin penting dengan semakin meluasnya cakrawala pandangan ahli sejarah.

Usaha untuk membuat suatu rekonstruksi dari jalannya kejadian-kejadian masa lalu pada mulanya dibatasi pada penuturan atau cerita dari satu periode tertentu. Memang semua rekonstruksi kesejarahan terpaksa dilakukan dalam bentuk penuturan karena semua hal ikhwal manusia terus terjadi dalam dimensi waktu. Apabila kita berusaha menyvetop jalan-

nya kejadian-kejadian untuk sekedar memisahkannya agar tidak bertumpang tindih sebagai benang kusut, kita sebenarnya sudah mengganggu, walaupun tidak merusak, realitas sejarah. Sejarah dapat dilukiskan sebagai suatu arus kejadian-kejadian yang secara metaphorik dapat disamakan dengan suatu arus dari aliran air dan sebagai hal ini, ia mempunyai bentuk yang dapat dilihat dan dianalisa.

Apakah sejarah merupakan suatu gerakan yang kacau balau di mana arusnya tidak mempunyai suatu arah tertentu, atau, apakah arusnya ini jelas mempunyai satu orientasi, sama halnya dengan arus sebuah sungai? Apabila arus sesuatu sungai dapat disamakan dengan arus sesuatu sejarah, apakah sejarah berjalan (mengalir) dengan kecepatan yang sama, atau apakah kecepatan ini berubah-ubah menurut liku dan relung yang dilewatinya, atau apakah sejarah mempunyai kecenderungan umum untuk semakin lama semakin cepat jalannya atau secara bergantian semakin menurun? Dengan cara yang sama kita juga dapat bertanya apakah ia selalu bergerak dalam satu jalur atau selalu bergerak dalam berbagai cabang jalur yang paralel atau kadangkala bersatu atau kadangkala berpisah. Selanjutnya kita dapat pula bertanya apakah bentuk dari alur sungai yang sama tetap sama di titik manakala berpisah. Selanjutnya kita dapat pula bertanya apakah bentuk dari alur sungai yang sama tetap sama di titik manapun ia berada, atau berbeda-beda sesuai dengan kondisi yang di lampuainya, begitu rupa sehingga memudahkan atau mempersulit kita untuk membuat persamaan atau perbedaan di antara bentuk-bentuk tersebut. Cara mempelajari sejarah seperti inilah yang tadi saya sebutkan sebagai "morphologi" dari sejarah, yang agak berbeda dari epistemologi, tetapi biar bagaimanapun, dalam mempelajarinya, tetap diperlukan pemikiran yang sistematis, jadi artinya, tetap memperlakukan pengahayatan falsafah. Lebih-lebih bila studi morphologi sejarah ini dilakukan demi menggali "arti" yang dikandungnya itu.

Tadi saya katakan bahwa bagi kita sejarah bangsa yang cukup tua ini merupakan satu warisan nasional. Dan satu warisan dalam dirinya merupakan satu hak-kelahiran. A heritage is in itself a birthright. Pada saat dan suasana di mana internasionalisme merupakan satu mode, dimana patriotisme dianggap sebagai satu nilai yang kolot, melalui seminar sejarah ini kita tunjukkan bahwa sejarah nasional dan lokal merupakan dasar dari patriotisme yang tidak kunjung padam. Maka itu marilah dengan penuh ketekunan dan melalui keteraturan berpikir, dari sejarah kita, dari warisan nasional ini, kita gali arti yang berguna bagi usaha pembinaan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.

Dengan harapan seperti ini, dengan nama Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada Hari Pahlawan ini, Selasa – tanggal 10 Nopember 1981, Seminar Sejarah Nasional ke-III, dengan resmi saya nyatakan dibuka.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Dr. Daoed Joesoef.

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	
SAMBUTAN MENTERI P DAN K .....	
TOKOH DAN HISTRIOGRAFI TRADISIONAL Studi Kasus Tokoh Dipati Ukur Oleh: Edi. S.Ekadjati .....	1
PERANAN BENDA PURBAKALA DALAM HISTORIOGRAFI TRADISIONAL Oleh: Ayatrohaedi Universitas Indonesia .....	33
SASTRA DAN HISTORIOGRAFI TRADISIONAL Oleh: Sulastin Sutrisno Fakultas Sastra dan Kebudayaan U.G.M. ....	54
STRUKTUR POLITIK DAN HISTORIOGRAFI TRADISIONAL Oleh: F.A.Sutjipto Fakultas Sastra dan Kebudayaan U.G.M. ....	82

# TOKOH DAN HISTORIOGRAFI TRADISIONAL

## Studi Kasus Tokoh Dipati Ukur

Oleh : Edi S. Ekadjadi

### 1. Pengantar

Telah menjadi populer bahwa salahsatu patokan untuk menyusun kisah sejarah berpegang pada rumus 5W + 1H (Who, What, Why, Where, When, dan How). Faktor Who menyangkut masalah Tokoh.

Faktor tokoh tidak dapat ditinggalkan dalam sejarah, karena bukankah pada dasarnya sejarah itu berbicara tentang manusia. Tokoh itulah. Begitu besar peranan tokoh dalam sejarah sehingga ada pendapat yang menyatakan bahwa tokoh-tokoh (besar)-lah yang mengubah jalannya sejarah dunia.

Dalam perkembangan historiografi di Indonesia, kita mengenal jenis historiografi tradisional. Yaitu karya sejarah yang disusun secara tradisional. Di dalam historiografi tradisional masalah tokoh sangat besar pengaruhnya. Di dalam historiografi jenis ini pun terdapat kisah sejarah yang berpangkal pada tokoh-tokoh tertentu, seperti Hikayat Hang Tuah (berbahasa Melayu), Babad Diponegoro (berbahasa Jawa), Carita Dipati Ukur (berbahasa Sunda dan Jawa).

Sejauh manakah hubungan antara tokoh sejarah dengan historiografi tradisional itu? Sebuah pertanyaan yang ingin dijawab dalam makalah ini dengan mengambil kasus tokoh Dipati Ukur, walaupun mungkin tidak terjawab seluruhnya.

### 2. Dipati Ukur Sebagai Tokoh Sejarah

Menurut kesaksian orang Belanda, baik kesaksian langsung atau pun kesaksian tidak langsung,<sup>1</sup> antara tahun 1628

---

<sup>1</sup>Pencatat atau pelapor menyaksikan langsung peristiwanya dipandang sebagai kesaksian langsung. Jika pelapor tidak menyaksikan peristiwanya, kesaksiannya disebut kesaksian tak langsung.

sampai dengan 1636 diketahui adanya daerah Ukur, pasukan Ukur, rakyat Ukur, pemimpin rakyat Ukur, dan utusan rakyat Ukur. Daerah Ukur terletak di daerah pegunungan berdampingan dengan atau sebelah selatan Batavia dan di sebelah timur daerah pegunungan Banten. Pada bulan Oktober 1628 pasukan Ukur (dan Sumedang) dengan kekuatan 4000 – 4500 orang prajurit ikut serta dalam pengepungan kota Batavia atas perintah Sultan Mataram. Dalam pengepungan tersebut pasukan Ukur bermarkas di sebelah tenggara di luar benteng kota Batavia, berdekatan (dipisahkan oleh jalan dan Sungai Ciliwung satu kilometer di sebelah utara kedudukan/pasukan Mataram) dengan kedudukan pasukan Mataram pimpinan Tumenggung Bahureksa. Pada tanggal 21 Oktober 1628 tentara Kumpeni berkekuatan 2866 orang prajurit menyerang pasukan Ukur lebih dulu dalam rangka membebaskan diri dari kepungan musuh; baru kemudian menyerang pasukan Mataram. Ketika pasukan Mataram diserbu oleh pasukan Kumpeni, pasukan Ukur melarikan diri. Mereka kembali ke daerahnya. Sebagian rakyat Ukur mengungsi ke daerah Banten, dan Batavia, sebagian lagi tetap bertahan di negerinya sambil melancarkan pemberontakan terhadap Mataram dan mau mengangkat penguasa baru yang berdiri sendiri. Pemimpin rakyat Ukur mengirim utusan kepada Panembahan Ratu, Sultan Banten, dan Gubernur Jenderal VOC di Batavia untuk memohon bantuan dan izin menetap masing-masing di daerah Banten dan Batavia. Rakyat Ukur yang berjumlah sekitar 8.000 – 10.000 orang dibagi atas beberapa kelompok kecil untuk menghindari ancaman bahaya kelaparan. Di antara kelompok-kelompok rakyat tersebut terjadi perselisihan sehingga mengakibatkan adanya kelompok yang terpencil. Pada tahun 1630 dan 1632 Sultan Mataram mengerahkan pasukan dalam jumlah besar untuk menumpas pemberontakan rakyat



Ukur. Penyerangan pertama (1630) mengalami kegagalan. Sedangkan oleh penyerangan kedua (1632) yang jumlah pasukannya 40.000 orang prajurit perlawanan rakyat Ukur berhasil ditumpas. Sejumlah rakyat dan pemimpin rakyat Ukur tewas dalam pertempuran dan sebagian lagi (sekitar 1000 orang) ditawan dan kemudian dibunuh di Mataram.<sup>2</sup>

Komandan tertinggi pasukan Ukur, menurut sumber tertulis dari daerah-daerah Priangan (Galuh, Sukapura, Sumedang, Bandung) dan Banten,<sup>3</sup> bernama Dipati Ukur. Keterangan tersebut dibenarkan oleh kesaksian tradisi lisan yang hidup terus hingga saat ini di beberapa lokasi di daerah Kabupaten Bandung dan Karawang-Bekasi.<sup>4</sup> Menurut Carita Ukur dan naskah *Mangle Arum*, sesungguhnya tokoh Dipati Ukur bukan seorang kelahiran daerah Ukur, melainkan seorang pendatang. Ia berasal dari daerah Banyumas. Setelah berada di daerah Ukur, ia ditikahkan dengan Nyi Gedeng Ukur, putera Kepala Daerah Ukur. Karena Kepala Daerah Ukur tidak mempunyai putera laki-laki, maka diangkat menjadi Kepala Daerah Ukur menggantikan mertuanya dengan gelar Dipati Ukur.

Selanjutnya, Dipati Ukur diangkat oleh Sultan Mataram menjadi wedana-bupati wilayah Priangan bawahan Mataram. Wedana-bupati berfungsi sebagai koordinator sejumlah bupati di wilayah tersebut. Dalam hal ini, Dipati Ukur bertindak sebagai koordinator para bupati di wilayah Priangan.

---

<sup>2</sup>Ada 7 pucuk surat laporan, sebuah peta berikut penjelasannya, sepucuk surat perintah, sebuah laporan pandangan mata, sebuah catatan harian perorangan, dan 15 buah catatan harian Kumpeni yang mencatat peristiwa dan masalah ini. (Lihat dalam bibliografi dengan nama penyusun: Jan Pietersz Coen, J.K.J. De Jonge, P.A. Leupe, Dagh-Register).

<sup>3</sup>Tradisi lisan itu hidup di tempat-tempat yang terdapat atau dianggap terdapat peninggalan Dipati Ukur. Di daerah Kabupaten Bandung terdapat peninggalan-peninggalan tentang ibukota Ukur, benteng pertahanan Dipati Ukur, kuburan Dipati Ukur, dan lain-lain. Di daerah Karawang-Bekasi terdapat peninggalan tentang bekas perkemahan pasukan Dipati Ukur.

<sup>3</sup>Sumber tertulis tersebut dalam bentuk historiografi tradisional.

Daerah Ukur sendiri yang dikatakan oleh orang Belanda terletak di daerah pegunungan sebelah selatan Batavia berlokasi di daerah Kabupaten Bandung dan sekitarnya. Ibukotanya terletak di Desa Tenjonagara sekarang, termasuk Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, kira-kira 25 kilometer sebelah tenggara kota Bandung sekarang. Hingga akhir abad yang lalu lokasi tersebut lebih terkenal dengan nama Pabuntelan (P. de Roo de la Faille, 1895: 7-8).<sup>5</sup> Sedangkan Gunung Lumbung yang menjadi benteng pertahanan pasukan Dipati Ukur terletak di Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung, kira-kira 30 km sebelah baratdaya kota Bandung sekarang (P. van Oort & S, Muller, 1836: 99-102).<sup>6</sup>

### 3. Tokoh Dipati Ukur dalam Historiografi Tradisional

Adalah menarik perhatian bahwa peristiwa dan masalah Dipati Ukur sebagai Kepala Daerah Ukur bawahan Mataram, ikut serta dalam pengepungan kota Batavia, pemberontakan Dipati Ukur terhadap Mataram, dan penumpasan pemberontakan Dipati Ukur terhadap Mataram, dan penumpasan pemberontakan tersebut oleh pasukan Mataram dikisahkan dalam sejumlah historiografi tradisional yang berasal dari beberapa daerah Priangan (Galuh, Sukapura, Sumedang, Bandung), Talaga, Banten, Mataram, dan Batavia.<sup>7</sup> Kisah-kisah tersebut diungkapkan secara berbeda-beda atau mengandung perbedaan dalam hal-hal kecil ceritanya, tetapi sama dalam garis besarnya.

---

<sup>5</sup>Di situ terdapat makam Sembah Dalem Dipati Ukur yang dianggap keramat hingga sekarang, lapangan bekas keraton/pendopo, dan lain-lain.

<sup>6</sup>Hingga sekarang masih dapat dijumpai pecahan keramik di bukit-bukit sekitar gunung itu. Salah satu bukit dinamai Nagara (negara).

<sup>7</sup>Yang dimaksud historiografi tradisional dari Batavia ialah **Babad Tanah Pasundan** yang disusun oleh Mr. J.A. van der Chijs. Sesungguhnya ditinjau dari cara penyusunannya karya ini tidak tergolong historiografi tradisional, tetapi berhubung di dalamnya masih menggunakan bahan dari historiografi tradisional dengan pengambilan secara agak utuh, karya ini digunakan pula dalam pembicaraan ini.

Persamaan-persamaan ceritanya dapat dipandang sebagai inti cerita tentang Dipati Ukur (selanjutnya disebut Cerita Dipati Ukur atau disingkat CDU), sedangkan perbedaan-perbedaannya merupakan variasi dari CDU.

Berdasarkan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan dalam CDU, dapat dibedakan atas delapan versi CDU. Tiap-tiap versi CDU mempunyai beberapa CDU, kecuali versi CDU yang berasal dari Telaga, hanya mempunyai satu CDU. Kwantitas cerita tiap-tiap CDU dalam tiap-tiap versi CDU tidak sama, ada yang pendek dan ada yang panjang, kecuali tentunya CDU versi Talaga.

Ternyata kwantitas cerita CDU pada tiap-tiap versi CDU itu berhubungan erat dengan faktor-faktor penonjolan tokoh-tokoh setempat (tokoh-tokoh yang berasal dari daerah tempat lahirnya CDU), variasi cerita, dan waktu penyusunan CDU. Dalam hal ini arah perkembangan kwantitas cerita CDU pada tiap-tiap versi CDU sejajar dengan arah perkembangan penonjolan tokoh-tokoh setempat dalam CDU pada tiap-tiap versi CDU, sejajar dengan arah perkembangan variasi cerita dalam CDU pada tiap-tiap versi CDU, dan sejajar pula dengan arah perkembangan waktu penyusunan CDU pada tiap-tiap versi CDU. Artinya, semakin panjang kwantitas cerita CDU pada tiap-tiap versi CDU akan semakin menonjol peranan tokoh-tokoh setempatnya pada CDU tersebut dan semakin banyak variasi ceritanya serta semakin akhir waktu penyusunannya.

Gambaran tokoh Dipati Ukur dalam tiap-tiap versi CDU bermacam-macam, bahkan gambarannya ada yang saling berlawanan antara satu versi CDU dengan versi CDU lainnya. Pada satu pihak Dipati Ukur digambarkan sebagai tokoh pemberontakan, pada pihak lain digambarkan sebagai tokoh pahlawan. Selain itu, ada yang menggambarkan Dipati Ukur sebagai tokoh yang sikap dan tindakannya positif dan ada yang menggambarkan sebagai tokoh yang sikap dan tindakannya negatif;

ada yang menggambarkan sebagai tokoh kuat dan ada yang menggambarkan sebagai tokoh lemah pribadi dan kemampuan pasukannya; ada yang menggambarkan sebagai tokoh ideal sebagai pemuda, pemimpin, penguasa, dan panglima perang dan ada yang menggambarkan sebagai tokoh yang tujuan hidupnya tak rendah dan pendiriannya tetap. Di samping itu, Dipati Ukur dilukiskan sebagai tokoh manusia biasa, pada tempat lain digambarkan sebagai tokoh legendaris, bahkan sebagai tokoh mitos.

Sebagai tokoh pemberontak, Dipati Ukur berusaha meyakinkan pengikut/rakyatnya agar melepaskan kesetiaan terhadap Sultan Mataram dan mendukung dia untuk mendirikan pusat kekuasaan baru yang berdiri sendiri dengan dia sebagai pemimpinnya, berusaha mengajak para bupati di seluruh Priangan untuk ikut serta menjadi pengikutnya, kemudian bersama-sama berontak kepada Sultan Mataram, dan membangun perkampungan serta benteng pertahanan di Gunung Lumbang (Sarsilah Prabu Siliwangi, hal. 12-13; Naskah LOr. 7905, hal. 113-118; Naskah LOr. 7858, hal. 3-10).

Menurut Babad Sumedang (Said Raksakusumah dkk., 1978: 44-6), Dipati Ukur dipandang sebagai pemberontak, karena ia tidak memenuhi perintah Susuhunan Mataram agar ikut serta dalam penyerangan ke Jakarta melawan Kumpeni dan menolak panggilan untuk menghadap Sinuhun Mataram. Di samping membangun benteng pertahanan dan menyatakan tidak setia lagi kepada Mataram, Sejarah Banten (pupuh ke-36) mengungkapkan pula bahwa sikap berontak Dipati Ukur terhadap Mataram diperlihatkan dengan tindakannya memisahkan diri dari pasukan Mataram dalam usaha menggempur Kumpeni di Batavia, kemudian meninggalkan medan tempur agar pasukan Mataram tidak mampu mengalahkan Kumpeni. Sultan Mataram menurut Babad Tanah Jawi dan Babad Kraton, (hal. 279b-280a), sangat marah begitu mendengar terjadinya

pemberontakan Dipati Ukur. Ia langsung mengeluarkan perintah agar pemberontakan tersebut segera ditumpas habis. Tetapi menurut catatan P. van Oort & S. Muller (1836: 99-103), naskah *Mangle Arum* (hal. 3-5), dan *Carita Ukur* (hal. 76-77) sesungguhnya Dipati Ukur tidak bermaksud berontak, melainkan difitnah berontak terhadap Mataram. Ia tidak bermaksud pula untuk tidak mentaati perintah Sultan Mataram dalam ambil bagian dalam penyerangan ke Batavia melawan orang Belanda, tetapi Dipati Ukur dan pasukannya tidak sampai ke Batavia demi membela rakyatnya dan menjaga kehormatan dan harga dirinya, karena diganggu dan dinodai oleh utusan Mataram atau yang mengaku utusan Mataram. Bahkan menurut buku Dipati Ukur (1960: 60-113), Dipati Ukur dan pasukannya benar-benar berpartisipasi dalam pertempuran di Batavia.

Gambaran Dipati Ukur sebagai tokoh pahlawan diungkapkan dalam buku *Dipati Ukur* (1959, 1960). Di sini Dipati Ukur digambarkan sebagai tokoh yang suka membela kebenaran dan keadilan, tabah dan siaga dalam menghadapi fitnah dan tipu daya orang, berani bertindak dengan penuh pertimbangan dalam menumpas kedoliman, berlaku adil dan bijaksana dalam memerintah rakyat dan memimpin peperangan, ahli dalam siasat perang dan pertarungan menghadapi musuh, dan rela berkorban demi membela rakyat dan tanah airnya lebih dari ketaatan kepada atasannya. Bahkan sebenarnya dalam buku ini Dipati Ukur digambarkan sebagai tokoh ideal, baik sebagai pemuda, prajurit, pemimpin masyarakat, kepala daerah (kepala negara) maupun sebagai panglima perang. Di sini ia dilukiskan sebagai tokoh manusia sempurna tanpa cacat. Lebih dari itu dalam buku ini Dipati Ukur dilukiskan seolah-olah bukan seorang manusia biasa, melainkan tokoh manusia luar biasa yang telah ditakdirkan sejak lahir, bahkan sebelum lahir, menjadi tokoh pahlawan daerah dan rakyat Ukur. Atau dengan kata

lain, tampak di sini Dipati Ukur tidak semata-mata dikisahkan sebagai tokoh sejarah, tetapi sebagai tokoh legenda, bahkan tokoh mitos. Memang beberapa lokasi yang dianggap makam Dipati Ukur di daerah Kabupaten Bandung hingga sekarang masih dianggap keramat dan suka diziarahi orang.

**Sejarah Sukapura** (Naskah LOr. 7858, hal. 7-19) selain menggambarkan Dipati Ukur sebagai tokoh pemberontak, juga melukiskannya sebagai tokoh negatif dan lemah. Dipati Ukur selalu menderita kekalahan dalam setiap pertempuran. Ia kalah dalam pertempuran di Madura, Batavia, Gunung Pongporang, dan Gunung Lumbang. Dipati Ukur mengambil beberapa keputusan atas dasar perasaan takut dan memperlihatkan pribadi lemah, seperti kesediaan menyerang Batavia, memberontak terhadap Mataram, dan menyerah kepada pasukan Mataram pimpinan Tumenggung Bahureksa. Pendiriannya gampang berubah sehingga tidak konsekuen terhadap keputusan yang diambilnya. Tujuan hidupnya dangkal dan rendah. Ia sampai hati mengorbankan rakyat/pengikutnya hanya untuk bisa lebih lama menikmati kehidupan duniawiyah. Ia menyerah bukan dengan maksud mau mempertanggungjawabkan segala sikap dan perbuatannya, melainkan dengan harapan mendapat ampun dari Sultan Mataram. **Wawacan Sajarah Galuh** (Naskah LOr. 7905, hal. 113-29) pun melukiskan Dipati Ukur sebagai tokoh negatif dan banyak cacat pribadinya, tetapi tidak separah seperti yang digambarkan oleh **Sajarah Sukapura**. Di sini Dipati Ukur tidak digambarkan sebagai tokoh lemah yang selalu kalah perang dan akhirnya menyerah, tetapi pada mulanya berhasil menggagalkan serangan pasukan Mataram berkat senjata ampuh yang dimilikinya berupa batu berbentuk kerbau sebesar lumbang yang bila dilemparkan bisa kembali lagi dan basis pertahanannya di Gunung Lumbang yang sangat curam. Walaupun akhirnya pemberontakan Dipati Ukur dapat dihancurkan, tetapi bukan melalui

berserah diri, melainkan karena ditangkap dalam medan tempur oleh seorang tokoh setempat (dari Galuh) yang memang ditonjolkan peranannya. **Kitab Pancakaki** dari Sumedang (**Naskah LOr. 6499**, hal. 4-5) juga mengungkapkan kelemahan dan sikap negatif Dipati Ukur. Diutarakannya bahwa Dipati Ukur yang memberontak terhadap Mataram bukan menyiagakan angkatan perangnya ketika pasukan Sumedang datang ke Ukur atas perintah Sinuhun Mataram, melainkan melarikan diri ke Banten. Begitu pula, hal serupa diungkapkan pula oleh **Babad Sumedang** (Said Raksakusumah, dkk., 1978: 48-52) tetapi tempat pelariannya bukan ke Banten, melainkan ke Gunung Lumbang. CDU yang berasal dari Talaga (**Sajarah Bandung**, hal. 83-5) melukiskan Dipati Ukur sebagai tokoh yang lemah tapi tidak negatif gambarannya. Ia tidak berdaya berada dalam tahanan pasukan Mataram dan tidak berani kembali ke Ukur dari Talaga karena malu pernah ditawan musuh. Hanya berkat pertolongan Pangeran Aria Salingsingan (tokoh setempat), Dipati Ukur selamat dari ancaman hukuman mati pihak Mataram.

Walaupun tidak sampai menyatakan sebagai pahlawan, CDU-CDU lain yang berasal dan disusun di Bandung selalu membela tokoh Dipati Ukur. Dipati Ukur itu, katanya, sama sekali tidak berniat berontak terhadap Mataram, melainkan difitnah berontak (**Carita Ukur**, hal. 76-77) atau disangka berontak (**Mangle Arum**, hal. 4, Catatan P. van Oort & S. Muller, hal. 103-4). Kalaupun ia menghukum utusan Mataram, karena utusan itu telah berbuat tidak senonoh terhadap isteri dan rakyat Dipati Ukur. Di sini dituturkan bahwa Dipati Ukur berhasil menangkis serangan pasukan Mataram berulang kali yang menunjukkan Dipati Ukur sebagai tokoh kuat dan tangguh. Hanya karena penghianatan keluarga atau rakyatnya sendiri, melalui tipu daya, akhirnya Dipati Ukur dapat dikalahkan.

Kecuali CDU dalam **Carita Ukur**, buku **Dipati Ukur**, dan

**Sajarah Bandung** (CDU berasal dari Talaga), semua CDU menyatakan bahwa akhirnya Dipati Ukur dapat ditangkap dan dibunuh. Tetapi dalam cara penangkapan dan pembunuhannya diungkapkan secara berbeda-beda. CDU panjang versi Galuh mengutarakan bahwa Dipati Ukur ditangkap oleh Bagus Sutapura dari Kawasen (Galuh) di Gunung Lumbang dan kemudian dihukum mati di Mataram. CDU versi Sukapura menyatakan bahwa Dipati Ukur menyerahkan diri kepada Tumenggung Bahureksa (pimpinan pasukan Mataram yang mengejar Dipati Ukur) dan kemudian dihukum mati di Mataram. CDU versi Sumedang mengungkapkan secara tidak sama dalam hal ini. Menurut naskah LOr. 7442 (hal. 227-8), Dipati Ukur dihukum mati oleh Sultan Mataram tanpa menjelaskan cara penangkapannya. Sedangkan **Kitab Pancakaki** (hal. 5) mengatakan bahwa Dipati Ukur yang melarikan diri ke Banten, diserahkan oleh Sultan Banten kepada Sultan Mataram yang memintanya, kemudian dihukum mati di Mataram. Tetapi menurut **Babad Sumedang** (ha. 52-3), Dipati Ukur itu berhasil dibunuh oleh Entol Wirawangsa dari Sukakarta di Gunung Lumbang, kemudian kepalanya diserahkan kepada Sinuhun Mataram oleh Astamanggala dari Cihaurbeuti.

Berbeda dengan penuturan tersebut di atas, menurut **Carita Ukur** (hal. 76-7), sebenarnya Dipati Ukur tidak pernah tertangkap oleh lawannya, sebab ia berhasil meloloskan diri dari kepungan pasukan Mataram. Yang ditangkap oleh pasukan Mataram adalah Dipati Ukur palsu, yaitu orang yang menyamar sebagai Dipati Ukur. Hal serupa diungkapkan pula oleh buku **Dipati Ukur** (1960: 136-42), hanya di sini justru Dipati Ukur yang menyamar sebagai petani biasa, sedangkan yang tertangkap oleh pasukan Mataram adalah orang dari Banyumas yang mengaku-aku Dipati Ukur. Dalam CDU versi Talaga (**Sajarah Bandung** (hal. 83-5) dikemukakan bahwa Dipati Ukur



berhasil ditangkap oleh pasukan Mataram. Tetapi ia tidak jadi dibawa ke Mataram, karena ditolong oleh Pangeran Aria Salingsingan dari Talaga. Selanjutnya, Dipati Ukur menetap di Talaga sampai meninggalnya.

#### **4. Latar Belakang Gambaran Tokoh Dipati Ukur yang Kontroversi**

Uraian di atas menimbulkan pertanyaan, mengapa gambaran tokoh Dipati Ukur demikian kontroversi dalam historiografi tradisional? Dalam rangka menjawab pertanyaan tersebut, pertama-tama perlu dihubungkan dengan tujuan penyusunan historiografi tradisional itu, selanjutnya dihubungkan dengan identitas penyusunannya, situasi yang melahirkan historiografi tradisional itu, kedudukan daerah/penyusun dengan masalah isi historiografi tradisional.

##### **4.1. Tujuan Penyusunan**

**Sejarah Sukapura** (pupuh 1) dan **Babad Sumedang** (Volksalmenak Soenda, 1921: 233) disusun dengan maksud untuk pegangan atau pedoman keluarga bangsawan setempat (dalam hal ini bangsawan Sukapuran dan Sumedang). Suatu pegangan atau pedoman untuk mengenal silsilah dan sejarah leluhur dan kaum kerabat mereka.

Tujuan tersebut sesuai dengan ruang lingkup dan isi ceritera karangan itu. Yaitu merupakan perpaduan antara kisah leluhur atau dianggap leluhur satu atau sekelompok keluarga bangsawan tertentu dengan silsilah leluhur dan kerabat mereka. Dalam hal ini, **Sajarah Sukapura** berisi kisah sejarah dan silsilah keluarga bangsawan Sukapura.

Dalam **Sajarah Bandung**, **Kitab Pancakaki**, **Salasilah Suci**, **Carita Ukur**, **Wawacan Sajarah Galuh**, dan **Mangle Arum** tidak dinyatakan secara tersurat tujuan penyusunannya. Tetapi mengingat ruang lingkup dan isi ceritanya sejenis dan faktor lain yang akan dikemukakan di bawah,

tujuan penyusunan karangan-karangan itu pun kiranya sama. Memang menurut Raden Padmadikusumah (1895), tiap-tiap bupati Galuh sejak Bupati R.A. Angganaya (1678-93) memiliki buku pegangan yang berisi sejarah dan silsilah leluhur dan keluarga bupati yang bersangkutan. Selain itu, pada masa itu tiap penyusun hanya mengisahkan sejarah keluarga mereka, jarang sekali menuturkan sejarah keluarga lain (Naskah LOr. 7399(4), hal. 2b).

Pengetahuan tentang sejarah dan silsilah leluhur dan kaum kerabat dianggap penting pada waktu itu (pada kalangan tertentu hingga sekarang), bukan hanya untuk mengetahui para anggota keluarga besar mereka, tetapi juga untuk memperoleh berkat dari leluhur mereka (Volksalmenak Soenda, 1921: 233) dan untuk kepentingan mempertahankan serta memperjuangkan kedudukan mereka dalam lapangan pemerintahan.<sup>8</sup>

**Sajarah Banten dan Babad Tanah Jawi** mempunyai tujuan yang sama dengan historiografi tradisional dari wilayah Priangan, selain tujuan lainnya.<sup>9</sup> Sedangkan **Babad Tanah Pasundan** disusun dengan maksud sebagai bahan bacaan anak-anak sekolah dan bangsawan Sunda dalam rangka menjaga kepentingan kolonial.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Sebagai contoh, keluarga bangsawan Sumedang dan Sukapura mengajukan permohonan/usul kepada Residen Priangan agar jabatan bupati Limbangan yang kosong tahun 1811-3 diisi oleh calon yang mereka ajukan yang berasal dari keluarga bangsawan mereka masing-masing. Surat permohonan itu dilampiri oleh silsilah keluarga bangsawan mereka masing-masing (Rd. Asik Natanegara, 1938: 104-5).

<sup>9</sup>Tujuan dan fungsi lain di antaranya untuk memperoleh kekuatan gaib, kegiatan upacara sakral, benda keramat (Lihat Sartono Kartodirdjo, 1968: 25-8).

<sup>10</sup>**Babad Tanah Pasundan** diterbitkan tahun 1880 oleh pemerintah kolonial dalam bahasa Sunda dan huruf Jawa-Sunda yang rupanya lebih dikenal oleh masyarakat tertentu (bangsawan) masa itu. Ringkasan karangan ini dicetak dalam huruf Latin untuk bacaan anak-anak sekolah dasar. Tampaknya karangan aslinya ditulis dalam bahasa Belanda dengan judul *Geschiedenis van de Soendalanden*, yang kemudian diterjemahkan oleh Raden Kartawinata ke dalam bahasa Dunda.

Penyusunan buku **Dipati Ukur** dimaksudkan agar dijadikan pegangan oleh semua orang Sunda yang waktu itu (1957-1960) sedang menghadapi dan mengalami krisis kepemimpinan dari krisis sosial. Dengan terbitnya buku itu diharapkan dapat membantu orang Sunda dalam mengatasi krisis tersebut (Rohendi Sumardinata & Supis, 1959: 3).

Dengan demikian, penyusunan historiografi tradisional yang di dalamnya mengandung CDU mempunyai tujuan praktis (pedoman keluarga, berkat leluhur), tujuan didaktis (pedoman keluarga, menambah ilmu), dan tujuan politis (mempertahankan dan memperjuangkan kedudukan, mengubah situasi sosial).

#### 4.2. Identitas Penyusun

CDU dalam naskah LOr. 7399(5), **Sajarah Sukapura, Kitab Pancakaki, Babad Sumedang, Sajarah Bandung** (4 orang), **Mangle Arum**, buku **Dipati Ukur** (2 orang), **Sajarah Banten**, dan **Babad Kraton** menyebutkan nama penyusunnya. Mereka secara berturut adalah Raden Arya Sukmandara, Raden Kanduruan Kertinagara, Raden Adipati Suryalaga, Raden Aria Adipati Martanagara, Raden Jayakusumah, Mas Alangjuru, Raden Jayalengkanajuru, Raden Rangga Sastranagara, Haji Harun Al-Rasyid, Rohendy Sumardinata, Supis, Sandisastra, dan Raden Tumenggung Jayengrat.

R.A' Sukmandara atau R.A. Natadireja adalah putera Bupati Galuh R.A. Nata di Kusumah (1801-6). Ia pernah menjadi jaksa di Galuh. Pada waktu menyusun karangannya (1819) ia telah pensiun dari jabatannya dan menetap di Imbanagara, bekas ibukota Kabupaten Galuh (Naskah LOr. 7399(5), hal. 9c).

R.K. Kertinagara atau Haji Abdullah Soleh adalah

seorang pensiunan wedana Manonjaya, Kabupaten Sukapura. Pada waktu **Sajarah Sukapura** disusun (1886) ibu kota Kabupaten Sukapura berkedudukan di Manonjaya. Orang tuanya bernama Haji Abdul Wajah dan Nyai Raden Kombara. Dari pihak ibu ia piut Syekh Abdulmuhyi, seorang ulama terkemuka di daerah Sukapura pada abad ke-17 Masehi, yang menjadi guru dan penasehat bupati Sukapura. Ia mempunyai hubungan erat dengan Bupati Sukapura R.A. Wira Adegdaha (1854-74). Di kalangan bangsawan Sukapura R.K. Kertinagara lebih dikenal dengan sebutan Eyang Kerti atau Eyang Galonggong pada masa tuanya. Ia dipandang sebagai orang yang banyak ilmu dan tuahnya. Ia meninggal dunia pada tahun belasan (**Naskah LOr. 7858**, hal. 1; **Naskah LOr. 7540**, hal. 1; Wawancara dengan R. Moh. Syafei, Tasikmalaya 1976).

R.A. Suryalaga dilahirkan di Sumedang pada tahun 1771. Ia adalah putra Bupati Sumedang R.A. Suryalaga (1765-73). Masa kecilnya dilalui dengan penuh penderitaan dan keprihatinan sehingga terpaksa mengungsi ke Cianjur. Berkat asuhan dan bimbingan Bupati Cianjur Wiratanudatar (1776-801), ia bisa menjadi jurutulis bupati Cianjur, mantri gudang kopi di Bogor, bupati Krawang (1811-3), dan bupati Sukapura (1813-4). Ia mengajukan permohonan berhenti dari jabatannya sebagai bupati Sukapura, walaupun belum lama memangku jabatan tersebut. Kalangan bangsawan Sukapura banyak yang tak menyetujuinya berhubung dengan ia bukan berdarah bangsawan Sukapura. Setelah pensiun ia menetap di Talun, Sumedang. Pada waktu itulah ia menyusun karangannya antara tahun 1814-21 (**Kitab Pancakaki**, hal. 6, 83; De Haan, 1910: 142-4; 1912: 88; 1912a: 441, 868-9, 919-20).

Baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, R.A. A. Martanagara merupakan keturunan bupati Sumedang. Ia dilahirkan di Sumedang tanggal 9 Pebruari 1845. Pada usia 5 tahun ia diberi calon istri oleh bupati Sumedang (1836-82) atau uanya dan dikhitan bersama 2 orang putranya di pendopo Kabupaten Sumedang. Pada bulan Pebruari 1862 ia diangkat oleh Bupati Sumedang menjadi guru di Sumedang. Selanjutnya, ia memasuki bidang kepomongprajaan dengan menduduki jabatan-jabatan camat Cikadu (1864), kaliwon kota Sumedang (1865-9), wedana Sumedang (1869-84), patih afdeeling Mangunreja, Sukapura (1884-93), dan akhirnya bupati Bandung (1893-918). Pada awal pemerintahannya, R.A.A. Martanagara pernah diprotes dalam bentuk sabotase oleh sekelompok bangsawan Bandung yang tidak setuju terhadap pengangkatannya sebagai bupati Bandung berhubung dengan dia bukan berasal dari kalangan bangsawan Bandung. Sesudah pensiun ia menetap di Sumedang sampai wafatnya pada tahun 1926 (R.A.A' Martanagara, 1923: 5, 43; G.W.J. Drewes, 1951: 229).

Raden Jayakusumah pernah menjadi patih Kabupaten Batulayang. Ia masih keturunan Bupati Batulayang Raden Rangga Abdurahman, Bupati Bandung Anggadireja I (1681-704), dan bahkan keturunan Dipati Ukur. Pada tahun 1802 Kabupaten Batulayang dihapuskan dan wilayahnya digabungkan dengan Kabupaten Bandung (Sajarah Bandung, hal. 38-40, 85-6; De Haan, 1910: 137).

Mas Alangjuru dan Raden Jayalengkanajuru tidak diketahui identitasnya lebih jauh. Mereka menyusun Sajarah Bandung sampai dengan masing-masing pemerintahan Bupati Bandung Wiranatakusumah II (1795-1829) dan Bupati Wiranatakusumah III (1829-46). Mungkin

mereka termasuk pegawai di lingkungan Kabupaten Bandung (**Sajarah Bandung**, hal. 1).

Raden Rangga Sastranagara atau Haji Muhamad Ajali adalah putra Bupati Bandung Wiranatakusumah III (1829-46). Ia merupakan putra ke-12 dari 21 orang putra Bupati Wiranatakusumah III. Ia pernah menjadi mantri pulisi (sampai tahun 1843) di Bandung dan kumetir besar kebun kopi Bandung (1846). Dalam sejarah hidupnya ia pernah mengembara ke Talaga (1844), naik haji (1855), dan mengembara di Ambon (1855-75). Pada waktu mengembara di Talaga, ia menikah dengan putra keluarga bangsawan Talaga. Ternyata dari pihak ibu, R.R. Sastranagara masih mempunyai darah bangsawan Talaga. **Sajarah Bandung** disusun sekitar tahun 1891 (Naskah LOr. 6455, hal. 5, 9-10, 47-8; Mas Kartadinata, 1921: 5-6).

Identitas Haji Harus Al-Rasyid tidak diketahui lebih jauh. Tapi tampaknya penyusun **Mangle Arum** ini berasal dari keluarga bangsawan Bandung dan mempunyai hubungan dekat dengan keturunan para bupati Ukur yang menurunkan tokoh agama di Mahmud, Bandung (**Mangle Arum**, hal. 3).

Rohendi Sumardinata dilahirkan di Bandung pada tahun 1950-an. Tetapi karena mendapat kesulitan dalam kenaikan pangkat, ia keluar dari militer. Pada waktu timbul gerakan kedaerahan di Jawa Barat (1950-an) ia dianggap terlibat dalam gerakan itu. Ternyata hal itulah yang menyebabkan pangkatnya di lingkungan AURI tidak atau sulit naik. Sejak kecil ia tertarik kepada sejarah. Konsep buku **Dipati Ukur** disusun dalam situasi hangat gerakan kedaerahan.

Supis singkatan dari Supyan Iskandar. Ia berusia 55 tahun pada waktu menyusun buku **Dipati Ukur** bersama

Rohendy Sumardinata. Pada waktu itu ia termasuk anggota pimpinan organisasi Daya Sunda yang mensponsori penerbitan buku itu. Daya Sunda adalah organisasi berdasarkan kedaerahan yang didirikan oleh tokoh-tokoh masyarakat Sunda di Bandung tahun 1953.

Sesungguhnya Sandisastra, mungkin sekali nama samaran, bukanlah penyusun **Sajarah Banten**, melainkan orang yang menceritakan isi **Sajarah Banten** kepada saudaranya, Sandimaya. Namun jelas bahwa Sandisastra dan Sandimaya tergolong keluarga bangsawan Banten. Ia mempunyai pengetahuan luas dan catatan tentang Sejarah Banten (Hoesein Djajadiningrat, 1913: 16).

Raden Tumenggung Jayengrat adalah menantu Sultan Yogyakarta Pangeran Mangkubumi (1742-92) dan masih keturunan keraton Mataram. Ia menulis **Babad Kraton** pada tahun 1777-8 atas perintah Sultan Yogyakarta (M.C. Ricklefs, 1973: 303, 341).

Dari uraian di atas, jelas bahwa para penyusun historiografi tradisional yang di dalamnya mengandung CDU berasal dari lingkungan keluarga bangsawan setempat atau mempunyai hubungan dekat dengan penguasa daerah setempat. Oleh karena itu, meskipun karangan-karangan lainnya, seperti **Wawacan Sajarah Galuh**, **Salasilah Suci**, **Carita Ukur**, tidak menyebutkan nama penyusunnya, tetapi dapat diperkirakan bahwa mereka berasal dari lingkungan bangsawan setempat atau mempunyai hubungan dekat, hubungan darah atau hubungan kerja, dengan bupati setempat.

#### 4.3. Posisi Daerah yang Mengeluarkan CDU

Semua CDU yang memandang Dipati Ukur sebagai tokoh pemberontak dan tokoh yang sikap dan tindakannya negatif berasal dari daerah yang di dalam ceritanya

terlibat atau ikut serta dalam penumpasan pemberontakan Dipati Ukur. CDU-CDU tersebut berasal dari daerah-daerah Galuh, Sukapura, Sumedang, dan Mataram. CDU-CDU yang menyebutkan Dipati Ukur sebagai pemberontak, tetapi tidak menggambarkannya sebagai tokoh negatif, melainkan hanya sebagai tokoh lemah, berasal dari daerah yang netral, tidak terlibat dalam pemberontakan dan tidak terlibat dalam penumpasan pemberontakan Dipati Ukur. CDU-CDU ini berasal dari daerah Talaga, Banten, dan Batavia. Sedangkan CDU yang berasal dari Bandung, daerah tempat kekuasaan dan pemberontakan Dipati Ukur, memandang Dipati Ukur sebagai tokoh pahlawan atau paling tidak sebagai tokoh yang sikap dan tindakannya positif.

Terbaginya wilayah Priangan yang tadinya dikoordinor oleh Dipati Ukur atas kelompok yang mendukung pemberontakan Dipati Ukur terhadap Mataram dan kelompok yang tidak menyetujui pemberontakan tersebut, diakui oleh kesaksian orang Belanda bahwa terjadi persepisan di antara kelompok-kelompok rakyat Ukur.

Lahirnya kabupaten-kabupaten Bandung, Parakamuncang, Sukapura, dan Kawasan yang menurut CDU-CDU (versi Galuh, Sukapura, dan Sumedang) sebagai hadiah Sultan Mataram terhadap tokoh-tokoh yang dipandang berjasa dalam penumpasan pemberontakan Dipati Ukur, sesuai dengan data-data sejarah Priangan selanjut-

---

<sup>11</sup>Ibunya bernama Nyi Mas Antiyan adalah putera Agus Surajanggala atau Raden Yudabrata. Raden Yudabrata (lahir di Talaga) mengembara ke daerah Priangan bersama 2 orang adiknya. Ia menetap di Lebakwangi, Sukapura serta menikah dengan gadis setempat.



nya.<sup>12</sup> Hal tersebut dibuktikan oleh piagam yang dikeluarkan oleh Sultan Mataram.<sup>13</sup>

Ditinjau dari sudut sejarah, tradisi, dan letak geografisnya, masuk akal jika Galuh, Sukapura, dan Sumedang menentang perlawanan Dipati Ukur terhadap Mataram; tapi sebaliknya, memihak Mataram.<sup>14</sup> Bahkan peristiwa dalam CDU dalam Sajakar Sukapura dipandang sebagai asal-usul lahirnya Kabupaten Sukapura.

Faktor itulah kiranya yang menyebabkan Dipati Ukur dipandang sebagai tokoh pemberontak yang negatif dalam CDU-CDU yang berasal dari daerah-daerah Galuh, Sukapura, dan Sumedang.

Cirebon diperintahkan oleh Mataram untuk ikut serta dalam menumpas pemberontakan Dipati Ukur. Tetapi rupanya Talaga tidak termasuk di dalamnya, sebab tidak ada keterangan tentang hal itu, baik dari catatan orang Belanda ataupun dari CDU-CDU. CDU versi Talaga sendiri bahkan bersikap memihak Dipati Ukur dan anti Mataram.

Kemungkinan besar lahirnya CDU versi Talaga dengan sikap demikian dimungkinkan oleh terjadinya pernikahan antara R.R. Sastranagara dengan anggota keluar-

---

<sup>12</sup>Sejak pertengahan abad ke-17 Masehi muncul Kabupaten Bandung, Parakamuncang, Sukapura, Kawasen, Imbanagara, Bojonglopang, Kertabumi sebagai hasil dari reorganisasi di wilayah Priangan. (Lihat: F. De Haan, 1910, 1912; *Dagh Register* sesudah tahun 1640).

<sup>13</sup>Piagam pengangkatan Ngabeuhi Wirawangsa, Ngabeuhi Samahita, dan Ngabeuhi Astamanggala oleh Sultan Mataram menjadi masing-masing bupati Sukapura, Parakamuncang, dan Bandung tertanggal hari Sabtu 9 Muharam tahun Alip. Pada tahun 1867 piagam aslinya masih didapatkan dalam peti resmi milik bupati Sukapura (K.F. Holle, 1869: 341-3).

<sup>14</sup>Daerah-daerah itu terletak sebelah timur daerah Ukur yang lokasinya lebih dekat ke Mataram. Di daerah-daerah itu banyak didapatkan folklor yang bertalian dengan hubungan baik dengan Mataram.

ga bangsawan Talaga dan adanya kuburan yang dipercayai sebagai kuburan Dipati Ukur dan kuburan pengiringnya. Sebagai sumber sejarah CDU ini rendah nilainya, sebab di dalamnya mengandung anakronistis dan unsur legendaris/mitos.<sup>15</sup>

Pihak Banten, baik dalam masalah pengepungan kota Batavia ataupun dalam masalah pemberontakan Dipati Ukur, tampaknya bersikap netral. Pada masa itu sedang terjadi persaingan pengaruh dan kekuatan di Pulau Jawa antara Mataram, Kumpeni, dan Banten. Banten menolak ajakan Mataram untuk bersama-sama menyerang Kumpeni di Batavia. Tampaknya Sultan Banten pun tidak berniat dengan sungguh-sungguh untuk membantu Dipati Ukur yang meminta bantuan dalam menghadapi kemungkinan serangan Mataram. Ia menerima baik utusan Dipati Ukur, hanya dalam rangka untuk mengetahui perkembangan masalah itu. Jadi, Banten tetap bersikap netral untuk menjaga keselamatan dirinya.

CDU yang berasal dari Batavia tentu saja bersikap simpati terhadap Dipati Ukur, karena keduanya mempunyai musuh yang sama, yaitu Mataram. Namun dalam membantu pihak Ukur yang datang kepadanya, bantuannya itu disertai pertimbangan dan rencana menghadapi Mataram. Kumpeni bersedia menerima pengungsi rakyat Ukur, tetapi dalam penempatannya disertai pertimbangan untuk menahan kemungkinan serangan Mataram.

Sedangkan CDU versi Bandung membela dan mengagungkan tokoh Dipati Ukur. Hal itu dapat dipahami,

---

<sup>15</sup>Tokoh Dipati Ukur disejajarkan masa hidupnya dengan tokoh Cilikwidara. Padahal Cilikwidara masa hidupnya pada akhir abad ke-17 Masehi. Pangeran Saling-singan mempunyai kekuatan gaib, sehingga seseorang bisa pulang pergi ke Mataram secara gaib dan orang dikubur bisa kembali lagi ke tempat asalnya.

sebab Bandung adalah kelanjutan daerah Ukur; dan Ukur adalah tanah air atau wilayah kekuasaan Dipati Ukur.

#### 4.4. Situasi Sosial yang Melahirkan CDU

”Historiografi Indonesia, seperti historiografi negeri negeri lain, adalah suatu bentuk dari suatu kultur yang membentangkan riwayatnya ..... Historiografi selalu mencerminkan kultur yang menciptakannya (Sartono Kartodidirdjo, 1968: 24-25). Oleh karena itu, dalam rangka memahami suatu historiografi, termasuk historiografi tradisional, perlu dihubungkan dengan lingkungan sosial yang melahirkannya. Begitu pula halnya dengan CDU.

Baik CDU sendiri maupun keseluruhan karangan yang mengandung CDU berisi cerita tentang lingkungan sosial pemegang kekuasaan (bangsawan), jalannya roda pemerintahan, dan masalah-masalah yang menyangkut pelaksanaan menjalankan suatu pemerintahan. Dengan kata lain, dunia CDU adalah dunia bangsawan.

Semua CDU disusun pada jaman kolonial (sebelum 1945), kecuali CDU dalam buku **Dipati Ukur** versi Bandung) yang disusun pada tahun 1957-60 (dalam masa Indonesia merdeka). Lima buah CDU disusun pada masa VOC (abad ke-17 dan ke-18 Masehi), sebuah CDU disusun pada masa pendudukan militer Jepang (1942-5), dan sisanya disusun pada masa Hindia Belanda (1800-942). Ternyata CDU yang disusun pada masa VOC (abad ke-17 dan 18) kwantitas ceritanya pendek, sedangkan CDU yang disusun sesudah masa itu kwantitas ceritanya panjang.

Sejak Priangan diserahkan oleh Mataram kepada VOC (1677, 1705) di wilayah ini berlaku sistem pemerintahan yang terkenal dengan sebutan **Preanger Stelsel**.

Sistem ini sebenarnya telah berlaku pula sebelumnya. Menurut sistem ini, para penguasa pribumi (bupati) tetap berkuasa di daerah mereka masing-masing. Kedudukan mereka pada umumnya berlaku secara turun temurun. Kumpeni tidak ikut campur dalam pemerintahan dalam kalangan pribumi. Hanya sebagai tanda bahwa penguasa pribumi berada di bawah kekuasaan Kumpeni, kedudukan mereka disahkan oleh surat keputusan Gubernur Jenderal Kumpeni. Kekuasaan Kumpeni dijalankan dengan lebih bercirikan dagang dari pada suatu pemerintahan. Selain itu, kekuasaan para bupati dibatasi oleh kewajiban-kewajiban terhadap Kumpeni, terutama penyerahan wajib hasil produksi dan tenaga kerja rodi daerah yang bersangkutan dalam jumlah tertentu (Clive Day, 1972: 109-14; Otto van Rees, 1880: 115; Henri Charles van Meerten, 1887: 13; Jacob Wouter de Klein, 1931: 1-10). Keadaan itu mengalami perubahan sejak kekuasaan Kumpeni diserahkan kepada pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Perubahan itu cenderung ke arah makin berkurangnya kekuasaan para bupati di daerah mereka masing-masing dan sebaliknya makin merasuknya kekuasaan pemerintah kolonial ke dalam kekuasaan bumi putera. Hal itu diawali oleh keluarnya peraturan pemerintahan bagi orang Indonesia (1809). Berdasarkan peraturan ini, para bupati tidak ditempatkan sebagai penguasa daerah yang dilindungi seperti yang berlaku pada masa sebelumnya, tetapi sebagai pegawai pemerintah (Ibid, hal. 109-14). Kini para pejabat pribumi diangkat dan diberhentikan oleh gubernur jenderal dan pejabat kolonial lain (Otto van Rees, 1880: 117-9). Soal keturunan tidak disebut-sebut lagi sebagai hak keluarga bangsawan tertentu. Peraturan pemerintah baru (Regeering Reglement) yang dikeluarkan tahun 1854 dalam pelaksanaannya sama saja.

Sesungguhnya Priangan mendapat kekecualian dalam perubahan corak pemerintahan. Di wilayah ini tetap berlaku **Preanger Stelsel**. Tetapi, sedikit demi sedikit keadaan itu mengalami perubahan pula yang berakibat kekuasaan para bupati di wilayah ini makin berkurang, seperti ikut campurnya pemerintah kolonial dalam pengaturan gaji pejabat pribumi (1825), penempatan 5 orang asisten residen (pejabat kolonial) sebagai pendamping bupati (1831-66), pengangkatan wedana yang hanya boleh dilakukan oleh pejabat kolonial (1840), pemerintah kolonial ikut campur dalam menangani pengadilan dan kepolisian sejak 1848 (Henri Charles van Meerten, 1887: 26-7; J.A. van der Chijs 1880: 386, 406). Kekuasaan para bupati dan pejabat pribumi lainnya di wilayah Priangan merosot samasekali, setelah diberlakukannya **Preanger Reorganisatie** pada 1 Juni 1871, yang menghapuskan berlakunya **Preanger Stelsel**. Berdasarkan peraturan ini, para pejabat pribumi ditempatkan sebagai pegawai pemerintah kolonial (*Ibid.*, hal. 35-40; Jacob Wouter De Klein, 1931: 119-29; R.A.A. Martanagara, 1923: 20-4).

Sejak awal abad ini pemerintah kolonial menganut dan melaksanakan sistem desentralisasi dalam pemerintahannya (The Liang Gie, 1967: 21-6). Akan tetapi kenyataannya sistem ini tidak mengubah kedudukan dan kekuasaan pejabat dan struktur pemerintahan pribumi, karena sistem ini pun diabdikan bagi kepentingan kolonial untuk mempertahankan kekuasaannya (*Ibid.*, hal. 28-9). Kedudukan dan kekuasaan kaum pribumi tetap di bawah penguasa kolonial dan mereka harus mengabdikan kepada pemerintah kolonial. Keadaan itu pada dasarnya tidak mengalami perubahan pada masa pendudukan militer Jepang, yang berubah hanya istilah-istilah yang berbau militeristik (*Ibid.*, 26-8, 30).

Keadaan umum yang digambarkan di atas dialami pula oleh Kesultanan Banten (dihapuskan tahun 1808) dan Kesultanan Surakarta serta Kesultanan Yogyakarta (*Ibid.*, 25-6; Sartono Kartodirdjo, 1966: 73-4). Hanya tentunya di Surakarta dan Yogyakarta terus hidup tradisi pemerintahan kesultanan.

Kondisi dan situasi sosial umum demikianlah yang melatarbelakangi lahirnya CDU-CDU itu. Di samping situasi umum tersebut, ada pula situasi khusus yang menyertai lahirnya tiap-tiap CDU. Situasi khusus itu berhubungan dengan masalah pergantian bupati di suatu daerah oleh orang yang bukan berasal dari keluarga bangsawan setempat, perubahan luas wilayah atau status daerah tertentu, kesenggangan waktu bagi penyusun, pengalangan pribadi penyusun, dan pergolakan politik di daerah itu.

Pada umumnya menjelang lahirnya CDU didahului oleh terjadinya peristiwa-peristiwa atau timbulnya masalah-masalah yang menggoncangkan kedudukan keluarga bangsawan setempat. Kegoncangan itu biasanya akibat keputusan atau tindakan pemerintah kolonial yang berlawanan dengan tradisi dan kehendak keluarga bangsawan setempat; misalnya, mengangkat pejabat yang berasal dari keluarga bangsawan lain. Khusus situasi sosial yang melahirkan CDU dalam buku *Dipati Ukur* adalah bergejolaknya gerakan kedaerahan (1953-8) di Jawa Barat dan Indonesia yang menuntut lebih besar dan lebih luasnya peranan dan hak-hak daerah serta krisis kepemimpinan.

Peralihan pemegang kekuasaan dari VOC kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda, keluarnya undang-undang atau peraturan tentang pemerintahan (1809, 1854, 1871), dan makin merasuknya para pejabat kolo-

nial ke dalam urusan pemerintahan pribumi yang berakibat makin membatasi dan mengurangi hak dan kekuasaan penguasa pribumi itu mempengaruhi corak dan isi CDU. CDU pada tiap versi yang berasal dari sebelum tahun 1800 kwantitas ceritanya pendek, tanpa menonjolkan tokoh setempat, dan gambaran tokoh-tokohnya tidak kontras melainkan datar saja. Sedangkan CDU pada tiap versi yang disusun sesudah tahun 1800 kwantitas ceritanya panjang, menonjolkan gambaran dan peranan tokoh setempat, serta gambaran tokoh-tokohnya kontras.

Penonjolan tokoh-tokoh setempat itu tampaknya dimaksudkan untuk menyatakan eksistensi daerah setempat dan betapa tinggi derajat dan besar peranan leluhur keluarga bangsawan setempat berhubungan dengan kenyataan yang dialami tak mempunyai kekuasaan lagi, serta untuk menyatakan hak mereka atas kedudukan bupati di daerah mereka. Pernyataan tersebut ditujukan kepada pemerintah kolonial yang memegang kendali kekuasaan dan wewenang pengambilan keputusan, kepada keluarga bangsawan lain agar tidak mau menduduki kursi hak yang lain, dan kepada para anggota keluarga bangsawan mereka sendiri agar mengetahui dan merasa bangga atas keagungan leluhur mereka sendiri.

#### 4.5. Pengertian Sejarah

Pengarang buku *Dipati Ukur* secara sadar dan terus terang mengakui bahwa karangan tersebut tidak dapat dianggap sebagai sejarah asli (gedocumenteerd), melainkan sebagai **dongeng** atau cerita khayal (Rohendy Sumardinata & Supis, 1959: 3). Tetapi pengarang-pengarang CDU lainnya menyatakan secara langsung dan atau tidak langsung bahwa karangannya merupakan karya sejarah. Istilah yang digunakan untuk menamai karya mereka ada

beberapa macam, yaitu sejarah (sejarah), babad, sarsilah (silsilah), salasilah (silsilah), pancakaki (silsilah), carita (cerita), dan babad sajarah (babad sejarah). Tetapi ruang lingkup isinya dapat dikatakan sama, terdiri atas kisah dan silsilah. Di dalam **Sajarah Sukapura** (hal. 3), misalnya, dinyatakan secara tersurat bahwa karangan itu dinamai oleh pengarangnya **sajarah karuhun** (sejarah leluhur) dan **pancakaki** (silsilah) serta dinami oleh penyalinnya **Sajarah Sukapura** (Sejarah Sukapura). Isinya berupa kisah perkembangan Kabupaten Sukapura sejak didirikannya hingga masa ditulisnya karangan tersebut. Di dalamnya dituturkan secara kronologis tentang para bupati Sukapura, sejak bupati pertama hingga bupati yang memerintah pada saat karya itu disusun. Di dalam kisahnya itu diungkapkan peristiwa-peristiwa yang terjadi dan istri-istri serta putera-putera bupati yang bersangkutan. Meskipun istilah yang digunakan dalam menamai karangan-karangan itu berbeda-beda, tapi ruang lingkup isinya dapat dikatakan sama. Yang berbeda hanya kecenderungannya, ada yang lebih cenderung ke kisah dan ada yang lebih cenderung ke silsilah.

Ditinjau dari sudut sejarah, isi CDU itu ada yang bernilai sejarah dan ada yang tidak bernilai sejarah. Bahkan unsur-unsur legenda dan mitos terkandung pula di dalamnya. Dengan demikian makna sejarah menurut pengertian para penyusun CDU berbeda dengan pengertian sejarah ilmiah. Menurut mereka, sejarah itu tidak membedakan kenyataan yang sesungguhnya (data, fakta) dengan kenyataan ciptaan mereka sendiri. Kenyataan yang diciptakan oleh mereka adalah kenyataan menurut alam pikiran dan alam sosial budaya mereka. Dengan kata lain pengertian sejarah menurut mereka tidak begitu berbeda dengan Sastra.



## 5. Kesimpulan.

Dengan didasari oleh pengertian sejarah secara tradisional, para penyusun CDU – historiografi tradisional pada umumnya – tidak terikat oleh fakta-fakta sejarah dalam menyusun karangannya, melainkan bebas sesuai dengan alam pikiran dan alam sosial budaya mereka. Namun mereka tak terlepas dari pengaruh faktor-faktor tujuan penyusunan, identitas penyusun sendiri, situasi sosial yang melahirkan karangan itu, dan fungsi karangannya. Unsur-unsur tersebut saling menunjang dalam mempengaruhinya.

Sebagai penyusun tentu selalu berusaha agar pekerjaannya dapat memenuhi tujuan penyusunan dan hasilnya berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan penyusunan CDU, baik praktis (pedoman keluarga), didaktis (pedoman keluarga) ataupun politis, sesungguhnya sesuai dengan kepentingan penyusunnya, sebab ia adalah anggota keluarga bangsawan setempat atau mempunyai hubungan dekat dengan keluarga bangsawan setempat. Sebagai anggota keluarga atau petugas keluarga bangsawan setempat sudah tentu mempunyai keinginan untuk mengagungkan dan mempertinggi derajat keluarga bangsawan setempat, baik dengan cara menonjolkan jasa-jasa mereka dalam membina pemerintahan ataupun dalam menumpas pemberontakan. Guna mencapai sasaran itu sering digunakan bentuk karya sastra antara lain bentuk tembang.

Keperluan memiliki cerita dan silsilah yang mengagungkan pribadi dan menonjolkan peranan leluhur mereka didesak pula oleh situasi sosial waktu itu dalam rangka mempertahankan eksistensi dan kedudukan daerah mereka dan mereka sendiri serta memperjuangkan kedudukan mereka yang sewaktu-waktu terancam.

Peristiwa dan masalah Dipati Ukur menjadi bahan yang menarik bagi karangan model demikian, karena di dalamnya mengandung unsur-unsur kesetiaan, pemberontakan, pepe-

rangan, kekuasaan dan pemerintahan. Bahan yang satu itu diolah dengan memakai ramuan-ramuan tersebut di atas sehingga menjadi beberapa CDU yang beraneka macam.

Demikianlah, keseluruhan uraian di atas telah menjawab pertanyaan yang diajukan di muka dan kiranya bisa memahami terbentuknya CDU-CDU bercorak demikian.

Bandung, 15 Oktober 1981

EDI S. EKADJATI

---

## BIBLIOGRAFI

Balai Poestaka

1940 **Babad Tanah Jawi**, Batavia, X.

**Biantara-Biantara dina ngadegna Pangauban Sunda tanggal 22  
1952 Nopember 1952 di Bandung.**

Chijs, J.A. van der.

1880 **Babad Tanah Pasundan** (Geschiedenis van de Soendalanden); disundakeun ku Raden Karta Winata. Batavia, Landsdrukkerij).

Coen, Jan Pietersz.

1823 **Bescheiden omtrent zijn bedrijf in Indie**. Jil. ke-5  
1952 (1923) dan jil. ke VII-I (1952), 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff.

**Dagh-Register gehouden in't Casteel Batavia van't passerende  
1896, daer ter plaetse als over geheel Nederlandst Indie.  
1898, Anno 1624-1629 (1896), Anno 1631-1634 (1898),**

1899 Anno 1636 (1899), 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff.

Day, Clive.

1972 **The Policy and administration of the Dutch in Java**.  
Kuala Lumpur, Oxford University Press.

Deenik, A.C.

1929 **Babad Pasoendan djeung ringkesan Babad Hindia**;  
disoendakeun koe R. Satjadibrata djeung R. Soepjan  
Iskandar. Citakan kadoea, Groningen.

Djajadiningrat, Hoesein.

1913 **Critische Beschouwing van de Sadjarah Banten**. Disertasi, Haarlem.

Drewes, G.W.J.

1951 "Autobiografieën van Indonesiers". BKI, Jubileum Nummer (1851-1951) 107, 2<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> Aflevering, 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff.

Faille, P.de Roo de la.

1895 **Preanger Schetsen**. Batavia, G. Kolff & Co., niethandel.

Haan, F. De.

1910, **Priangan; de Preanger – Regentschappen onder het 1911, Nederlandsch bestuur tot 1811. deel ((1910), II(1911), 1912, III(1912), IV(1912a), Batavia. BGKW. 1912a**

Holle, K.F.

1869 "Bijdragen tot de Geschiedenis der Preanger-Regentschappen". TBG, XVII, hal. 316-67.

Jonge, J.K.J. De

1870 **De Opkomst van het Nederlandsch-gezag in Oost Indie; Over Java, verzameling uit het oud Koloniaal archief. V, Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage.**

Kartadinata, Mas.

1921 **Rasiah Priangan. Weltevreden, Balai Poestaka.**

Kartodirdjo, Sartono.

1966 **The Peasant's Revolt of Banten in 1888. VKI, 50, 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff.**

1968a "Segi-segi Strukturil Historiografi Indonesia". **Lembaran Sedjarah, 3, Jogjakarta, hal. 24-39.**

Klein, Jacob Wouter De.

1931 **Het Preanger Stelsel (1677-1871) En Zijn Nawerking. Disertasi, Delft, J. Waltman Jr.**

Leupe, P.A. "Verhael van de belegeringhe der stadt Batavia 1855 in't coninckrijck van Jaccatra, Anno 1628, den 22 Augustij". **BKI**, III, hal. 289-309.

1859 "Beschrijving der kaart, voorstellende De Belegering van de stad Batavia 1628". **BKI**, V, hal. 305-12.

Martanagara, R.A.A.

1923 **Babad Raden Adipati Aria Martanagara**, Bandoeng, Adrora.

Meerten, Henri Charles van.

1887 **Overzicht van de Hervorming van het Preanger-Stelsel**. Disertasi, Leiden, J.J. Groen.

Natanagara, Rd. Asikin.

1936-9 "Sadjarah Soemedang". **Volksalmenak Soenda**, Weltevreden, Balai Poestaka.

Oort & S. Muller, P. van.

1836 "Aanteekeningen gehouden op eene reize over een gedeelte van het Einland Java". **VBG**, XVI, hal. 83-156.

Raksakusumah & E.S. Ekadjati, H. Said.

1978 **Babad Sumedang**; transliterasi dan pendahuluan. Bandung, Lembaga Kebudayaan Universitas Padjadjaran.

Rees, O. van.

1880 "Overzigt van de Geschiedenis der Preanger Regentschappen". **VBG**, XXXIX, hal. 1-156.

Ricklefs, M.C.

1973 **Jogjakarta under Sultan Mangkubumi, 1749-1792; a history of the division of Java**. Disertasi, Cornell University, Southeast Asia Program.

Schrieke, B.

1955 "The Native Rulers". **Indonesian Sociological Studies**. Part one, The Hague-Bandung, W. van. Hoeve.

Sumardinata & Supis, Rohendy.

1959 **Dipati Ukur**, Bandung, Daja Sunda Pusat, 1959(I),  
1960 (1960(II)).

The, Liang Gie.

1967 **Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia**. Djakarta, Gunung Agung.

---

# PERANAN BENDA PURBAKALA DALAM HISTORIOGRAFI TRADISIONAL

Ayatrohaedi  
Universitas Indonesia

## 1. Benda Purbakala

Menurut Ordonansi Monumen (Lembaran Negara 1931 no. 238), yang disebut benda purbakala ialah (a) benda-benda bergerak maupun tak bergerak yang dibuat oleh tangan manusia, bagian atau kelompok benda-benda dan juga sisa-sisanya yang pokoknya berumur 50 tahun, atau memiliki masa langgam yang sedikit-dikitnya berumur 50 tahun dan dianggap mempunyai nilai penting bagi prasejarah, sejarah, atau kesenian; (b) benda-benda yang dianggap mempunyai nilai penting dipandang dari sudut paleoantropologi; dan (c) situs yang mempunyai petunjuk yang kuat dasarnya bahwa di dalamnya terdapat benda-benda yang dimaksud pada a dan b (Uka ndrasasmita dkk. 1978:1).

Candrasasmita dkk. 1978:1).

Penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang disebut benda purbakala itu, dituangkan dalam Petunjuk Pelaksanaan tentang Pengamanan dan penyelamatan Benda-benda Purbakala (No. Juklak/Lit/01/IV/1973), yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia tanggal 23 April 1973. Di dalam petunjuk itu dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan benda-benda purbakala peninggalan sejarah tanah air itu terdiri dari (a) benda-benda hasil karya manusia, berupa (aa) alat-alat keperluan hidup manusia, (ab) piagam-piagam, (ac) bangunan-bangunan, (ad) arca-arca/patung-patung (ae) mata uang; dan (af) benda-benda keramik; (b) tanah lapang, kebun, sawah, ladang, yang di dalam atau di atasnya terdapat petunjuk yang

nyata terdapat benda-benda pada (a); dan (c) benda yang dipandang mempunyai nilai yang sangat tinggi dari sudut paleo-antropologi: (kys.: 45 - 6).

Dari kedua peraturan itu nampak dengan jelas bahwa benda-benda yang dimaksudkan itu mempunyai nilai penting bagi sejarah. Seberapa jauh sejarah memanfaatkan benda-benda tersebut, tergantung kepada beberapa faktor yang saling mengait.

Tujuan pengungkapan, latar belakang sosial, asal-usul, dan pendidikan si sejarawan, misalnya, turut menentukan apakah sesuatu benda yang secara umum "mempunyai nilai penting" itu termanfaatkan atau tidak.

## 2. Historiografi Tradisional

Historiografi di Indonesia sebenarnya sudah tua usianya. Naskah-naskah Arjuna Wiwaha, Ghatotkacasraya, Nagarakertagama, Pararaton, Babad Tanah Jawi, Cerita Parahyangan, Cerita Ratu Pakuan, Babad Cirebon, Silsilah Raja-raja Pasai, Hikayat Hang Tuah, Sejarah Malayu, dan sederetan naskah lainnya merupakan sebagian kecil bukti adanya kesadaran bangsa Indonesia bersejarah itu. Jika kemudian ternyata, naskah-naskah sejarah itu sering merupakan "rimba" karena banyaknya sisipan yang kurang tautannya dengan kenyataan sejarah, hal itu justru memberikan ciri mandiri akan cara orang Indonesia menuliskan sejarah bangsanya. Dongeng, mitos, legenda, dan fabel, misalnya, sering kali tumbuh subur sehingga diperlukan keahlian khusus untuk dapat menyianginya. Setelah segala macam sisipan itu tersingkirkan, tinggallah sarinya, berupa berita-berita kesejarahan yang sangat penting itu.

Naskah-naskah itu memang tidak sepenuhnya merupakan naskah sejarah, apalagi jika kita menganggapnya dalam artian modern sekarang. Namun demikian, ada maksud tertentu para



penulisnya, terutama jika mereka termasuk kelompok "pujangga istana". Tujuan utama mereka menulis karyanya itu ialah untuk menyanjung raja, dan untuk keperluan itu maka tidak jarang mereka terpaksa mengesampingkan kenyataan obyektif sejarah itu sendiri. Kenyataan itu bagi mereka tidak sepenting kenyataan yang berkisar sekitar sang raja yang disanjungnya (Berg 1865 : 90).

### **3. Peranan Benda Purbakala dalam Historiografi Tradisional**

Walaupun diakui bahwa benda purbakala mempunyai nilai yang sangat penting bagi sejarah, tetapi tidak dengan sendirinya benda tersebut juga berperanan penting di dalam historiografi.

Benda purbakala sebagai sumber sejarah, tidak diragukan lagi manfaatnya bagi sejarah sebagai peristiwa. Peristiwa-peristiwa sejarah antara lain ditandai oleh adanya benda-benda sejarah, termasuk ke dalamnya benda purbakala.

Tetapi kita ketahui bahwa sejarah tidak hanya berupa peristiwa. Sejarah juga dapat berupa kisah atau ilmu (Nugroho Notosusanto 1964 : 55). Dalam kisah sejarah, dengan sendirinya tidak semua peristiwa sejarah diterima demikian saja. Peristiwa-peristiwa itu, melalui pelbagai kadar yang berbeda, disaring sehingga sebenarnya ke dalam kisah itu hanya yang penting-penting saja yang dibicarakan. Sebagai contoh, dalam kita membicarakan Airlangga, misalnya, pernahkah kita menyinggung bagaimana caranya Airlangga tidur atau mandi? Tidak pernah, walaupun kita tahu pasti bahwa kedua hal itu berulang kali dilakukan oleh Airlangga atau tokoh sejarah mana pun. Dengan demikian, benda purbakala yang pada dasarnya merupakan sumber sejarah pun, tidak dengan sendirinya diterima kehadirannya di dalam historiografi. Apalagi jika diingat pula turut berperannya faktor subyektivitas sejarawan di dalam memilih dan menapis bahan-bahan yang

akan disajikannya di dalam karyanya. Sebagai contoh, Prapanca yang dengan cermat mencatat peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan Hayam Wuruk (terutama dalam kunjungan sang raja ke daerah ujung timur Jawa), ternyata "terlupa" mencatat peristiwa Babat yang terjadi pada tahun 1357 M. Padahal, peristiwa itu sekurang-kurangnya dicatat dalam 4 sumber atau naskah historiografi yang lain, yaitu **Pararaton, Carita Parahyangan, Kidung Sunda, dan Pustaka Raja Warnana i Bhumi Nusantara**. Hanya kalau kita mafhum bahwa ketika menulis **Nagarakertagama** itu Prapanca sedang dalam pengasingan, dan sedang berusaha memulihkan nama baiknya (setidak-tidaknya agar dipercaya lagi oleh raja), kita akan dapat mengerti tindakan Prapanca itu. Benar-benar sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Berg, dan memenuhi persyaratan subyektivitas yang dikemukakan Nugroho. Sebagian masyarakat kita mengenal kisah-kisah atau dongeng-dongeng **Sangkuriang, Bandung Bondowoso, Si Pahit Lidah,** dan lain-lain.

Dongeng-dongeng itu didasarkan kepada adanya sejumlah benda alam yang dianggap sebagai kenyataan di masa lampau. Para ahli kemudian berusaha menerang-jelaskan hubungan dongeng itu dengan kenyataan sejarah. Maka sejumlah dugaan pun muncul: Sangkuriang berhubungan dengan pemukiman di sekitar Danau Bandung, Bandung Bondowoso ada kaitannya dengan gugus candi Prambanan, dan sebagainya.

Dari contoh itu dapatlah barangkali untuk sementara disimpulkan bagaimana kaitan antara benda dan purbakala dan historiografi tradisional. Benda purbakala tidak dapat langsung berperan di dalam historiografi itu, melainkan melalui perantara. Sekurang-kurangnya ada tiga perantara yang berperan, yaitu (a) cerita rakyat/sastra lisan, (b) naskah (filologi), dan (c) prasasti (epigrafi).

(a) Cerita Rakyat/Sastra Lisan

Cerita rakyat atau sastra lisan berhubungan dengan benda-benda, baik yang merupakan karya manusia maupun benda alam. Kisah tentang Putri Lorojonggrang, misalnya, adalah contoh yang berkenaan dengan benda karya manusia, sedangkan dongeng Sangkuriang merupakan contoh yang kedua (benda alam).

Cerita-cerita itu sangat erat hubungannya dengan lingkungannya, baik lingkungan masyarakatnya maupun lingkungan alamnya. Masyarakat menganggap cerita itu tidak sekedar cerita untuk didengarkan saja, akan tetapi semua cerita itu dapat dipercaya kebenarannya, dan mempengaruhi tingkah laku mereka (Yus Rusyana dan Ami Raksanagara 1978 : 12). Dalam hubungannya dengan alam, cerita-cerita itu seolah-olah diberi bukti nyata oleh adanya gunung, tempat, tumbuhan, dan benda-benda yang ada di sekitar tempat peristiwa yang dikisahkan itu. Hampir setiap cerita "terjadi" di tempat-tempat yang sampai sekarang masih ada sehingga terasa cerita itu lebih erat hubungannya dengan masyarakatnya (kys.: 13).

(b) Naskah (Filologi)

Dalam hubungannya dengan benda (baik alam maupun karya manusia), naskah sebenarnya merupakan semacam "pencatatan" sastra lisan yang sudah beredar sebelumnya. Cerita-cerita wayang, seperti Arjuna Wiwaha dan Ghatotkacasraya, tentulah sudah dikenal sebelum Airlangga dan Jayabhaya menugasi Mpu Kanwa dan Mpu Panuluh menuliskannya pada lontar.

Pada dasarnya naskah ini mungkin berasal dari tiga lingkungan yang berbeda, walaupun tetap saling berhubungan. Ketiga lingkungan itu akan memberi warna mandiri kepada naskah yang berasal dari lingkungan masing-masing.

Naskah-naskah yang berasal dari lingkungan istana, misalnya, tentulah pada dasarnya akan menyanjung raja, dan karenanya segala hal yang mungkin merupakan "titik-titik hitam" dalam kehidupan sang raja atau yang disanjungnya, dengan sadar akan "dilupakan", sebagaimana yang diperlihatkan oleh Nagarakertagama.

Naskah-naskah yang berasal dari lingkungan mandala, isinya terutama berhubungan dengan ajaran keagamaan, dan karenanya tidak terlalu diharapkan ada naskah yang menjadikan sesuatu benda sebagai titik tolak olahannya.

Naskah yang ketiga berasal dari kalangan luar istana dan mandala, yaitu berasal dari kampung dan rakyat biasa. Naskah-naskah jenis inilah yang sayangnya tidak terlalu banyak, yang merasa tidak punya ikatan untuk "menabukan" sesuatu. Naskah-naskah ketiga ini, tidak mustahil menyinggung "titik-titik hitam" seorang raja, atau menganggap enteng ajaran agama. Hal-hal yang berkenaan dengan lingkungan hidup dan kepercayaan mereka, akan banyak mewarnai naskah-naskah kelompok ini. Naskah **Cerita Parahyangan**, misalnya, walaupun isinya tentang para raja yang pernah berkuasa di Sunda, jelas sekali ditulis oleh rakyat biasa. Di dalamnya dikisahkan antara lain Rahyang Mandiminyak "meminjam" Pwah Rababu, istri Rahyang Sempakwaja, abangnya sendiri. Hal demikian tidak diharapkan dikisahkan dalam naskah istana, karena Rahyang Mandiminyak adalah seorang raja.

(c) Prasasti (Epigrafi)

Prasasti, dari satu segi, sama kedudukannya dengan naskah yang berasal dari kalangan istana. Hingga saat ini belum pernah ditemukan satu pun prasasti yang mengisahkan "titik-titik hitam" raja yang menyuruh buatnya. Prasasti Gunung Butak dari Wijaya pun, walau benar pada mulanya mengisahkan bagaimana Wijaya sengsara, tetapi jelas dibuat setelah

Wijaya berjaya, dan prasasti itu memperlihatkan utang budi-nya kepada penduduk yang menolongnya. Juga prasasti Air-angga (batu kalkuta) yang mengisahkan pengalamannya "menghutan" bernama Narottama.

Oleh karena itu, pengetahuan yang kita peroleh dari pra-sasti, dari segi politik, hanya bersifat sepihak saja. Kita belum pernah tahu bagaimana nasib raja yang kalah perang, atau ke-angkatan seorang raja. Seolah-olah semua raja kita di masa silam, kalau perang selalu menang, dan mereka selalu bertin-dak bijaksana!.

Prasasti pada umumnya berhubungan dengan *sima*, dan *sima* hampir selalu berhubungan dengan bangunan (*suci*). Jadi, sebenarnya prasasti merupakan sumber *embaran* (= in-formasi) yang pertama mengenai bangunan sebagai benda kar-ya manusia. Sayang sekali, tidak terlalu mudah menyesuaikan bangunan yang disebutkan di dalam prasasti dengan bangunan dalam kenyataan. Hal ini antara lain disebabkan sering bacaan yang dilakukan mengandung kesalahan, dan tentu saja kesalah-an itu akan mengakibatkan pengambilan kesimpulan atau ke-mungkinan yang salah pula. Gugus Candi Prambanan, misalnya yang semula dianggap berasal dari abad ke-10, dan dikaitkan dengan raja Daksa (N.J. Krom 1931 : 171), berkat de Casparis menjadi "lebih tua" setengah abad (1956 : 280-330).

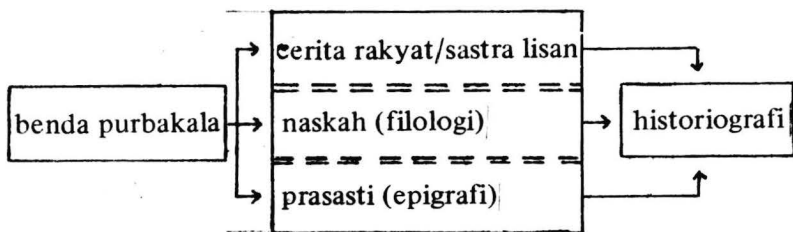
Kecuali salah baca, kesukaran penyesuaian itu juga dise-babkan oleh keadaan prasasti itu sendiri. Prasasti yang berhu-bungan dengan candi A, misalnya, karena hanya dipahatkan pada lempengan tembaga yang mudah dibawa-bawa, kemung-kinan ditemukan di daerah Y yang sama sekali tidak ada hu-bungannya dengan A.

Hal itu menyebabkan usaha penyesuaian itu, walaupun mungkin akhirnya berhasil, memerlukan waktu lama. Bahkan, prasasti batu yang jelas terdapat di samping sebuah candi pun, seperti prasasti Sanghyang Wintang, belum lagi jelas hubungan-

nya dengan candi mana. Masalahnya, di Gandasuli, tempat candi dan prasasti itu ditemukan, terdapat tidak hanya sebuah candi saja. Dengan candi yang mana (sekarang) bangunan Sanghyang Wintang itu harus dihubungkan? Itu hanya sekedar contoh. Masih banyak contoh lain yang sama membingungkan. Semuanya itu memerlukan penanganan yang lebih terarah dan terencana.

Satu hal yang jelas ialah, prasasti dengan demikian menjadi perantara antara benda dan kisah sejarah. Melalui embaran dalam prasasti itulah kisah sejarah dapat disusun.

Dengan demikian jelaslah kiranya bahwa peranan benda dalam historiografi, walaupun besar, tetapi tidak dapat langsung. Benda memerlukan perantara, berupa cerita rakyat, naskah, dan prasasti. Jika digambarkan, hubungan itu kira-kira demikian:



## **Kepustakaan**

Berg, C.C.

1965 "The Javanese Picture of the Past", dalam Sujatmoko dkk. (penyunting), **An Introduction to Indonesian Historiography**: 87-118.

Casparis, J.G. de

1965 "Selected Inscription from the Seventh to the Ninth Century A.D.", **Prasasti Indonesia 2** : 280-330. Bandung: A.C. Nix-Masa Baru.

Krom, N.J.

1931 **Hindoe Javaansche Geschiedenis**, cetakan kedua. 's-Gravenhage: M. Nijhoff.

Nugroho Notosusanto

1964 "Teori Sejarah: Peranannya dalam Rangka Studi Sejarah", **MISI 2. 1.** : 53-82.

Sujatmoko dkk. (penyunting)

1965 **An Introduction to Indonesian Historiography**, Ithaca: Cornell University Press.

Uka Candrasasmita dkk. (penyusun).

1978 **Himpunan Peraturan-peraturan Perlindungan Cagar Budaya Nasional**. Jakarta: Proyek Pembinaan dan Pemeliharaan Peninggalan Purbakala.

Yus Rusyana dan Ami Raksanagara

1978 **Sastra Lisan Sunda: Ceritera Kahurun, Kajajaden, dan Dedemit** Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.--

## **KEBUDAYAAN SETEMPAT DAN HISTORIOGRAFI TRADISIONAL**

Oleh: Sri Wulan Rujati Mulyadi

Banyak bahan yang dapat dipakai untuk penulisan sejarah kita. Khusus untuk penulisan sejarah atau historiografi tradisional di dalam Seminar Sejarah Nasional I yang diselenggarakan di Yogyakarta, Sutjipto Wirjosuparto memberikan sebutan "berita Indonesia asli". Yang digolongkannya dalam kelompok ini ialah:

- a. kitab-kitab yang bersifat sejarah, seperti babad, tambo, dan silsilah;
- b. kesusastraan, yang secara langsung atau tidak langsung memuat sumber-sumber sejarah; dan
- c. dongeng-dongeng atau cerita setempat yang masih dikenal rakyat.

Dalam membicarakan historiografi Bugis, Noorduyn memasukkan juga kronik (gambaran sejarah yang disusun sambung-menyambung dan menurut tarikh), perjanjian-perjanjian, dan episode-episode ke dalam kitab-kitab yang bersifat sejarah.

Sampai berapa jauh sebenarnya data kita mengenai bahan-bahan yang dapat kita pakai untuk historiografi tradisional? Berapa banyak sebenarnya catatan kita mengenai apa yang dinamakan Sutjipto Wirjosuparto "kitab-kitab yang berisi sejarah", hasil-hasil "kesusastraan", "dongeng-dongeng" atau "cerita setempat" yang dapat kita golongkan dan yang dapat kita gali sebagai sumber sejarah tradisional? Sepanjang pengetahuan saya, pada saat ini banyak catatan tersebar mengenai kekayaan kita akan bahan historiografi tradisional yang dibuat oleh berbagai kantor, baik di pusat maupun di



daerah. Walaupun demikian, pasti masih banyak pula bahan yang belum terdaftar di mana-mana, karena masih menjadi milik perorangan, yang belum pernah terjangkau oleh pihak-pihak yang bukan kerabat pemilikinya.

Walaupun kita ketahui bahwa banyak bahan historiografi tradisional tersebar di luar negeri, untuk sementara kita pusatkan perhatian kita pertama-tama kepada bahan yang masih bermukim di tanah air kita. Cukup banyak masih bahan di dalam negeri yang belum terjamah oleh para peneliti kita.

Saya sempitkan lagi perhatian kita terlebih dahulu kepada perbendaharaan naskah Melayu kita yang tersimpan di Museum Nasional. Naskah atau manuskrip yang ada kaitannya dengan kesejarahan, kira-kira hanyalah meliputi 6% dari seluruh perbendaharaan manuskrip yang berjumlah 953 buah. Tidak banyak, tetapi dari "yang tidak banyak" ini barulah beberapa saja yang sudah digarap; lebih sedikit lagi jumlah yang sudah dibicarakan maupun yang telah diterbitkan secara keseluruhan. Padahal kalau kita lihat, banyak judul yang menarik, antara lain Asal Raja-Raja Sambas, Asal Raja-Raja Palembang, Asal Jagat Pasemah, Asal-usul Tuan Gadang Batipu, Babad Tanah Madura, Hikayat Raja Priangan kawin ke Negeri Aceh, Silsilah Kutai, Sketsa-sketsa Perang Jawa, dan Surat Cerita Gubernemen Wolanda Perang Negeri Aceh.

Kita lihat sekarang ke dunia naskah Sunda sejenak. Seperti yang tersebut dalam "Naskah Sunda Lama: Pendataan dan Analisis Pendahuluan", di Museum Nasional terhimpun 250 buah naskah. Dari jumlah itu Ekadjati dan kawan-kawan telah meneliti 108 buah. Dalam sampel yang berjumlah 121 buah yang diambilnya dari Museum Nasional Jakarta, Museum Sumedang, Museum Kuningan, dan perorangan, hanyalah 21 buah — jadi  $\pm 15\%$  — yang digolongkannya ke dalam "sejarah" dan "sastra sejarah", yang lebih jauh dijelaskannya

sebagai yang "bersifat fiksional dengan bahan-bahan yang diambil dari peristiwa-peristiwa dan tokoh-tokoh yang faktual di masa lampau". Dalam hasil penelitian lain yang dituangkan dalam "Naskah Sunda Lama: Kelompok Cerita", Ekadjati dan kawan-kawan memasukkan naskah yang berjudul sejarah, seperti "Sejarah Cikundul" ke dalam kelompok cerita. Alasan yang dikemukakan ialah karena naskah ini tidak dapat digolongkannya secara mutlak sebagai naskah sejarah yang disebabkan oleh kuatnya unsur cerita yang ditemukan di dalamnya.

Contoh lain saya ambil dari perbendaharaan naskah Maluku milik Museum Nasional. Dari 354 buah yang didaftarkan oleh Jumsari Jusuf dan kawan-kawan, hanya 9 yang termasuk kelompok "sejarah dan ceritera rakyat", jadi hanya  $\pm 3\%$  dari seluruh perbendaharaan naskah Maluku.

Dari tiga contoh kelompok naskah—Melayu, Sunda, Maluku— itu, tampaklah bahwa jumlah naskah yang dapat dikelompokkan ke dalam historiografi tradisional tidaklah banyak. Untuk mendapat gambaran secara menyeluruh mengenai naskah-naskah kesejarahan ini sebaiknya dapat mulai dipikirkan langkah-langkah untuk mengadakan semacam jaringan informasi di Indonesia terlebih dahulu. Jaringan informasi dengan dunia luar tentulah harus kita lakukan nanti, tetapi itu biarlah kita masukkan sebagai program jangka panjang saja dulu.

Seperti yang telah saya sebut tadi, dewasa ini banyak sekali badan — baik swasta maupun pemerintah, baik di pusat maupun di daerah — yang menangani masalah naskah. Ada yang mengumpulkan dan yang menyimpan; ada yang mengusahakan untuk memiliki dan mengadakan tukar-menukar serta menerima hadiah mikrofilm, mikrofis, atau fotokopi; ada yang membuat daftar saja dari naskah-naskah milik perorangan yang ada di daerah kawasannya atau yang tersimpan di suatu tempat

tertentu. Segala macam usaha ini tentulah terpuji dan mengembirakan, apalagi karena kegiatan yang dilaksanakan oleh bermacam-macam badan itu semuanya bertujuan luhur, yaitu penyelamatan dan pelestarian suatu segi budaya bangsa kita. Walaupun demikian, sudah tiba waktunya sekarang untuk memikirkan usaha-usaha koordinasi segala upaya luhur itu. Khusus untuk menghimpun data kita tentang historiografi tradisional untuk penggarapan selanjutnya, usaha koordinasi ini sangat perlu.

Data yang sebanyak mungkin haruslah dapat diambil dari segala macam bentuk historiografi tradisional ini bagi kepentingan penyusunan Sejarah Nasional Indonesia. Sesudah kita ketahui di mana saja data itu terhimpun, kita dapat menggarapnya untuk kemudian dipilih lagi mana yang relevan untuk penulisan sejarah kita. Siapa tahu, rumpang-rumpang sejarah di masa silam dapat dicari jawabannya di dalam naskah-naskah yang belum sempat tergarap sampai masa kini. Dari bahan-bahan kesejarahan yang diangkat sebagai bahan disertasi dan tesis oleh putra-putra Indonesia antara lain ialah **Sedjarah Banten** (Djajadiningrat), **Hikajat Atjeh** (Iskandar), **Hikayat Tanah Hitu** (Manusama), **Hikayat Suhunan Gunung Jati** (Sarwono), **Ceritera, Dipati Ukur** (Ekadjati), dan **Sajarah Sukapura** (Hermansoemantri). Lain daripada itu, haruslah diakui bahwa naskah-naskah kesejarahan banyak yang sudah digarap oleh orang luar negeri, baik untuk disertasi maupun untuk karangan. Beberapa disertasi yang bersumberkan historiografi tradisional ialah umpamanya **Babad Buleleng**, **De Kroniek van Bandjarmasin**, **De Kroniek van Koetai**, **Een Achttiende-Eeuwse Kroniek van Wadjo'**, **Hikayat Bandjar**, **Hikajat Hasanoeddin**, **Sja'ir Kompeni Welanda Berperang dengan Tjina**, dan **Sja'ir Perang Mengkasar**.

Di samping judul-judul yang nyata-nyata memberi rona kesejarahan ini, tidak mungkin diabaikan kehadiran karya-

karya tertentu dalam khazanah naskah kita yang secara sekilas tidak membayangkan adanya data kesejarahan, seperti Bustan as-Salatin, Hikayat Merong Mahawangsa, dan Tuhfat an-Nafis.

Sutjipto Wirjosuparto menyebutkan "dongeng-dongeng" atau "cerita setempat" sebagai salah satu kemungkinan untuk menggali bahan kesejarahan kita. Seperti yang kita ketahui, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan, Departemen P dan K telah mengumpulkan berpuluh-puluh, bahkan mungkin beratus-ratus cerita rakyat dari berbagai daerah, baik yang diterbitkan sendiri maupun yang diterbitkan oleh Proyek Penerbitan Buku Bacaan dan Sastra Indonesia dan Daerah, maupun oleh Proyek Pengembangan Media Kebudayaan. Cerita-cerita rakyat yang telah diterbitkannya berasal dari daerah-daerah Aceh, Bali, Jambi, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sumatra Selatan, dan Sumatra Utara. Dari cerita-cerita yang terhimpun di dalam buku-buku ini, sukarlah dapat dilihat secara sekilas cerita-cerita mana yang dapat dipakai sebagai "bahan galian" sejarah kita, paling tidak yang mana yang ada rona kesejarahannya.

Kita tahu bahwa dapat saja cerita-cerita rakyat itu dikaitkan dengan nama-nama tokoh sejarah tertentu. Hanya dengan perbandingan mendalam antara tokoh(-tokoh) tertentu dalam cerita-cerita rakyat dan kedudukannya dalam arena sejarah Indonesia, kita dapat menentukan dapat tidaknya cerita rakyat yang bersangkutan kita pakai sebagai bahan kesejarahan.

a Dalam upaya saya untuk menelusuri daerah penyebaran motif "bidadari-bidadari mandi" di seluruh Indonesia (untuk sementara dapat dicatat bahwa motif ini tersebar di berbagai daerah dan suku di berbagai daerah dan suku di Sumatra: Aceh, daerah Batak, Bengkulu, Mentawai, Minangkabau, Sumatra Utara, Pasemah, dan Simalur; di seluruh daerah Jawa, Madura, dan Bali; di Kalimantan bagian Tengah, Berau, dan

Bulungan; di Sulawesi dan sekitarnya: Bantik, Gorontalo, Halmahera, Sangit, Sausu, Ternate, Tobelo, Toraja, dan Mandar; di Irian Barat: Nufor dan Baliem, serta di kepulauan Kei) hanyalah cerita "Asal Mulanya Kesultanan Ternate" dan suatu episode kecil dalam Babad Tanah Jawi, tokoh cerita disebut-sebut dalam hubungan dengan peristiwa atau tokoh bersejarah.

Tanpa mengurangi nilai cerita rakyat sebagai pancaran budaya setempat, harus diakui bahwa kadar sejarah atau rona sejarah yang terdapat di dalam cerita-cerita rakyat, kalau ada, sangatlah tipis. Sedangkan membaca karya-karya kesejarahan seperti Peringatan Sejarah Negeri Johor, Sajarah Sukapura, Sejarah Melayu, Sejarah Raja-Raja Riau, Sejarah Tambusai, Syair Perang Aceh, dan Syair Perang Palembang, kita masih harus cukup bermata jeli untuk melihat dengan nyata kadar fiksi dan sejarahnya, kadar *Dichtung und Wahrheit* yang terkandung di dalamnya. Sikap yang sama juga seyogyanya kita ambil di dalam menelaah naskah-naskah yang berjudul "babad", "tambo", "kidung", "silsilah", dan "asal-usul".

Dalam mengerjakan naskah-naskah kesejarahan dalam bahasa Melayu maupun yang terdapat di dalam bahasa-bahasa daerah secara cepat agar dapat dimanfaatkan selekas mungkin bagi kepentingan sejarah, agaknya dapat dipikirkan untuk mengambil langkah-langkah tertentu. Suatu cara yang ingin saya usulkan ialah bahwa dalam pemanfaatan bahan kesejarahan yang terdapat di dalam naskah-naskah Melayu maupun naskah-naskah daerah, perlu diadakan kerja sama yang erat antara para sejarawan dengan pihak-pihak yang biasa menangani atau yang menggarap naskah. Sebagai contoh yang dapat saya sebutkan di sini umpamanya ialah terbitan *Hikayat Patani* (*The Story of Patani*) yang dikerjakan bersama oleh A. Teeuw sebagai filolog dan David K. Wyatt sebagai sejarawan. Tentulah ini tidak menutup kemungkinan untuk meninjau suatu karya

dari dua sudut pandangan, seperti yang telah dilakukan oleh Ekdajati dalam menelaah Babad Cirebon.

Akhirulkata, beberapa kesimpulan dan usul berkenaan dengan pemanfaatan dan penggunaan yang sedini mungkin mengenai sumber-sumber sejarah tradisional dalam rangka penulisan sejarah nasional kita ialah:

1. Sebagai program jangka pendek, perlu diciptakan suatu jaringan informasi antar lembaga di Indonesia untuk mendapatkan gambaran dan data secara jelas dan menyeluruh mengenai dunia historiografi tradisional dan naskah-naskah kesejarahan lainnya.
2. Sebagai program jangka panjang jaringan informasi ini dapat diperluas sampai ke bahan-bahan historiografi tradisional dan naskah-naskah kesejarahan lainnya yang tersimpan di luar negeri.
3. Cerita-cerita rakyat sebagai pancaran budaya setempat tetap harus dipakai sebagai bahan konsultasi, kalau-kalau memberikan data kesejarahan.
4. Perlu dipikirkan kerja sama yang seerat-eratnya di antara para sejarawan dan mereka yang biasa berkecimpung dalam dunia naskah dalam penelaahan naskah-naskah kesejarahan.

## Daftar Pustaka

- Atja (1967)  
"Sjair Perang Palembang" Djakarta, Museum Pusat.
- Blok, E. (1885)  
"Sjair Perang Atjeh." TBG 30: 558 - 95.
- Cense, A.A. (1928)  
**De Kroniek van Bandjarmasin.** Santpoort.  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1977)  
**Ceritera Rakyat Irian Jaya.** Dinas P dan K, Propinsi Irian Jaya.
- Djajadiningrat, Hoesein  
**Critische Beschouwing van de Sedjarah Banten.** Haarlem,  
Joh. Enachede eu Zonen.
- Edel, J. (1938)  
**Hikajat Hasanoeddin.** Meppel.
- Ekadjati, E. Suhardi (1978)  
"Babad Cirebon: Tinjauan Sejarah." **Bunga Rampai Ilmu Sastra** 3: 182-207.
- Hermansoemantri, Emuch (1979)  
"Sajarah Sukapura: Sebuah Telaah Filologis." Jakarta,  
Universitas Indonesia (disertasi).
- Iskandar, T. 1959).  
"De Hikajat Atjeh." VKI 26.
- Kartodirdjo, Sartono (1957)  
"Babakan-Djaman Sedjarah Indonesia" dalam Abdurrachman Surjomuhardjo (ed., 1976): 28-32.
- Kratz, Ernst Ulrich (1973)  
**Pernyataan Sejarah Negeri Johor.** Wiesbaden, Otto Harrassowits.
- Manusama, Zacharias Josef (1977)  
"Hikayat Tanah Hitu." Disertasi Leiden.

Mees, C.A. (1935)

**De Kroniek van Koetai.** Santpoort, C.A. Mees.

Noorduyn, J. (1955)

**Een Achttiende-Eeuwse Kroniek van Wadjo' Buginese Historiografi.**'s-Gravenhage, De Nederlandse Boek- en Steendrukkerij.

Olthof, W.L. (ed., 1941)

**Babad Tanah Djawi.** 's-Gravenhage, M. Mijhoff.

Ossenbruggen, F.D.E. van (1912) **De Verspreide Geschriften van Prof. Dr. C.A. Wilken III.** Semarang, C.C.T. van Dorp:

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Nasional (1972) **Katalogus Koleksi Naskah Melayu Museum Pusat Dep. P dan K.** Jakarta, Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1978/1979) "Sastra Lisan Mandar."

--- (1979/1980)

"Naskah Sunda Lama: Pendataan dan Analisa Pendahuluan." (Ekadjati dkk.)

--- (1981)

"Naskah Sunda Lama: Kelompok Cerita." (Ekadjati dkk.)

Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1876/1977) **Ceritera Rakyat Daerah Sulawesi Selatan.**

Proyek Pengembangan Museum Nasional Jakarta, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1980) **Katalog Koleksi Naskah Maluku.** (Jumsari Jusuf dkk.)



- Pusposaputro, Modest Sarwono (1976)  
 "Hikayat Suhunan Gunung Jati." Tesis M. Phil. di SOAS,  
 London.
- Putri Minerva Mutiara (1979)  
 "Sejarah Tambusai." Skripsi Sarjana FSUI, Jakarta.
- Ras, J.J. (1968)  
**Hikajat Bandjar.** 's-Gravenhage, De Nederlandsche Boek-  
 en Steendrukkerij.
- Ronkel, Ph. S. van (1904)  
 "Catalogus der Maleische Handschriften." VBG 57.
- Rujiati Mulyadi, S.W. (1976)  
 "Sejarah Raja-Raja Riau: Some Aspects, as told by the  
 Jakarta Manuscripts" dalam Sartono Kartodirdjo (ed.,  
 1976) : 27-38.
- (1981)  
 "The Bathing Beauties in Indonesian Stories: A Prelimi-  
 nary Research." Makalah pada Asanal Conference on  
 Asian Languages, Denpasar, 7-12 September 1981.
- Rusconi, J. (1935)  
**Sja'ir Kompeni Welanda Berperang dengan Tjina.** Wage-  
 ningen.
- Skinner, C. (1963)  
 "Sja'ir Perang Mengkasar." VKI 40.
- Surjomihardjo, Abdurrachman (ed., 1976)  
**Seminar Sejarah Nasional Pertama: 14 Desember 1957,**  
**Yogyakarta.** Jakarta, PDIN-LIPI.
- Teeuw, A. dan Situmorang (1952)  
**Sedjarah Melaju.** Djakarta, Djambatan.
- , A. dan K.K. Wyatt (1970)  
**Hikayat Patani dan The Story of Patani.** Bibliotheca  
 Indonesica 5. The Hague, Martinus Nijhoff.

Wirjosuparto, Sutjipto (1957)

"Pemeliharaan dan Penggunaan Bahan-Bahan Sedjarah dalam Abdurrachman Surjomihardjo (ed., 1976): 134-139 dan 169-174.

Worsley, P.J. (1972)

**Babad Buleleng.** Bibliotheca Indonesica 8. The Hague, Martinus Nijhoff.

### **Tambahan**

Ekadjati, E. Suhardi (1979)

"Ceritera Dipati Ukur: Suatu Karya Sastra Sejarah Sunda." Jakarta, Universitas Indonesia (disertasi).

— (1980-1981)

"Babad Cirebon: Tinjauan Sastra." *Majalah Ilmu-ilmu Sastra Indonesia IX/1*: 1-32.

Kartodirdjo, Sartono (ed., 1976)

**Profils of Malay Culture: Historiography, Religion and Politics.** Ministry of Education and Culture.

### **Tambahan**

Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1976/1977)

**Ceritera Rakyat Daerah Sumatera Utara.**

— (1977/1978)

**Ceritera Rakyat Daerah Sumatera Barat.**

— (1978)

**Ceritera Rakyat Daerah Bali.**

— (1978)

**Ceritera Rakyat Daerah Jawa Tengah.**

— (1978)

**Ceritera Rakyat Daerah Jawa Timur.**

- (1978)  
Ceritera Rakyat Daerah Kalimantan Timur.
  - (1978)  
Ceritera Rakyat Daerah Maluku.
  - (1978)  
Ceritera Rakyat Daerah Sumatera Barat.
  - (1978)  
Ceritera Rakyat Daerah Sumatera Utara.
  - (1978/1979)  
Ceritera Rakyat Daerah Istimewa Aceh.
  - (1978/1979)  
Ceritera Rakyat Daerah Jambi.
  - (1978/1979)  
Ceritera Rakyat Daerah Kalimantan Tengah.
  - (1978/1979)  
Ceritera Rakyat Daerah Sulawesi Tengah.
  - (1978/1979)  
Ceritera Rakyat Daerah Sumatera Selatan.
  - (1980/1981)  
"Ceritera Rakyat Daerah Bengkulu."
  - (1980/1981)  
"Ceritera Rakyat Daerah Kalimantan Timur. (Mite dan Lagende)."
  - (1978/1979)  
Ceritera Rakyat Daerah Nusa Tenggara Barat.—
-

## SASTRA DAN HISTORIOGRAFI TRADISIONAL

Oleh : Sulastin Sutrisno

Fakultas Sastra dan Kebudayaan U.G.M.

### SASTRA

Tiap masyarakat, tiap kebudayaan t i d a k h a n y a mengenai bahasa, tetapi dalam salah satu bentuk juga sastra. Ciri sastra yang paling khas adalah sifat rekaannya yang sangat erat berhubungan dengan yang disebut Roman Jakobson **fungsi puitis atau fungsi sastra**, ialah salah satu fungsi bahasa di antara beberapa fungsinya yang lain. Bentuk khas penggunaan bahasa ini diberi batasan oleh Jakobson, "The set (Einstellung) towards the message as such, focus on the message for its own sake, is the POETIC function of language" (Jakobson dalam: Sebeok, 1968 : 356). Batasan Jan Mukarovsky, seorang ahli bahasa Ceko, dalam terjemahan Garvin berbunyi, "the function of poetic language consists in the maximum foregrounding of the utterance" (Culler, 1975 : 56). (Sulastin, 1979 : 6).

Seniman sastra hanya mempunyai satu alat, ialah **bahasa**. Dalam pemakaian bahasa sehari-hari, asal tujuan komunikasi telah tercapai, berkian-kian unsur alat tersebut dibuang, karena sudah tidak terpakai lagi. Dalam karya sastra setiap kata, setiap tanda, betapa pun remeh tampaknya seperti "titik", "koma" dan sebagainya, pendek kata setiap unsur bahasa diberi fungsi, diberi makna dan dipertahankan maknanya, jadi tidak ada yang tidak terpakai.

Ilmu sastra menyusun teori mengenai berbagai masalah sastra, merumuskan aturan-aturan umum yang merupakan konvensi sastra, yang pada gilirannya dipakai sebagai **dasar un-**

tuk memahami teks-teks tersendiri (Culler, 1975 : 139), karena pada hakekatnya tiap teks mengandung unsur umum di samping yang khusus.

Dalam arti umum ilmu sastra telah dipelajari sejak zaman Aristoteles. Dalam karangannya "Poetika" mengenai berbagai masalah sastra, Aristoteles membicarakan antara lain seni sastra, berbagai jenis sastra dan fungsinya yang khas, tipe-tipe struktur plot serta persoalan-persoalan lain yang ada hubungannya dengan studi jenis ini. Sejak zaman Aristoteles studi sastra berkembang dengan berbagai macam cara. Kadang-kadang para peneliti bertitik tolak dari karya sastra itu sendiri, artinya penelitian lebih ditekankan kepada sifat khas obyeknya, ialah sastra sebagai bentuk seni. Ada kalanya studi diarahkan kepada pengarangnya dan konteks budaya atau konteks sejarahnya. Kadang-kadang ilmu sastra mencoba pertamanya mempelajari karya sastra dengan metode dan teknik yang diarahkan kepada atau yang berasal dari karya sastra itu sendiri. Dalam hal lain karya sastra didekati dengan teknik dan metode yang berasal dari ilmu-ilmu lain seperti sejarah, linguistik, filsafat, antropologi, sosiologi, psikologi.

Dalam pembicaraan mengenai "Poetic Truth and Historical Truth" dikemukakan bahwa bukanlah fungsi penyair untuk melukiskan apa yang sungguh-sungguh terjadi, melainkan hal-hal yang mungkin terjadi. Perbedaan antara sejarawan dan penyair bukan pula, bahwa yang pertama menulis dalam bentuk prosa dan yang kedua dalam bentuk sajak. Perbedaan asasinya terletak pada kenyataan, bahwa sejarawan menulis tentang sesuatu yang benar-benar terjadi, sedang penyair tentang berbagai peristiwa yang mungkin terjadi.

Penyair itu lebih leluasa dalam mengungkapkan kemungkinan, karena penyair itu mereka-reka ceritanya sendiri.

Apa yang terjadi dalam cerita penyair itu ..mungkin” menurut dunia itu dan dunia yang nyata, karena dunia penyair atau dunia dalam kata-kata itu dibangun atas dasar unsur-unsur dalam dunia nyata, sehingga dengan demikian rekaan penyair itu merupakan suatu penerangan terhadap suatu aspek dunia seperti nyatanya (Daiches, 1956 : 37) dalam konteks kebudayaan yang berlaku dalam masyarakat. Jadi ruang lingkup penulisan sastra lebih luas dari pada sejarah yang harus membatasi diri pada apa yang betul-betul terjadi saja, pada kejadian yang nyata, "history treats of particular facts" (Classical Literary Criticism, 1965 : 44). Sejarah harus tertib dalam penempatan ruang dan waktu, harus konsisten dengan unsur-unsur lain seperti topografi dan kronologi atas dasar bukti-bukti (Kuntowijoyo, 1981:3). Dalam hal penggunaan bahasa pun sejarah menunjuk secara lugas kepada obyek, pikiran, kejadian dan hubungan-hubungan (id.:4).

## HISTORIOGRAFI TRADISIONAL

Sesuai dengan pengarahan dari pihak panitia, agar tidak terjadi tumpang tindih, tetapi sebaliknya saling mengisi di antara kertas-kertas kerja kita, maka kami diharapkan membatasi pengamatan masalah sastra dan historiografi tradisional pada karya sastra Melayu dan sastra sejarahnya.

Dalam khazanah sastra Melayu sastra sejarah menduduki tempat yang luas dan penting. Karya sastra sejarah adalah pertama-tama karya sastra, teks-teks yang ditulis dalam berbagai bahasa Nusantara; kata sejarah adalah batasan terhadap pengertian sastra (Teeuw, 1976:5). Dengan demikian karya-karya itu bukan pertama-tama karya sejarah. Batasan ini penting agar kita dapat menangani jenis karya sastra ini dari titik mata sastra. Pendekatan dan penafsiran yang tidak mengindahkan

---

@ Kebenaran sejarah bersifat relatif juga (Kuntowijoyo, 1981:8).

sifat-sifat karya sastra tidak mungkin memberikan hasil yang tepat. Hanya analisis sastra yang dapat menerangkan "kekaburan, ketidakteraturan, kekacauan", yang boleh sementara peneliti sering dikatakan banyak terdapat dalam karya sastra sejarah. Pandangan tersebut adalah hasil penelitian non-literer. Karya sastra sejarah selain mengandung unsur estetik dan rekaan seperti halnya karya sastra pada umumnya, juga mengandung unsur sejarah sebagai ciri pembeda khusus dari jenis karya sastra yang lain. Aspek rekaannya yang terasa menjadi ramuan dalam struktur sastranya berupa antara lain mitologi, legenda, hagiografi, simbolisma dan sugesti, (Darusuprpta, 1975:6). Mitologi bertalian dengan geneologi atau silsilah raja-raja yang dihubungkan dengan dewa-dewa, bidadari, tokoh-tokoh wayang, dan nabi-nabi. Legenda berkaitan dengan unsur-unsur air, tanah, tumbuh-tumbuhan, api dan udara, misal sinar cahaya yang menyala, kelahiran dari buih air sungai, dari bola emas yang jatuh dari udara, kelahiran dari bambu, dari batu yang menyaranan unsur tanah, pembuangan bayi ke dalam air sungai atau air laut. Hagiografi melukiskan kemukjizatan seorang tokoh, yang dengan kesaktiannya menciptakan sesuatu yang luas biasa. Simbilosma berupa lambang-lambang, misal cahaya berkelarat di angkasa, benda pusaka keramat atau kata-kata kiasan. Sugesti berupa ramalan, firasat, suara gaib, takbir mimpi dan pemali (id.: 7-12). Tindakan-tindakan tidak sedikit yang tidak dari manusia, tetapi dari dewa-dewa, jadi merupakan teogoni dan kosmogoni yang menerangkan kekuatan-kekuatan alam dan mempersonifikasikannya sebagai dewa (Sartono, 1970, 8).

Struktur isinya memuat unsur sejarahnya berupa penyebutan pelaku-pelaku serta kejadian-kejadian yang dialami pemegang peranan dalam konteks alam pikiran, kehidupan kebudayaan, susunan dan hal-ihwal semasa (id.: 12). Bahan bakunya adalah peristiwa sejarah, situasi, kejadian, perbuatan yang

tidak perlu dipertanggungjawabkan lebih dulu; demikian pula kritik, interpretasi dan sintesis tidak diperlukan (Kuntowijoyo, 1981:6), karena dalam lingkungan sosiokultural dari historiografi tradisional itu cerita sejarah adalah kekuatan religio-magis (Sartono, 1970:9).

Berbicara mengenai struktur sastra sejarah Melayu, Roolvink berpendapat bahwa sastra sejarah pada umumnya terdiri atas dua bagian. Bagian pertama adalah bagian yang bersifat mitos atau dongeng yang menceritakan keadaan dahulu kala, asal mula raja-raja yang memerintah dalam negeri, permulaan berlakunya adat-istiadat dan sebagainya. Bagian kedua adalah bagian yang mengandung aspek sejarah, ada kalanya zaman hidup penulisnya sendiri (1954:5). Pembagian tersebut wajar: bagian pertama mengandung konvensi, mengantarkan pembaca kepada tradisi sastra yang sudah dikenalnya, sedang bagian kedua mengandung inovasi, mengandung yang baru yang merupakan ciri khas suatu teks yang membedakannya dari teks-teks lain sejenis. Konvensi dan inovasi merupakan tolok ukur keberhasilan suatu karya rekaan.

Segi referensial sastra sejarah menunjuk kepada fakta-fakta yang benar-benar terjadi, pula kepada fakta-fakta fiktif atau imajinatif dari pujangga yang diciptakan berdasarkan pola-pola pikiran dan perasaan yang hidup dalam masyarakat, yang berpengaruh pada diri pujangga sebagai salah seorang anggota masyarakat (Sutjipto, 1977:121). Segi fiksional dan referensial berpadu sebagai kesatuan (Teeuw, 1976:7).

Sastra sejarah lahir di istana dan diciptakan untuk keperluan raja, dinasti dan kerajaan, maka bagian pertamanya memuat cerita-cerita yang mengagung-agungkan kemegahan raja yang memerintah sampai kepada nenek moyangnya. Dalam bagian kedua yang bersifat historis, cerita-cerita yang menurunkan martabat raja yang memerintah diringkaskan atau dikesampingkan sama sekali (Liaw Jock Fang, 1975:204-5). Me-



nyamarkan atau menyembunyikan kenyataan sejarah yang berhubungan dengan martabat raja itu berarti hidup matinya di penulis, karena itu perbuatan tersebut wajar sekali (Supomo, 1958:23).

Dalam sastra Melayu karya sastra sejarah disebut dengan berbagai nama:

riwayat: **Riwayat Negeri Kedah**

Sejarah (bahasa Arab: daftar keturunan): **Sejarah Raja-Raja Riau**

Hikayat (bahasa Arab: cerita): **Hikayat Aceh**

Salasilah atau Silsilah (bahasa Arab: asal-usul): **Silsilah Kutai**

Misa (bahasa Sanskerta: pahlawan): **Misa Melayu**

Tambo (bahasa Minangkabau: riwayat kuno): **Tambo Bangkahulu**

Kronik: **Kronik Banjarmasin**

Sulalatus Salatina (bahasa Arab: daftar keturunan raja-raja) teristimewa untuk Sejarah Melayu.

Aturan: **Aturan Setia Bugis dengan Melayu**

Cerita: **Cerita Raja Dewa Ahmad.**

Memperhatikan banyaknya kata yang dipakai untuk jenis sastra sejarah ini, dapatlah ditarik pandangan bahwa jenis sastra ini sangatlah diutamakan, dijunjung tinggi dan digemari, dan karenanya terdapat dalam jumlah yang besar pula. Hal ini dapat kita maklumi, karena karya-karya tersebut mengandung pujaan terhadap raja, yang dipandang lebih dari seorang penguasa dunia saja; dia adalah pusat sakral dari pergaulan hidup; dengan perantaraan dialah masyarakat berhubungan dengan susunan kosmis; dialah pendukung kelanjutan hidup dan oleh karenanya mempertahankan hubungan dengan leluhur yang dianggap dewa-dewa; karena itu dia harus disokong dan diperkuat dengan jalan ritus dan kultus (Teeuw, 1952:

ix). Raja dinyatakan pula sebagai khalifatu'llah fi'il ardi (wali Tuhan di dunia), Zillu'llah fi'l 'alam (bayang-bayang Allah di alam), gelar yang menempatkannya pada kedudukan sentral, yang menimbulkan pandangan rajasentrisme. Raja adalah pusat dan sumber kehidupan masyarakat, memancarkan kesaktian yang memelihara kemakmuran dan kesejahteraan kerajaan. Penghormatan tertinggi diberikan kepada raja dan kekuasaannya serta kebudayaan yang berpusat di lingkungan raja (Sartono, 1968:29).

Sesuai dengan tradisi sastra sejarah, raja yang ditokohkan itu turun-temurun. Meskipun yang dikisahkan tidak hanya seorang tokoh raja, namun pasti ada tokoh utamanya. Setelah proses Islamisasi gelar **Raja** menjadi **Sultan**, sedang **Ratu** pada umumnya dipakai untuk para raja di Jawa (Syakir, 1980/81: 70).

Unsur-unsur mitologis mengenai asal-usul para raja dihubungkan, dengan awal kehidupan manusia di dunia. Penghuni surgawi dari dunia kedewataan atau khayangan dianggap sebagai nenek moyang raja-raja dan oleh karena itu mereka memperoleh martabat serta kebangsawanannya. Ada pula yang dihubungkan dengan keturunan yang berasal dari tokoh historis-legendaris Iskandar Zulkarnain yang turun di Bukit Siguntang (Sejarah Melayu), ada yang dikembalikan kepada keturunan raja Majapahit, Brawijaya, karena luasnya pengaruh Majapahit di Nusantara dan ada lagi yang berasal dari kelahiran yang ajaib, misal.:

- keturunan seorang anak yang dipelihara oleh gajah dengan Putri Betung (Hikayat Raja-Raja Pasai).
- keturunan anak yang kawin dengan Putri Buluh (Hikayat Aceh)
- keturunan Putri Junjung Buih (Hikayat Banjar)
- keturunan anak yang lahir dari bola emas yang diturunkan dari kahyangan oleh tujuh dewa (Silsilah Kutai).

Mengingat kedudukan raja yang istimewa itu historiografi tradisional yang memuat genealogi raja-raja dengan biografi mereka merupakan historiografi dinasti, yang mempunyai fungsi magis. Silsilah disusun tidak lagi secara historis-realistis, tetapi kosmis-religiomagis (Sartono, 1968:35).

Kebudayaan Islam membawa perubahan terhadap pengertian raja, yang dipandanginya tidak lagi sebagai dewa, tetapi sebagai manusia biasa. Penghormatan tetap besar, tetapi raja berkewajiban menjalankan pemerintahan dengan adil dan bijaksana, ia harus menjunjung tinggi undang-undang negara. Raja tidak dapat bersifat sewenang-wenang terhadap rakyat, kepentingan rakyat harus diperhatikan. Kelaliman terhadap rakyat akan membinasakan raja. Hubungan raja dengan rakyat masih tersimpan dalam ungkapan:

Raja adil raja disembah  
Raja lalim raja disanggah

Dari uraian di atas nyata, bahwa pandangan raja-sentris telah tercampur dengan unsur demokrasi (id.:30). Hal tersebut tampak jelas dari perjanjian antara Sang Suparba dengan Demang Lebar Daun seperti yang disebutkan dalam **Sejarah Melayu**. Demang Lebar Daun adalah orang Melayu pertama yang memakai bahasa "Yang dipertuan" dan "patik" (id.:26), artinya dialah yang menciptakan hubungan raja dan hamba. Permintannya kepada raja,

*Adapun tuanku segala anak cucu patik sedia akan jadi hamba ke bawah duli Yang Dipertuan; hendaklah ia diperbaiki oleh anak cucu duli tuanku. Dan jika ia berdosa, sebesar-besar dosanya pun, jangan ia difadhihkan, dinista dengan kata-kata yang jahat, jikalau besar dosanya dibunuh, itu pun jikalau berlaku pada hukum syarak (h.26).*

Raja mengabulkan permintaan itu, tetapi minta janji,

*Hendaklah pada akhir zaman kelak anak cucu bapa hambaku jangan duhaka pada anak cucu kita, jikalau ia zalim dan jahat pekerti sekali pun (id.)*

Demang Lebar Daun menjawab,

*Baiklah, tuanku. Tetapi jikalau anak buah tuanku dahulu mengubahkan dia, maka anak cucu patik pun mengubahkanlah. (id.)*

Perjanjian antara hamba dan raja itulah yang banyak dipakai sebagai tema dalam karya sastra sejarah Melayu, yaitu segala anak Melayu pantang durhaka. Contoh pribadi hamba yang setiawan dan terlalu sangat berbuat kebaktian kepada tuannya, yang kesetiaannya tidak terbatas adalah Hang Tuah dalam cerita fiksi Hikayat Hang Tuah.

#### **Maksud dan Tujuan Penulisan karya sastra sejarah**

Dalam Sejarah Melayu disebutkan maksud dan tujuan penulisan sejarah itu,

*Demikian bunyi titah Yang Mahamulia itu, bahwa beta minta perbuatan hikayat pada bendahara peristiwa dan peraturan segala raja-raja Melayu dengan istiadatnya sekali, supaya diketahui oleh segala anak cucu kita yang kemudian daripada kita, diingatkannya oleh mereka itu, syahdan beroleh faidahnya dari padanya (h.2).*

Dari kutipan di atas jelas, untuk keperluan apa hikayat itu ditulis, ialah:

- untuk mencatat segala peristiwa
- untuk mencatat peraturan segala raja-raja Melayu
- untuk mencatat adat-istiadatnya
- agar cerita itu sampai kepada anak cucu
- agar anak cucu dapat belajar dari peristiwa masa nenek-moyangnya.

Kita tahu pula yang memberi perintah adalah raja dan yang diberi perintah adalah seorang hamba, meskipun ia amat tinggi kedudukannya sebagai bendahara. Rupanya dirasakan sebagai suatu keharusan, bahwa raja yang layak dan berhak memerintah, memerintahkan seseorang untuk membuktikan bahwa raja yang memerintah itu adalah ahli waris yang sah yang melakukan perbuatan-perbuatan termasyhur, demikian pula nenek moyangnya, karena itu harus dijunjung tinggi. Dengan demikian penulis sejarah itu sangat terikat kepada raja, sehingga penulis itu pasti berusaha untuk melayakberhakan raja yang sedang memerintah pada waktu itu (Supomo, 1962:15). Hasil karyanya sudah barang tentu bersih dari segala cacat cela bagi raja, bahkan merupakan puji sanjung untuk raja dalam pandangan rakyat.

Marilah kita perhatikan fungsi teks seperti tersebut di atas yang diteliti melalui strukturnya, karena sesuai dengan yang telah diketengahkan sebelumnya fungsi dan struktur tidak dapat dipisah-pisahkan.

Dalam meneliti **Hikayat Banjar** (1968) sebagai karya sastra sejarah Melayu Ras bertitik tolak dari pengkajian strukturnya, karena tiap-tiap hasil sastra itu tidak hanya berasal-usul, tetapi juga mempunyai sejarah kejadiannya, artinya tiap teks direka atau dilahirkan guna memenuhi suatu fungsi. Fungsi ini akan memenuhi setukturnya. Struktur dan fungsi adalah dwitunggal. Melalui strukturnya diterangkan fungsi teks itu, sehingga jelas, bahwa teks itu tidak hanya suatu cerita begitu saja dari zaman dulu sebagai pengisi waktu luang yang mengasyikkan bagi pembacanya.

Ras mengadakan analisis struktur mengenai isi cerita itu serta gaya bahasanya dan sampai pada kesimpulan, bahwa menurut isinya **Hikayat Banjar** terdiri atas cerita inti, bagian yang paling pokok ialah kelahiran dan perkawinan pasangan raja yang pertama. Kemudian ada beberapa cerita lanjutan

yang sebagian merupakan sejarah Kraton II (Daha), sebagian Kraton III (Banjarmasin) dan sebagian lagi merupakan tambahan yang ditulis kemudian.

Menurut ciri-ciri gaya bahasanya ada proto- Hikayat Banjar, ditulis di Kraton III di Banjarmasin dan ada beberapa cerita lanjutan. Atas dasar strukturnya dijelaskan fungsi teks ini, ialah untuk mengesahkan kekuasaan Sultan yang memerintah.

Sekedar untuk memperkuat contoh kita perhatikan fungsi teks dari luar sastra sejarah Melayu. Yang pertama menerapkan analisis struktur yang sungguh-sungguh pada teks Indonesia adalah P.J. Worsley dalam disertasinya **Babad Buleleng** (Leiden, 1972). Edisi dan terjemahan didahului dengan bab pengantar yang membicarakan analisis bentuk, tema dan fungsi. Disebutkan bahwa **Babad Buleleng** adalah silsilah dinasti klen Den Bukit yang berkuasa sejak dari nenek moyang yang pertama Ki Gusti Ngurah Panji Sakti sampai kepada zaman penulis Babad ini. Silsilah itu dipaparkan dengan lengkap dalam teks. Dikatakan lebih lanjut, bahwa silsilah itu terdiri atas dua garis keturunan, masing-masing terdiri lagi atas tujuh generasi. Garis keturunan inilah yang menurut pengamatan Worsley kiranya oleh pengarang dengan sadar dijadikan kerangka struktural karangannya. Garis keturunan ini menghubungkan cerita yang satu dengan yang lain dan karena urutan silsilah itu mengenai raja, maka rajalah yang menguasai cerita. Motif yang menonjol sebagai pembentuk struktur urutan kejadian adalah unsur cerita yang membangkitkan gambaran raja dan kerajaan yang ideal.

Bagaimanakah halnya dengan **Sejarah Melayu (SM)** dan **Hikayat Hang Tuah (HHT)**, dua karya sastra Melayu mengenai timbulnya, masa kejayaan dan runtuhnya kerajaan Malaka?

Mengenai **SM** jelas namanya menunjukkan karya itu sebagai karya sastra sejarah yang terpenting pula. Karya itu telah

beberapa kali diterbitkan dan kajian mengenai berbagai aspeknya terus-menerus dilakukan. Jumlah salinan menunjukkan pula betapa pentingnya cerita ini.

Naskah **SM** telah diselidiki antara lain oleh R.O. Winstedt dan R. Roolvink. Winstedt menyelidiki beberapa buah, di antaranya naskah Raffles 18. Ia berpendapat, bahwa naskah Raffles 18 tidak memuat peristiwa yang terjadi sesudah tahun 1536 dan mungkin naskah tersebut adalah naskah **SM** yang tertua dan naskah itu adakah "hikayat Melayu yang dibawa orang dari Goa" (Winstedt, 1969, h.158). Katanya lebih lanjut, pengarang **SM** tidak diketahui, tetapi pengarang itu tahu kata-kata Sanskerta, Parsi dan Tamil, tahun kalimat-kalimat Jawa dan teks-teks Arab, tahu pula sedikit bahasa Tionghoa, Siam dan Portugis. Ia ahli juga dalam pengetahuan rahasia tentang mistik Sufi Pasai dan Malaka (h.159-60). Roolvink tidak membenarkan pendapat Winstedt dan menyarankan pemikiran, bahwa naskah Raffles 18 itu berasal dari tahun 1612 seperti yang dikatakan dalam kata pendahulunya (1967, h. 311). Selanjutnya Roolvink mengatakan, bahwa naskah itu menyebutkan Bendahara sebagai pengarangnya dan pernyataan itu diperkuat dalam bab kedua dari "Bustanu'l-Salatin, fasal 12", di mana al-Raniri memperkenalkan "Bendahara Raja yang mengarang Sulalatu'-Salatina" sebagai salah satu sumbernya sehubungan dengan asal-usul raja-raja Melayu. Dari berbagai penelitiannya Roolvink menarik kesimpulan juga, bahwa "Sulalatu'l-Salatina" yang dikenal sebagai nama Arab bagi **SM** itu aslinya adalah daftar keturunan raja-raja (h.305). Ia sependapat dengan Linehan (1947, h.107), bahwa **SM** itu berkembang dari daftar raja-raja, yang menyebutkan jangka-jangka waktu pemerintahan dengan penanggalannya disertai keterangan singkat tentang tiap-tiap raja. Daftar raja-raja ini kemudian diperluas dengan berbagai cerita, juga peristiwa-peristiwa sejarah yang sesuai dan pada tempatnya, tetapi

tanpa penanggalan. **SM** yang dikenal sekarang ini pertama-tama buku dongeng dan anekdot masa lampau dan bukan terutama buku sejarah, walaupun mengandung sejumlah besar bahan sejarah (h.306).

Akhirnya Roolvink menyebutkan jumlah naskah **SM** yang seluruhnya ada dua puluh sembilan buah, tersimpan di perpustakaan London, Manchester, Leiden, Amsterdam, Jakarta, dan Leningrad. Kecuali naskah Leningrad yang untuk sementara tidak dapat turut diteliti, dua puluh delapan buah lainnya dibagi Roolvink menjadi tujuh golongan (h.308-9):

1. Dua buah naskah mewakili naskah Raffles 18.
2. Enam naskah tidak lengkap.
3. Versi pendek dimuat dalam lima naskah, seperti yang diterbitkan Abdullah bin Abdulkadir Munsyi dalam tiga puluh empat bab dan berakhir dengan kematian Tuan Ali Hadji, Versi ini juga dimuat dalam versi Shellabear.
4. Dua naskah pendek seperti yang diterbitkan oleh Abdullah di Singapura.
5. Versi panjang terdapat dalam sembilan naskah. Seperti Shellabear, versi ini berakhir dengan menyebutkan serangan Jambi atas Johor (1673) dalam kolofonnya. Perpaduan antara versi panjang dan versi pendek ini melahirkan versi Shellabear.
6. Versi yang diperluas terdapat dalam satu naskah. Versi ini adalah sebuah sejarah Melayu, yang dari beberapa tempat merupakan naskah singkatan dari **SM** yang diikuti oleh sejarah Selat Malaka abad kedelapan belas dari sudut pandangan Siak. Naskah ini sangat penting dan mungkin dapat disebut **Hikayat Raja Akil**.
7. Versi Palembang. Bagian **SM**-nya berakhir dengan serangan Portugis terhadap Malaka.

**SM** adalah sumber sejarah kemasyarakatan yang penting karena memberikan gambaran tentang kehidupan Malaka pada



abad ke 15. Malaka merupakan kota perdagangan yang ramai dikunjungi oleh pedagang-pedagang berbagai bangsa, antara lain dari Jawa, Arab, Tamil, Tiongkok. Sudah barang tentu pengaruh para pendatang ini terasa sekali dalam segala bidang kehidupan. Peperangan dan hubungan baik dengan negara-negara tetangga dilukiskan dengan jelas. Segala adat-istiadat raja-raja Melayu diatur dan undang-undang disusun untuk menjamin keamanan masyarakat. Seperti halnya penggunaan karya sastra sejarah yang lain sebagai sumber data masih diperlukan kajian yang mendalam (Liw Yock Fang, 1975, 214-5).

### **Studi Hikayat Hang Tuah sampai sekarang.**

Pengamatan sepintas atau penelitian mendalam mengenai **ÜHT** telah banyak dilakukan. Dalam fasal ini disebutkan pendapat beberapa orang dari sekian banyak penyelidik **HHT** dari sudut pandangan dan pendekatan masing-masing agar lebih jelas tampak pendekatan mana yang paling tepat untuk menangani dan menghargai teks **HHT** sebagai mana mestinya.

**HHT** sudah dikenal sejak abad ke 18. Walaupun penyelidikan tidak dilakukan secara mendalam seperti dalam abad ke 20 ini, namun **HHT** cukup menarik perhatian penyelidik-penyelidik Barat. Pernyataan mereka berbeda-beda mengenai soal "jenis karangan apakah Hikayat Hang Tuah itu?", karena itu penilaian mereka tentang **HHT** ini pun berbeda-beda pula. Menilai sebuah karya tulis dengan tepat, paling sedikit harus diketahui, apakah karangan itu karya sastra atau bukan. Mari-lah kita perhatikan pendapat mereka:

1. **HHT** dikacaukan dengan **SM**. Yang pertama kali menyebutkan nama **HHT** adalah seorang pendeta Belanda Francois Walentijn dalam bukunya "Ouden Nieuw Oost-Indien" (1726), yang terdiri atas tujuh jilid. Dalam jilid V, dalam lukisannya mengenai Malaka disebutkan salah sebuah karya sastra Melayu yang dimiliki, yaitu "Kitab

Hantoewa” atau ”Hang Tuah”, yang dipandangny sebagai salah satu hasil sastra Melayu yang terindah. **HHT** dikacaukannya dengan Sulalatus-Salatin (Sultan-sultan Malaka), ialah nama lain untuk **SM**. Walaupun **HHT** dikacaukan dengan **SM**, namun penyebutan nama itu sendiri menunjukkan, bahwa karangan tersebut sudah terkenal sekali, sampai-sampai orang di luar lingkungan pribumi tahu dan memberi penghargaan pula. Orang kedua yang mengacaukan **HHT** dan **SM** ialah seorang pendeta Swis G.H. Werndly dalam daftar tambahan pada buku tatabahasanya ”Maleische Spraakkunst” (1936). Ia menyebutkan nama buku **HHT**, yang diberinya penjelasan sebagai riwayat atau sejarah Hang Tuah dan Hang Tuah sendiri disebutnya pengarang buku Sulalatus-Salatin. Lebih lanjut dikatakan, bahwa **HHT** adalah cerita sejarah tentang riwayat raja-raja dan sultan-sultan yang berasal dari Iskandar Dzulkarnain. Kekacauan Werndly lebih jauh dari pada Valentijn, sebab ia berbicara tentang Hang Tuah sebagai pengarang buku **SM** dan Iskandar Dzulkarnain sebagai nenek moyang raja-raja Melayu. Apakah hubungan Iskandar Dzulkarnain dengan Hikayat Hang Tuah? Kekeliruan Werndly ini kiranya dapat dicari sumbernya pada pendahuluan naskah Or. 1762 di Perpustakaan Universitas di Leiden, yang menyebutkan nama Hang Tuah yang amat masyhur dan asalnya turun-temurun dari anak cucu sultan Iskandar Dzulkarnain. Adanya nama Iskandar Dzulkarnain ini menimbulkan sangkaan, bahwa yang dimaksud Werndly dengan **HHT** itu memang **SM**.

2. **HHT** dibedakan dari karangan sejarah. Seabad kemudian dari pandangan kacau dua orang pendeta tersebut E. Netscher pada tahun 1854 menolak

**HHT** sebagai karangan sejarah. Ia menyebutnya sebuah roman yang amat penting untuk mengetahui tatacara hidup Melayu beberapa abad yang lalu (h.149). Pandangan ini menuju ke arah penghargaan yang tepat.

3. **HHT** di pandang tidak bernilai untuk jenis karangan sejarah maupun sastra.

John Crawfurd dalam karangannya **History of the Indian Archipelago** (1820, h.378) mencemooh **HHT** sebagai cerita yang tidak masuk akal dan kekanak-kanakan; yang ada harganya sedikit hanyalah bagian-bagian cerita yang menggambarkan budi serta cara hidup orang Melayu. Dikatakan pula tidak ada sedikit pun peristiwa dalam buku itu yang dapat dipercaya, angka tahun juga tidak ada. Jadi dari sudut pandangan Crawfurd **HHT** itu boleh dikatakan sama sekali tidak berharga. Dia pun mencampur-adukan **HHT** dan **SM**.

Marilah kita perhatikan **HHT** dari sudut strukturnya, karena analisis struktur menerangkan hubungan bagian yang satu terhadap yang lain dan terhadap keseluruhannya dan sebaliknya akan mengungkapkan segala gejala yang menurut pandangan tertentu tidak masuk akal.

**HHT** melambangkan pribadi hamba yang setiawan dan sangat berbuat kebaktian kepada tuannya secara fiksi. Dengan alat fiksi ruang, yaitu Malaka sebagai pusat tanah Melayu dan pusat dunia dan dengan alat fiksi waktu, berupa timbulnya, kejayaan dan runtuhnya Malaka, ditampilkan pribadi hamba Hang Tuah.

Sesuai dengan judulnya, maka hikayat ini adalah cerita mengenai Hang Tuah. Hang Tuah menjadi pusat seluruh cerita. Ia merupakan kekuatan pendorong dalam segala perbuatan dalam cerita sesuai dengan ciri-ciri yang dilekatkan kepadanya sebagai tokoh pusat. Pentafsiran makna judul menjadi makin

terang di dalam tema pokok yang dengan jelas dan secara eksplisit dicantumkan sebelum cerita dimulai:

Inilah hikayat Hang Tuah yang amat setiawan pada tuannya dan terlalu sangat berbuat kebaktian kepada tuannya.

Tema pokok tersebut mewakili pemikiran pusat, pemikiran dasar atau tujuan utama penulisan hasil sastra ini. Dalam tema pokok terdapat tiga unsur:

- a. Hang Tuah – hamba
- b. setiawan – kebaktian
- c. tuannya.

Jadi tokoh utama dalam hikayat ini adalah hamba, maka harus ada raja tempat si hamba itu mengabdikan kesetiaan dan kebaktiannya. Karena itu cerita dimulai dengan asal-usul raja yang diturunkan oleh raja keinderaan. Kaitan dengan keinderaan melambangkan hubungan dengan makrokosmos yang menyebabkan kedudukan raja paling tinggi dan kekuasaannya mutlak seperti yang disebutkan dalam teks, bahwa raja itu ganti Allah taala di dunia (I: 17).

Kata **setia** dan **bakti** dalam tema pokok merupakan landasan segala perbuatan Hang Tuah terhadap tuannya. Pengungkapan tema pokok ini khas dan selalu menurut tradisi sastra dan kebudayaan Melayu. **Bakti** dalam wiracarita dipakai dalam arti mempunyai bagian dalam kerajaan, dalam kejayaan dan keruntuhannya, dalam hal-hal yang sakti ritual, pula untuk menyatakan kesetiaan serta rasa kasih hamba terhadap atasannya, rakyat terhadap raja (Gonda, 1948, h.615). Hubungan antara orang bawah dan atasannya atas dasar kerohanian ini terdapat pada negeri-negeri yang mengalami pengaruh Hindu, termasuk Malaka. Demikian kesetiaan serta kebaktian Hang Tuah terhadap rajanya dapat ditafsirkan berdasarkan konsepsi di atas.

Perwatakan dalam kajian ini ditinjau dari sudut struktur dan fungsi ceritanya. Cerita ini adalah cerita Hang Tuah, jadi tokoh intinya adalah Hang Tuah. Kehadiran tokoh-tokoh lainnya itu terutama berfungsi untuk menonjolkan peranan Hang Tuah. Watak tokoh-tokoh paling jelas dapat dilihat melalui pendekatan oposisi, ialah dalam hubungannya dengan Hang Tuah dan dalam oposisi terhadapnya, karena buku ini memang buku Hang Tuah. Struktur perwatakannya adalah struktur relasi dan oposisi.

Mengenai struktur waktu dapat antara lain disebutkan, bahwa Hikayat Hang Tuah adalah cerita berjalur tunggal, artinya tidak ada "bagian waktu yang lebih tua", ceritanya tidak terjadi padadua tingkat waktu yang berbeda seperti halnya pada cerita bingkai, di mana seorang pelaku mengisahkan lagi suatu cerita dari zaman yang lebih dulu dari zamannya. Kejadian-kejadian dalam HHT berlangsung berurutan dalam satu garis mulai asal-usul Hang Tuah sampai hidupnya yang abadi sejajar dengan timbulnya sampai runtuhnya Malaka. Jenis berlangsungnya waktu adalah jenis garis bersambung-sambung.

Baik dalam struktur waktu maupun ruang selalu tampak Hang Tuah di titik tengah. Pada hakekatnya seluruh teks dapat dipandang sebagai susunan ruang tanah Melayu secara simbolis. Tanah Melayu dalam arti yang luas mencakup seluruh dunia menurut pandangan orang Melayu waktu itu. Dalam dunia tersebut ada bagian dalam yang langsung di bawah kekuasaan Malaka dan bagian luar yang berhubungan baik dengan Malaka. Peran pusat dalam menyusun tatanan ruang dunia Melayu ini adalah Hang Tuah dengan perlawatannya menjelajahi ruang yang melambangkan:

- a. — penyebarluasan kebudayaan Malaka
- memungut kebudayaan dari negara-negara lain.

- b. ke Majapahit : konfrontasi, menuntut pengesahan Majapahit sebagai negara pertama di nusantara.
- c. ke negara tetangga/luar negeri: konsolidasi
  - Malaka negara yang paling berkuasa
  - menanamkan kebudayaan dan kekuasaan Malaka.
- d. di luar dunia yang telah tersusun ini masih ada dunia yang diwakili oleh Feringgi (Portugis).
- e. seluruh "dunia" mengakui kedaulatan Malaka.

### Cerita **Hang Tuah** dalam **Sejarah Melayu**

Cerita Hang Tuah terdapat juga dalam **SM**. Seberapa jauhkah struktur **HHT** berbeda daripada struktur cerita Hang Tuah dalam **SM**? Perbedaan ini akan dapat menunjukkan, bahwa **HHT** bukan karya "sejarah" seperti yang diduga kebanyakan orang atas dasar kejadian-kejadian dalam hikayat itu yang terdapat juga dalam **SM** dan sedikit banyak merupakan pantulan peristiwa sejarah.

Yang akan diamati dalam tinjauan singkat ini terutama tempat-tempat di mana Hang Tuah memainkan perannya. Dari tempat-tempat itu diharapkan dapat dirunut apakah cerita Hang Tuah dalam **SM** mengandung unsur-unsur dasar sebuah cerita yang mempunyai struktur yang bulat seperti halnya **HHT**.

Dari tempat-tempat Hang Tuah tampil dalam **SM** dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Ada kesamaan ciri-ciri Hang Tuah dalam **HHT** dan **SM**:

1. Hang Tuah dilukiskan terlebih cerdik gagah berani daripada yang lain-lain.
2. Dua kali digelar Laksamana. Bedanya: dalam **HHT** pertama kali oleh Batara Majapahit, yang kedua kalinya oleh Sultan Malaka; dalam **SM** dua kali oleh Sultan Mansur Syah.

Di samping ciri-ciri yang sama di atas terdapat lebih banyak perbedaan:

1. **HHT** adalah cerita rekaan, yang mempunyai struktur koheren dengan Hang Tuah sebagai tokoh utama sepanjang hikayat; cerita Hang Tuah dalam **SM** tidak merupakan kebulatan, tetapi terpotong-potong dalam beberapa bagian.
2. Dalam **HHT** hanya ada satu Sultan **tanpa nama**; Dalam **SM** Hang Tuah mengabdikan kepada tiga orang Sultan: Sultan Mansur Syah, Sultan Alauddin dan Sultan Mahmud Syah.
3. Dalam **HHT** tokoh utama adalah si hambat Hang Tuah; dalam **SM** tokoh-tokohnya adalah raja-raja.
4. Dalam **HHT** Tun Teja dilarikan oleh Hang Tuah. Untuk kepentingan struktur cerita melarikan Tun Teja adalah pekerjaan penting. Ini soal bakti, karena itu yang mengerjakan harus tokoh utama; dalam **SM** Tun Teja dilarikan oleh Hang Nadim, menantu Hang Tuah.
5. Dalam **HHT**, Hang Tuah selalu menang dan selalu berhasil melaksanakan titah tuannya berkat kesaktiannya atau kekuatannya yang super-manusiawi; dalam **SM** Hang Tuah tidak selalu jaya seperti yang kita lihat pada cerita ke-22 waktu menyerang Pasai. Ia tidak pula selalu berhasil seperti halnya ia gagal meminang Puteri Gunung Ledang untuk Sultan Mahmud Syah.
6. Dalam **HHT**, Hang Tuah sudah tampil pada halaman 24 (seluruhnya menurut Shellabear 593 halaman) dan pada halaman terakhir dikatakan **tidak** mati, Hang Tuah menjadi wali Allah; dalam **SM** Hang Tuah baru tampil pada cerita ke 14 (seluruhnya 34 cerita) dan mati pada cerita ke-28. Dalam bagian ini pun Hang Tuah tidak tampil da-

lam setiap cerita, tetapi hanyalah dalam sembilan cerita, sedang dalam cerita yang ke-31 bukan peranan Laksamana Hang Tuah yang diuraikan, melainkan silsilah keluarganya sesuai dengan penulisan silsilah raja-raja.

Jadi cerita Hang Tuah di sini:

- a. terputus-putus.
- b. Hanya meliputi kira-kira 2/7 bagian dari seluruh cerita dalam **SM**.
- c. Cerita Hang Tuah dalam **SM** hanya dapat difahami dan diterangkan dalam fungsi teks sebagai keseluruhan. Karena itu secara apriori tidak masuk akal, kalau cerita Hang Tuah dalam **SM** menunjukkan struktur yang bulat. Yang berstruktur demikian adalah teksnya sebagai keseluruhan.
- d. peranan yang di dalam **SM** dalam berbagai cerita dilakukan oleh beberapa orang, dalam **HHT** dilakukan oleh Hang Tuah, yaitu peranan:
  1. Tun Telanai diutus ke Siam (Sejarah Melayu, h. 116)
  2. Tun Perpatih Putih diutus ke Cina (id., h. 139).
  3. Tun Telanai bertemu dengan raja Brunai (id., h.142).
  4. Sultan Ala'd-din Ri'ayat Syah dibantu oleh Hang Isap dan Hang Siak memburuh dan mengusir pencuri-pencuri (id., h. 188).
  5. Hang Nasim diutus ke Keling (id., h. 239).
  6. Hang Nadim melarikan Tun Teja (id., h. 246).

Berbagai hamba dalam **SM**, dalam **HHT** direka-reka menjadi hamba tunggal yang ideal dalam diri Hang Tuah.

Dari semua perbedaan tersebut di atas nyatalah, bahwa **HHT** bukanlah sebuah karya "sejarah" seperti halnya **SM**, bukan pula sebuah karya yang dapat dicari kebenarannya dalam dunia nyata. **HHT** adalah dunia kata-kata yang menampilkan



hamba yang teramat setia dan bakti kepada rajanya. (Sulastin, 1979 : 452-8).

Demikianlah beberapa contoh pengamatan literer terhadap karya sastra sejarah.

Sampai dimanakah sastra sejarah dapat menjadi sumber sejarah atau bagaimanakah menggunakan bahan-bahan kesejarahan dalam karya-karya sastra sejarah itu?

Kita perhatikan unsur-unsur sejarah dalam beberapa karya sastra sejarah yang cukup penting di bawah ini:

### **Hikayat Aceh**

Tertulis pada zaman Iskandar Muda (1606-1636) dan hampir separuh dari hikayat menceritakan kebesaran Iskandar Muda. Kalimat permulaannya berbunyi, "Ini Hikayat raja Aceh daripada asal turun-temurun". Kalimat yang secara eksplisit menyatakan kandungan kesejarahan itu menyarankan terdapatnya bahan sejarah yang patut dikaji sebagai sumber penulisan sejarah.

### **Misa Melayu**

Memuat silsilah raja-raja Perak sampai kepada Sultan Mahmud Syah yang mangkat pada tahun 1778. Disebutkan kejadian-kejadian dalam pemerintahan Sultan Muhammad Syah dan Sultan Muzaffar Syah yang mangkat pada tahun 1756. Banyak dikisahkan seluk beluk pemerintahan Sultan Iskandar Syah (1756-1770), terutama adat yang berlaku di istana. Dapat pula dipandang sebagai buku adat raja-raja Melayu. Di samping itu diceritakan pula tentang perhubungan-perhubungan dengan Kedah, Selangor dan orang-orang Belanda. Pada umumnya cerita ini memberikan gambaran mengenai suatu kerajaan Melayu yang kaya raya dan rakyatnya makmur pada abad ke-18.

### **Kronika Pasai**

Dalam mengamati **Kronika Pasai** Ibrahim Alfian menyatakan, bahwa isi kronika tersebut menyangkut sejarah negeri Pasai antara pertengahan-pertengahan abad ke-13 (masa pengislaman Pasai) sampai dengan kira-kira pertengahan abad ke-14 (penaklukan Pasai oleh Majapahit). Untuk menilai adanya fakta-fakta historis dalam karya ini sejauh mungkin dicoba mendapatkan fakta-fakta sejarah dari sumber-sumber yang ada sebagai bahan perbandingan, sehingga dapat diperoleh bahan-bahan untuk disumbangkan bagi penulisan sejarah Pasai pada masa-masa peristiwa-peristiwa yang disebutkan dalam teks, dipakai pula bekas-bekas peninggalan lain berupa makam-makam di kabupaten Aceh Utara, catatan-catatan perjalanan dan sumbangan-sumbangan kajian dari para ahli (1973: 1-5).

### **Silsilah Melayu dan Bugis**

Dikarang oleh Raja Ali Haji. Disebut juga secara lengkap **Silsilah Melayu dan Bugis dan Segala Raja-Rajanya**. Menceritakan kegiatan orang-orang Bugis di Kalimantan, Kepulauan Riau dan Semenanjung Melayu sampai tahun 1737. Di dalamnya terdapat syair-syair sebagai kesimpulan cerita-ceritanya. Syair-syair ini sendiri dapat merupakan syair sejarah.

### **Tuhfat al-Nafis (Hadiah yang berharga)**

Karya Raja Ali Haji pula. Menceritakan silsilah raja-raja Melayu, bermula dari Raja Sri Tri Buana yang mendirikan kerajaan Singapura sampai kepada jatuhnya Malaka ketangan Portugis dan mangkatnya Sultan Mahmud. Kemudian disusul dengan silsilah raja-raja Johor, raja-raja Siak dan raja-raja Bugis. Bagian yang terakhir ini yang paling panjang. Semua Peristiwa diberi angka tahun yang tepat. Cerita yang bersifat dongeng hampir-hampir tidak ada. Sumber sejarah yang dipakai juga disebutkan. Cerita ini Bugis-sentris.

## **Hikayat Negeri Johor**

Tidak seperti lazimnya karya sastra sejarah dimulai dengan mitos dan dongeng, hikayat ini langsung mulai dengan peristiwa sejarah: Johor dikalahkan oleh Jambi.

Raja Jambi merasa dihina oleh raja Johor, yang telah memutuskan pertunangannya dengan puteri Jambi, lalu kawin dengan anak Laksamana paduka raja. Laksamana ini mempersembahkan putrinya kepada raja, karena ia ingin menambah pengetahuannya kepada raja, sebab ia berselisih faham dengan bendahara Johor. Setiap peristiwa dicatat, meskipun peristiwa itu tidak selalu penting dan ada hubungannya dengan yang lain dan diberi angka tahun. Ini adalah satu ciri penulisan sejarah Bugis. **Tuhfat al-Nafis** yang dipandang karya sastra yang terpenting sejak **Sejarah Melayu** tertulis dalam tradisi Bugis (Ismail Hussein, 1963 : 346).

## **Syair Sultan Maulana**

Tertulis dalam bentuk syair seluruhnya. Masih mengikuti penulisan-sejarah Melayu tradisional seperti yang tertulis dalam bentuk prosa dengan unsur sejarahnya peristiwa pemberontakan Petani dan peperangan antara Siam dengan Birma pada awal abad ke-19.

Syair ini berfungsi mengesahkan kebesaran sultan dan kerajaan Kedah seluruhnya. Muhammad Yusoff Hashim yang mengkaji teks syair sejarah ini secara kritis berpendapat, bahwa syair ini pun tidak dapat dan tidak boleh berdiri sendiri sebagai sumber sejarah, tidak mungkin digunakan sebagai "main source" sepenuhnya, sebab ada fakta sejarah dalam teks yang masih harus diuji kebenarannya atas dasar perbandingan dengan sumber-sumber asing sezaman; karya sastra ini bukan hasil penulisan sejarah menurut pengertian masa kini, namun perannya "for the sake of human knowledge" tetap ada dan tidak dapat dinafikan; tidak dapat diungkiri pula, bahwa karya

sastra ini boleh dipakai sebagai "primary source" untuk menulis sejarah Kedah pada awal abad ke-19.

### **Kesimpulan**

Dari uraian dan contoh-contoh di atas jelaslah, bahwa karya sastra sejarah harus mendapat tempat dalam ruang lingkup penelitian sejarah, karena mendukung pernyataan Sutjipto, dalam karya sastra sejarah terdapat unsur sejarah, baik secara langsung menunjuk realitas ataupun secara tidak langsung menunjuk realitas masyarakat (1977 : 121). Karya-karya sastra jenis ini memberikan gambaran yang jelas tentang sistem nilai atau sistem budaya masyarakat pada suatu tempat dalam suatu masa, perbuatan apa yang dipuji dan dicela, pandangan hidup mana yang dianut dan di jauhi, apa yang digemari dan di junjung tinggi. Oleh karena itu dalam usaha menyusun sejarah nasional, naskah-naskah sejarah tradisional ini perlu mendapat perhatian secara lebih mendalam lagi dari para sejarawan bersama-sama para filolog.

---

## Daftar Kepustakaan

1. Cense, A.A., 1928, **De Kroniek van Banjarmasin**, Santpoort.
2. Classical Literary Criticism, 1965 (Penguin 1974) Aristotle: On the Art of Poetry; Horace: On the Art of Poetry; Longinus: On the Sublime. Translated with an Introduction by T.S. Dortch Penguin Classics.
3. Culler, Jonathan, 1975, **Structuralist Poetics, Structuralism, Linguistics and the Study of Literature**, London.
4. Daiches, David, 1956, **Critical Approaches to Literature**, London - New York - Toronto.
5. Darusuprpta, 1975, **Penulisan Sastra Sejarah di Indonesia – tinjauan percobaan tentang struktur, tema, dan fungsi**, paper proyek Filologi, Leiden.
6. Hill, A.H., 1961, "Hikayat Raja-Raja Pasai", **JMBRAS**, Vol. 33, Pt 2, Singapore.
7. **Hikayat Hang Tuah**, 1908, Singapura.
8. **Hikayat Merong Mahawangsa**, 1968, Kuala Lumpur.
9. Hooykaas, C., 1937, **Over Maleische Literatuur**, Leiden (edisi baru 1947).
10. Hooykaas, Dr. C., 1951, **Perintis Sastra** (Terjemahan Raihoel Amar gl. Datoek Besar) Groningen, Djakarta.
11. Ibrahim Alfian, Teuku, 1973, **Kronika Pasai – sebuah tinjauan sejarah**, Yogyakarta.
12. Ismail Hussein, 1963, "Hikayat Negeri Johor", **DB**, VII, 8:341-51.
13. Jakobson, Roman, 1968, "Closing Statement: Linguistics and Poetics", In: **Style in Language**, ed. Th. A. Sebeok, Cambridge, (first ed. 1960).
14. Liaw Yock Fang, 1975, **Sejarah Kesusasteraan Melayu Klassik**, Singapura.

15. Mees, C.A., 1935, **De Kroniek van Koetai – Tekstuitgave met Toelichting**, Santpoort.
16. Muhammad Yusoff Haslim, 1980 Syair Sultan Maulana, Suatu Penelitian Kritis tentang Hasil Pensejarahan Melayu Tradisional, Kuala Lumpur.
17. Ras, J.J., 1968, **Hikayat Banjar, A Study in Malay Historiography**, disertai Leiden, 's-Gravenhage.
18. Ras, J.J., 1971, **Seminar Filologi**, Proyek Linguis, Leiden.
19. Rassers, W.H., 1922, *De Pandji – Roman*, Antwerpen.
20. Roolvink, R. 1954, "Hikayat Raja-Raja Pasai", **Bahasa dan Budaya**, II, 3, Lembaga Bahasa dan Budaya, Djakarta.
21. Sartono Kartodihardjo, 1968, "Segi-segi Struktural Historiografi" Indonesia, **Lembaran Sejarah**, 3, Fakultas Sastra dan Kebudayaan, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
22. Sartono Kartodihardjo, 1970, "Garis-Garis Pokok Pola Perkembangan Historiografi Indonesia", **Seminar Sedjarah Nasional II**, Yogyakarta.
23. Sulastin Sutrisno, 1979, **Hikayat Hang Tuah – Analisa Struktur dan Fungsi**, disertai UGM, Yogyakarta.
24. Supomo Surjohudojo, 1958, **Pembicaraan Kesusasteraan Sedjarah atau Babad**, Tesis Fak. Sastra dan Kebudayaan UGM, Yogyakarta.
25. Supomo Surjohudojo, 1962, "Tugas Penulis Babad", **K.I.P.N. II**, Seksi D (Sastra dan Budaja), Djakarta.
26. Sutjipto, F.A., 1977, "Unsur Sejarah dalam Sastra Sejarah", **Beletin Fakultas Sastra dan Kebudayaan**, 5, Yogyakarta.
27. Syakir, M., 1980/1981, **Tinjauan terhadap Penokohan Raja dalam Hikayat Raja-Raja Pasai**, Laporan Penelitian Proyek PPPT UGM, No. 117, Yogyakarta.

28. Teeuw, A. dan T.D. Situmorang, 1952, **Sejarah Melayu** (menurut terbitan Abdullah) Djakarta, Amsterdam.
  29. Teeuw, A. 1976, "Some remarks on the Study of so-called Historical Texts in Indonesian Languages" **Profiles of Malay Culture Historiography, Religion and Politics**, Ministry of Education and Culture – Directorate General of Culture.
  30. Winstedt, Sir Richard, 1969, **A History of Classical Malay Literature**, Kuala Lumpur, Singapore (first ed. 1940).
  31. Worsley, P.J., 1972, **Babad Buleleng, A. Balinese Dynastic Genealogy**, 's-Gravenhage.
  32. Zoetmulder, P.J. **Kawi dan Kakawian**, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.—
-

## STRUKTUR POLITIK DAN HISTORIOGRAFI TRADISIONAL

Oleh: F.A. Sutjipto

Fakultas Sastra dan Kebudayaan UGM.

Judul masalah tersebut menyarankan kepada kita untuk mencari hubungan antara struktur politik dan historiografi tradisional, atau dengan kata lain akan dicari seberapa jauh historiografi tradisional mencerminkan gambaran tentang struktur politik pada jamannya. Mengingat bahwa selain unsur politik historiografi tradisional juga mengandung unsur-unsur yang lain, yang dalam banyak hal sangat ditentukan oleh visi penulisnya, maka uraian ini akan dibagi menjadi dua sub permasalahan: pertama mengenai seluk-beluk sifat historiografi tradisional, dan yang ke dua mencari cerminan struktur politik yang terkandung di dalamnya.

Sebelumnya perlu dijelaskan bahwa yang akan dibahas disini adalah salah satu jenis historiografi tradisional, ialah historiografi tradisional yang hidup dalam masyarakat dan lingkungan kebudayaan Jawa, atau yang lazim disebut karya sastra Babad. Dengan demikian struktur politik yang dipantulkannya tentulah struktur politik yang terdapat dalam kerajaan Jawa, baik di pusat maupun di daerah. Dalam membahas sifat karya sastra Babad akan dipermasalahkan seperti: aneka ragam jenis Babad, kedudukan penulis (sasterawan, pujanagga), materi penulisan, historisitas Babad dan lainnya. Selanjutnya dalam membahas struktur politik akan ditunjukkan cerminnya dalam berbagai macam Babad dengan sejumlah kutipan-kutipan.

### 1. Karya sastra Babad.

- 1.1. Istilah karya sastra yang mendahului kata Babad telah menunjukkan bahwa Babad bukanlah tulisan



sejarah dalam pengertian sekarang. Karya ini lebih merupakan hasil kesenian, yang diciptakan oleh penulis-penulis atau sastrawan-sastrawan pada masa dahulu. Sastrawan tersebut meliputi sastrawan yang menjadi pegawai raja (lazim disebut pujangga), baik di istana pusat maupun di rumah-rumah (**dalem**) bupati daerah. Untuk menyebut beberapa Babad yang ditulis dilingkungan istana (kraton) adalah **Babad Pacina**<sup>1</sup>, **Babad Giyanti**<sup>2</sup>, **Babad Pakepung**<sup>3</sup> dan **Babad Sepei**<sup>4</sup>. Di samping itu terdapat sejumlah Babad daerah ( di sini hanya dipilih Babad daerah pesisir) seperti **Babad Nagari Semarang**,<sup>5</sup> **Babad Tuban**<sup>6</sup>, **Babad Gresik**<sup>7</sup>, **Babad Pasuruan**<sup>8</sup>, **Babad Besuki**<sup>9</sup> dan **Babad Blambangan**<sup>10</sup>. Serat-serat Babad yang lain hanya akan disinggung apabila diperlukan.

- 1.2. Penulis kitab-kitab Babad di istana pusat merupakan abdi raja (punggawa) dari bagian **kapujanggan**, yang memang ditugaskan oleh raja untuk menulis

- 
1. Babad Pacina, MS. Perpustakaan Sanabudaya Yogyakarta, No. A/129.
  2. Babad Giyanti, I, Batavia Sentrum, 1937.
  3. Babad Pakepung, MS. Perpustakaan Sanabudaya, no. 127.
  4. Babad Sepei, MS. Tepas. Kapujanggan Kraton Yogyakarta, no. 12 A (transkripsi Soedarto).
  5. Babad Nagari Semarang, MS. Perpustakaan Museum Kabupaten Sumenep (fotokpi pada Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo).
  6. Babad Tuban, edisi Boekhandel Tan Khoen Swie, Kediri, 1936.
  7. Babad Gresik, MS. Perpustakaan Radyapustaka Surakarta, No. 150.
  8. Babad Kitha Pasuruan, MS. (transkripsi pada Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo).
  9. Babad Basuki-Bandawasa, MS. Perpustakaan Museum Pusat Jakarta, BG. no. 333.
  10. Babad Blambangan (prosa), MS. Perpustakaan Universitas Leiden (LUB), LOr, 4087. Juga Babad Blambangan (puisi), MS. LUB. LOr, 2185.

berbagai macam karangan yang berhubungan dengan raja, istana dan kerajaan, seperti menulis sejarah kraton, menyusun silsilah raja dan para bangsawan, mencatat kejadian-kejadian penting dalam kraton, membuat ramalan, mengarang cerita wayang dan lain sebagainya.

Sebagai seniman sastrawan pujangga adalah bebas, namun kebebasan ini dibatasi oleh fungsinya sebagai abdi raja. Bahkan dalam banyak hal sifat penulisan lebih diarahkan untuk kepentingan dan kehormatan penguasa. Peranan-peranan dalam cerita Babad dipusatkan pada sekitar raja dan bangsawan kerabat kraton. Peranan di luarnya seperti yang menyangkut rakyat kecil (*kawula cilik*) tidak disinggung, kecuali apabila berkaitan dengan peranan tokoh atas. Cerita tentang peperangan banyak mewarnai Babad kraton. Dari kenyataan ini dapat diketahui bahwa pada umumnya kitab Babad menitikberatkan pada segi politik, perang dan keluarga atasan. Dalam hubungan ini perlu ditekankan bahwa Babad sebagai bentuk *historyografi* tradisional lebih banyak bercerita tentang proses dan bukan tentang struktur (*prosesual* dan struktur dalam pengertian ilmu sejarah). Hal ini penting untuk dikemukakan karena oleh panitya penulis makalah ini ditugaskan untuk menguraikan struktur (*politik*) dalam *historiografi* tradisional (*Babad*) yang sifatnya tulisannya lebih *prosesual*. Ini berarti harus menarik siratan-siratan struktur yang terkandung dalam cerita *prosesual*.

Sebenarnya ada serat-serat lain yang bukan *Bada*, yang bahkan secara khusus memberikan uraian tentang struktur politik kerajaan Jawa, seperti

Serat Pustaka Raja Puwara<sup>11</sup>, Serat Wadu Aji<sup>12</sup> dan Serat Raja Kapa-kapa<sup>13</sup>. Serat-serat ini membeberikan uraian tentang sistem wilayah, struktur jabatan dari atas sampai tingkat bawah beserta deskripsi tugas kewajibannya.

Kecuali istana pusat rumah-rumah atau **dalem-dalem** kabupaten juga melahirkan karya-karya sastra Babad. Kemegahan bupati beserta **dalem kabupaten** merupakan duplikasi dari raja dan kratonnya. Pujangga kabupaten mempunyai kesamaan fungsi dengan pujangga kraton. Dalam beberapa hal corak penulisan karya sastranya berpolakan Babad pusat. Perbedaannya hanya bersifat gradual dalam kehalusan bahasa dan keluwesan (tentu ini dipandang dari ukuran kraton).

- 1.3. Pujangga mengambil materi untuk penulisannya dari berbagai fihak: dari pengalaman dan pengamatan pribadi atau melalui informan mengenai kejadian-kejadian sejaman; dari bacaan yang tersimpan dalam perpustakaan dan arsip kraton (atau **dalem** untuk Babad daerah), yang memungkinkan pujangga mengenal kejadian-kejadian di luar, baik sejaman maupun masa lampau; dari tradisi yang hidup di dalam masyarakat sejaman; dari kepercayaan masyarakat sejaman atau masa lampau, seperti tentang mitologi, mistik, magi, agama, kekebalan, pulung, tuah, sakti, jimat, tenung, ramal, tafsir mimpi, makhluk-

---

11. Serat Pustaka Radja Puwara', lampiran II dari J. Brandes, "Register op de prozaomzetting van de Babad Tanah Djawi" (uitgave van 1874), VBG, LI, 1900.

12. 'Serat Wadu Adji', lampiran IV dari J. Brandes, *ibid.*

13. 'Serat Radja Kapa-kapa', lampiran III dari J. Brandes, *ibid.*

makhluk halus dan lain sebagainya.

Materi (bahan-bahan) tersebut mengendap dalam kesadaran pujangga untuk kemudian dituangkan ke dalam karya-karya sasteranya dengan ramuan-ramuan artistik dari bakat kesenimannya. Maka dalam karya sastra Babad hal-hal semacam itu kerap kali muncul di sana-sini disela-sela uraian prosual mengenai peranan tokoh-tokoh atasan. Kekebalan seorang tokoh, hubungan seorang tokoh dengan makhluk halus (*jim*, *peri-prayangan*), tuah dari pusaka kerajaan maupun senjata seorang senapati kerajaan bukan hal yang jarang kita jumpai dalam Babad. Demikian pula tanda-tanda alam (*ngalamat*) dihubungkan dengan peristiwa besar baik menyangkut diri raja, bangsawan tinggi, maupun kewibawaan kerajaan. Adakalanya ramalan dibubuhkan pada peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, tetapi sebenarnya telah terjadi (*post eventum*).

Keahlian pujangga membuat cerita menjadi hidup, bahkan pengetahuannya tentang wayang menjadi bahan untuk melukiskan secara indah (*nyandra*) keluhuran dan keperkasaan raja, keindahan istana dan perlengkapan pengiring raja, kesentausaan kerajaan dan sebagainya. Fakta-fakta keras (*hard facts*) dan kronologi tidak dapat mengekang kebebasan pujangga untuk mencipta. Semua materi harus tunduk kepadanya. Dalam batas tertentu ia hanya tunduk kepada penguasa yang menyuruhnya, karena sebagai seniman ia juga adakalanya melontarkan kritik tajam kepada raja kurang benar tindakannya, seperti tercermin dalam *Serat Wicara Keras*<sup>14</sup>. Dengan

---

14. 'Serat Wicara Keras', MS. Perpustakaan Sanabudaya, no. 127 (transkripsi Soedarto).

pengertian ini kekecewaan orang mengenai tak jelasnya waktu suatu peristiwa terjadi, kesimpang-siuran kronologi maupun anakronisme dapat diperkecil.

Bagaimanapun juga Babad tetap merupakan karya sastra yang bercorak sejarah, yang mempunyai dunia dan harga dirinya sendiri. Para filolog tidak memusingkan apakah peristiwa-peristiwa dan tokoh-tokoh itu fiksif atau historis. Yang penting adalah bahwa tokoh dan peristiwa itu berfungsi dan menghidupkan cerita keseluruhan dari karya sastra tersebut. Hanya sejarawanlah yang mempertanyakan historisitas dari unsur-unsur yang terkandung dalam karya sastra sejarah, baik menyangkut pelaku, waktu, tempat, peristiwa maupun proses kejadian. Keinginan tahu ini pun tidak perlu dipersalahkan, karena sejarawan berminat untuk mencari siratan-siratan historis yang tercantum dalam karya tersebut. Sikap ini didasarkan pada keyakinan bahwa tidak ada pujangga atau sasterawan menulis atau mencipta di ruang hampa, yang lepas sama sekali dari budaya lingkungan maupun jiwa jaman. Sebaliknya sejarawan yang akan menggunakan karya sastra sejarah sebagai bahan informasi perlu menyadari sifat-sifat dari karya tersebut dan dengan sabar mencoba memahami siratan-siratan historis yang mungkin ada di dalamnya, dengan tidak perlu memaki-makinya sebagai tidak berharga samasekali. Membuat identifikasi dengan memperbandingkan dengan sumber-sumber historis karenanya merupakan keharusan.

- 1.4. Untuk memperjelas uraian di atas perlu kiranya ditunjukkan secara konkrit contoh-contoh adanya ber-

bagai unsur materi yang tercermin dalam tulisan Babad. Unsur mitologi pada umumnya terdapat dalam Babad yang menceritakan peristiwa-peristiwa kuna seperti terdapat dalam bagian permulaan **Babad Tanah Jawi**<sup>15</sup>. Unsur kepercayaan kepada lelembut atau jim dari Laut Selatan diuntai dengan cerita kepahlawanan dan kesaktian Sultan Agung terdapat dalam **Serat Nitik Sultan Agung**<sup>16</sup>. Dalam **Babad Nagari Semarang** tercantum ramalan tentang tempat permukiman yang kelak akan menjadi pusat kekuasaan kerajaan Islam dan sekaligus menjadi pusat pengembangan agama Islam. Tempat tersebut adalah Glagah Arum (Glagah Wangi) atau Demak, sedangkan tokoh yang meramalkan adalah Sunan Ampel, kakek Raden Patah, raja pertama Demak<sup>17</sup>.

Demikian pula penunjukan tempat untuk pembangunan istana baru oleh suara gaib tercantum dalam **Babad Blambangan** (prosa), ialah waktu Pangeran Tawagalun akan membangun kraton Macanputih<sup>18</sup>. Tema mengenai nasehat suara gaib atau sabda dewa dalam hubungan dengan pemilihan tempat permukiman oleh seorang tokoh bangsawan

- 
15. 'W.L.Olthof, ed.', *Poenika Serat Babad Tanah Djawi* wiwit saking Nabi Adam doemoegi ing Taoen 1647, Nederlan ('s Garvenhage), 1941.
  16. 'Serat Nitik Sultan Agung', MS. Perpustakaan Sanabudaya, no. D/85.
  17. Dalam naskah peristiwa tersebut diceritakan sebagai berikut: "Anenggih ingkang pinethik, Kangjeng Sultan nagri Demak, Sultan Ngajibun Muluke, dhuk anom rahaden Patah, dhukuh wana Bintara, pan nenggih Gelagah Arum, punika dhinukuhan./ Agnya kang eyang sang resi, Jeng Susunan Ampeldenta, ing Surabaya kithane, kang wayah kinen dhadhekah, alas wana Bintara, timbalane Sang Wiku, Bintara cinetha benjang./ Dadya karaton aji, ratune Agama Islam", (lihat **Babad Nagari Semarang**, MS. Museum Kabupatcu Sumenep, hlm. 4).

dengan merambah hutan berulang kali dikemukakan dalam **Babad Tuban**<sup>19</sup>. Dalam hubungan ini pun masih perlu disinggung ramalan Tumenggung Anggawangsa mengenai tempat yang layak untuk mendirikan kraton baru di daerah Surakarta (Sala) seperti tersebut dalam **Babad Giyanti**<sup>20</sup>.

Tafsir mimpi yang merupakan budaya masyarakat dahulu oleh pujangga dituangkan ke dalam karya sasteranya dengan menghubungkan-hubungkan dengan peperangan dan tokoh-tokoh. Demikianlah misalnya penafsiran mimpi yang dianggap alamat buruk oleh Kyai Mahbub waktu pasukan Mataram yang dipimpin oleh Patih Natakusuma akan menyerang loji Kompeni di Semarang, seperti diceritakan dalam **Babad Pacina**<sup>21</sup>. Masih dekat dengan tafsir seperti itu adalah kebiasaan masyarakat dahulu memperhitungkan hari baik dan hari buruk untuk

---

<sup>18</sup> Dalam Babad disebut: "Eh anak prabu, isun wis weruh eng sakarepira. Wis sira muliha, lumakua ngalor wetan, yen ana macan putih mapag ing lakunira iku sira tunggangana. Ring ngendi nggone sira ketemu macan putih iku, ya iku diarani alas Sudimara. Sawuse macan iku sira tunggangi, mangko sira senelehaken, sarta macan putih iku sirna, iya iku sira gawea negara, arana negara Macanputih"; Babad Blambangan (prosa), MS. LUB. Lor. 4087. hlm. 4 dst.

<sup>19</sup> Anak Arya Bangah bernama Raden Arya Dandangmiring diceritakan telah didatangi "Sang Hyang Kanekaputra" yang menyarankan, agarsia kelak mendirikan negara sendiri dengan membuka hutan (lihat Serat Babad Tuban) (*anyariosaken sujarahipun para Bupati ing Tuban, wiwit panjenenganipun Sang Prabu Banjaransari, Narendra Binathara ing Nagari Pajajaran*), ed. Tan Khoen Swie, hlm. 3).

<sup>20</sup> Waktu raja Pakubuwana II meminta pendapat tumenggung Anggawangsa mengenai usul Van Hohendorff untuk mendirikan kraton di sebelah timur Bengawan Sala yang tanahnya sangat cocok, Anggawangsa menolaknya dengan mengatakan: "saking petang ulun, yen wonten wetan Bengawan, tiyang Jawi badhe wangsul Buda malih, tansah tukar lan rowang"; Babad Giyanti, I, hlm. 8-9. Akhirnya desa Sala dipilih untuk mendirikan kota kerajaan yang baru.

melakukan sesuatu. Demikianlah pujangga terpengaruh oleh pola-pola budaya yang berlaku dalam masyarakat pada jamannya. Ia adalah anak masyarakat, dibentuk oleh budaya jamannya dan melahirkan karya-karya yang mewarnainya.

- 1.5. Untuk menulis cerita-cerita sejarah (cerita Babad) pujangga memperoleh bahannya dari pengalaman dan pengamatan pribadi, terutama yang berhubungan dengan sejarah semasa dengan hidup pujangga. Bahan tersebut dapat juga diperoleh dari pembantu-pembantu staf kapujanggan yang sengaja ditugaskan untuk mengamati peristiwa (seperti untuk Babad mengenai peperangan), dan dapat juga dengan keterangan dari para pelaku (partisipan). Catatan-catatan peristiwa beserta uraiannya yang tersimpan dalam arsip kapujanggan merupakan sumber yang sewaktu-waktu dapat dijadikan bahan tulisan, terutama apabila ada perintah dari raja. Tulisan-tulisan singkat mengenai peristiwa penting dalam kraton, seperti: penobatan putera mahkota, pernikahan kerabat raja, bahkan khitanan putera-putera raja tidak lepas dari goresan pena catatan dari para pujangga di "tepas" (istilah yang digunakan di kraton Yogyakarta sekarang) kapunjanggan kraton. Demikian pula apabila raja sedang mengadakan perlawatan (besiar) ke suatu tempat peristirahatan atau tempat

---

<sup>21</sup> Dialog mengenai tersebut adalah sebagai berikut: "..... kula bapak inggih ngimpi wau dalu, katingal wonten dahana, dika bapak den purugi, ing geni lawan kawula, samya kesah ing geni nulya nututi, pedhang kula ngantos runtuh, anuli keris kula, aweh dika punika katingal runtuh, nulya jagad sadaya, bapak samya dadya geni ....."; Babad Pacina, MS. Sanabudaya. A/2, hlm. 75a. Mimpi tersebut menurut Kyai Mahbub sebagai alamat buruk, sehingga pemberangkatan pasukan untuk menyerang Semarang ditunda.



pemandian yang bersejarah, peristiwa itu dideskripsikan dengan **tembang** secara indah oleh pujangga yang biasanya merupakan Babad yang tipis. Babad **Clereng** yang ditulis pada masa Sultan Hamengkubuwana VIII, meskipun ditulis bukan oleh pujangga profesional, melainkan oleh seorang wanita kerabat kraton, adalah merupakan salah satu contoh tipe Babad tersebut<sup>22</sup>.

Tipe Babad yang merupakan catatan perjalanan ini cukup tinggi kadar historisitasnya. Sebagian besar yang diceritakan adalah faktual historis, yang sangat berbeda dengan cerita-cerita pujangga mengenai jauh masa lampau yang bahannya sangat samar-samar akan kebenaran historisnya atau mungkin hanya fantasi belaka. Di dalam Babad tipe catatan perjalanan unsur sastra hanya terlihat pada penyusunan kalimat dan kata yang indah yang dirangkai dalam bentuk puisi Jawa (**tembang**), disertai bumbu-bumbu pelukisan indah (**panyandra**) yang klise terhadap diri raja dan kerabatnya. Di bagian bumbu-bumbu keindahan ini pujangga memasukkan pola-pola ber-

---

<sup>22</sup>Serat Babad Clereng adalah karya Raden Ayu Mangunpraja. Transkripsinya pernah diterbitkan oleh Balai Penelitian Bahasa Yogyakarta, dalam *Widyaparwa*, nomer 13 tahun 1977. Terdiri dari 5 pupuh, 89 pada. Pada pupuh 1:1 disebut a.1: "Murweng kata rinenggeng partati, sru manawung lengkawaning cipta, Dya Ayu Mangunprajane, buyut dalem sang prabu, Kangjeng Sultan kang kaping katri, nagri Ngayogyakarta, kridhaning manggapus .....". Babad lain yang bersifat deskripsi atas peristiwa penting Kraton sejaman adalah: Babad Krama Dalem P.B. IX (puisi), MS. Radyapustaka Surakarta, no. 317. Babad Babad Madura, MS. Radyapustaka, no. 139a (berisi diutusny Png. Kusumayuda ke Madura (ke tempat kediaman Cakraningrat) untuk melamar, untuk perkawinan P.B. VII). Juga Babad Manton, MS. Resapustaka, no. 4 (memuat aturan dan acara-acara perkawinan puteri Mangkunegara VII B.R.A. Partinah dengan Mr.R.M. Subroto Moerdokusumo).

fikir dan kepercayaan orang Jawa seperti kepercayaan tentang dewa-dewi, tentang keindahan dunia dewa-dewa (**kahyangan, kaindra**), tentang magi raja dan juga tentang **panyandra** gaya pewayangan. Dalam **Babad Clereng** misalnya dilukiskan bahwa waktu akan berangkat dan memasuki kompleks **Magangan Sultan Hamengkubuwana VIII** nampak laksana raja **Harjunasasra** dari kerajaan **Maespati**<sup>23</sup>.

Untuk menulis cerita **Babad** yang mengenai peristiwa kuna, yang bahannya sangat samar dan cukup sulit bagi pujangga, ia menempuh jalan dengan mengutip tulisan-tulisan yang pernah ada, dengan memungut bahan-bahan dari cerita lisan atau bahkan ia menciptakan fakta-fakta fiktif untuk memperlengkapi bahan. Sudah disebutkan bahwa cerita-cerita sejarah kuna seperti terdapat dalam bagian permulaan **Babad Tanah Jawi** lebih banyak merupakan cerita yang mungkin diambil dari cerita tradisi dari mulut ke mulut. Keadaannya menjadi berubah setelah pujangga bercerita tentang peristiwa-peristiwa yang makin dekat dengan jamannya. Unsur referensial dari **Babad** makin nampak, meskipun seperti telah dikatakan di muka pujangga tidak selalu tunduk pada fakta yang sungguh-sungguh terjadi.

- 1.6. Masih ada satu hal yang perlu disinggung dalam usaha mengamati **Babad**: suatu hal yang bagi para

---

<sup>23</sup>Dalam naskah dilukiskan: "Ingayab-ayab para rum, wau Jeng Sri Narpati, kalamun cinandra kadya, Maha Prabu Mahespati, Narpati Harjunasasra, arsa cangkrameng wanadri./ Pra wadya andher supenuh, aneng Magangan sumiwi, kang arsa dherek miyosan, punakawan kang pinilih, ngampil-ampil upacara, wus sumaos aneng ngarsi"; **Babad Clereng, pupuh II : 8-9.**

filolog bukan merupakan masalah, tetapi bagi sejarawan cukup meminta perhatian. Yang dimaksud di sini adalah kekurang tepatan atau bahkan kekeliruan pujangga dalam menyebut nama-nama pelaku yang bukan pribumi, lebih-lebih mengenai nama orang Belanda, sehingga untuk itu perlu diberikan identifikasi.

Perubahan ucapan kata (*verbastering*) untuk nama pangkat dan nama orang-orang Belanda banyak terdapat dalam kitab-kitab Babad. Untuk menyebut beberapa contoh mengenai perubahan nama pangkat adalah: kata-kata "gurnadur", "deler", "ubrus" dan "sekeber" (identifikasi: "Gouverneur", "edelheer", "overste" dan "gezaghebber"). Untuk perubahan nama orang Belanda dapat ditunjuk antara lain nama-nama "Eglaret", "Paterlo" dan "Monte" (tersebut dalam *Babad Sepei*)<sup>24</sup>, "Hohendorep" (*Babad Giyanti*)<sup>25</sup>, "Jan Grepe", "Seldhi" (*Babad Pekpung*)<sup>26</sup>, "Semberek", "Kobis" dan "Kupegrun" (*Babad Blambangan*, puisi)<sup>27</sup>. Identifikasi nama tersebut berturut-turut adalah: P. Engelhard (Residen ke-8 di Yogyakarta, 25/2-1808 s/d 19/11-1808)<sup>28</sup>, M. Waterloo (Residen ke-7 di Yogyakarta, 16/8-1803 s/d 25/2-1808)<sup>29</sup>. H.W.

---

<sup>24</sup> *Babad Sepei* (transkripsi Soedarto), pada 108 dan 2502.

<sup>25</sup> *Babad Giyanti*, I, hlm. 8.

<sup>26</sup> *Babad Pakepung*, MS. Sanabudaya, no. 127, pada 53 dan 32.

<sup>27</sup> *Babad Blambangan* (puisi), LOr. 2185, pupuh XII: 21-34 pupuh XVI: 1-6, pupuh III: 9-12, pupuh XII: 40-46.

<sup>28</sup> P. Engelhard, (residen ke-8 di Yogyakarta) lampiran 5 dari Soekanto, *Sekitar Yogyakarta* (Djakarta/Amsterdam, 1952), hlm. 177.

<sup>29</sup> W. Waterloo, (residen ke-7 di Yogyakarta), *i b i d.*

Muntinghe (sekretaris Raffles), J.A. van Hohendorff (Komandan Kompeni yang bermarkas di istana Kartasura) 30, Jan Greeve ("Gouverneur van Java's Noordoostkust" (Gubernur pantai utara-timur Jawa) di Semarang, 18/9-1787 s/d 1/9-1791)<sup>31</sup>, W.H. van Ijsseldijk (Residen ke-5 di Yogyakarta, bulan September 1786 s/d permulaan 1799)<sup>32</sup>, W.H. van Ossenberch (Gubernur Semarang, 26/10-1761 s/d 13/5-1765)<sup>33</sup>, Erdwijn Blanke (semula Fetor di Jepara, pada masa Gubernur Ossenberch)<sup>34</sup>, Van Hogewitz (Komandan Kompeni di Pasuruhan,

---

<sup>30</sup>Dirk van Hohendorff adalah Komandan Kompeni yang ditugaskan untuk menjaga istana Kartasura. Mengenai peranannya lihat Catatan Harian Van Hohendorff, dalam A.K.A. Gijberti Hodenpijl, "Zwerftocht van Sultan P.B. II na dien vlucht uit den Kraton te Kartasura, op 30 Juni 1742", **BKI**, LXXIV (1918), pada Bijlage II.

<sup>31</sup>Jan Greeve adalah Gubernur Semarang setelah Johannes Siberg (lihat **Memorie van Overgave**, 1787: "Gouverneur en Directeur van Java's Noordoost-Kust Johannes Siberg aan Jan Greeve", MS. AN. no. 173. cf. Appendix I, pada M.C. Ricklefs, **Jogyakarta under Sultan Mangkubumi, 1749-1792** (London, 1974), hlm. 426. Soekanto, **Sekitar Jogyakarta** (Jakarta/Amsterdam, 1952, hlm. 176, pada lampiran 4.

<sup>32</sup>W.H. van Ijsseldijk, (residen ke-5 di Yogyakarta); lihat M.C. Ricklefs, **op.cit.**, Appendix I, hlm. 427; Soekanto, **op.cit.**, lamp. 5. hlm. 177.

<sup>33</sup>W.H. Ossenberch (Gouverneur van Java's Noordoostkust, 26/10-1761 s/d 13/5-1765), lihat **Memorie van Overgave**, 1761: "Gouverneur en Directeur van Java's Noordoost-Kust Nicolaas Hartingh aan Willem Hendrik van Ossenberch", MS. AN. no. 165. Cf. M.C. Ricklefs, **op.cit.**, Appendix I, hlm. 426; Soekanto, **op.cit.**, 4, hlm. 176.

<sup>34</sup>Erdwijn Blanke, "Capitein Commandant" yang ditunjuk Gubernur Johannes Vos untuk memimpin pasukan yang akan menyerang Blambangan. Semula ia adalah Fetor Jepara. Lihat "Missive van Java's Noord-Oost-kust, 15 Maart 1767", MS. **VOC Overgekomen Brieven**, ARA, no kode KA. 3107, hlm. 131. Lihat a.l. "Extract missive gesz: door den Commandant Blanke aan den ondergeteckende gouverneur (Johannes Vos) gedateert 31 Maart 1767".

1759)<sup>35</sup>, dan Coop a Groen (Gezaghebber di Surabaya, 30/7-1765 s/d 15/9-1769)<sup>36</sup>.

Dalam **Babad Pacina** terdapat nama "Pan Apel" yang identifikasinya tidak lain adalah Van Velzen (Komandan Loji Kompeni Kartasura)<sup>37</sup>. Juga terdapat perubahan ucapan nama-nama orang Cina seperti "pun Hepingbulung, pun Teyang, pun Hetik lawan pun Heso", juga "pun Etik, Sabuk Alu"<sup>38</sup> dan sebagainya yang sulit dicari identifikasinya.

Demikianlah terdapat banyak **verbastering** ucapan kata nama-nama tokoh yang menghendaki identifikasi. Sebenarnya bagi filolog tidak diwajibkan untuk memberi identifikasi historis atas nama-nama yang berubah itu,<sup>39</sup> tetapi bagi sejarawan merupakan keharusan untuk memberikan identifikasi pada nama-nama yang berubah. Pencantuman nama yang **verbasterd** begitu saja dalam uraian sejarah merupakan hal yang aneh dan lucu.

#### 1.7. Dari uraian di atas nampak jelas akan adanya unsur fiksi dan historis dalam karya sastra Babad. Makin

---

<sup>35</sup>Van Hogenwitz, Komandan Kompeni di Pasuruan, pada masa Gezaghebber Surabaya H. Breton; lihat G.H. von Faber, *Geschiedenis van Indie's eerste koopstad (Oud Soerabaia)* (Soerabaia, 1931, hlm. 403, lam p. no. 1.

<sup>36</sup>Coop a Groen, Gezaghebber Surabaya, 30/7-1765 s/d 15/9-1769, G.H. von Faber, *ibid.*, hlm. 403.

<sup>37</sup>Van Velzen, Komandan Kompeni Loji Kartasura, lihat **Babad Pacina**, MS. Sanabudaya, A.2, *passim*.

<sup>38</sup>**Babad Pacina**, *ibid.*, hlm. 51b, 77a.

<sup>39</sup>Namun Hoesein Dajadiningrat dalam proefschrift-nya **Critische Beschouwing van de Sadjarah Banten** (Leiden, 1913) juga memberikan identifikasi pada nama-nama asing yang berubah.

jauh dari masa si penulis, makin besarlah campur-tangan fiksi di dalam karyanya. Dalam tulisan yang menguraikan masa sejaman dengan penulis unsur historis cukup menonjol, meskipun fiksi masih merupakan hak istimewa penulis (pujangga, sasterawan) untuk menggunakannya, tidak peduli sejarawan mengeluh atau tidak karenanya. Ia menulis cerita sejarah (Babad) menurut caranya sendiri. Kenyataan inilah yang harus dihadapi para sejarawan yang akan menggunakan karya sastra Babad sebagai sumber sejarah.

Dengan persiapan pengertian ini penulis makalah akan memenuhi permintaan rekan koordinator panel untuk mencari hubungan antara struktur politik dan historiografi tradisional (dalam hal ini Babad Jawa). Di sini akan dicari unsur struktural (dalam pengertian ilmu sejarah) di dalam karya sastra Babad yang pada umumnya bersifat prosesual. Sifat struktural memang terdapat pada beberapa Babad, seperti Babad Blambangan (Prosa)<sup>40</sup>, yang biasanya hanya nampak pada uraian mengenai cabang-cabang dan ranting-ranting silsilah penguasa (raja atau bupati) dengan imbuhan bunga rampai cerita peristiwa yang menghidupkan peranan tokoh. Dalam keadaan ini uraian tentang struktur politik hanya tertulis dalam siratan-siratan cerita prosesual yang merupakan sifat umum dari karya sastra Babad. Uraian tentang struktur politik Mataram secara khusus bahkan tercermin dalam Serat-serat, yang memuat struktur birokrasi beserta tugas kewajiban

---

<sup>40</sup>Babad Blambangan (prosa), MS LUB. LOr, 4087.

masing-masing<sup>41</sup>, sistem wilayah<sup>42</sup>, sifat raja yang ideal<sup>43</sup>, piwulang untuk mempertebal loyalitas kawula terhadap raja<sup>44</sup>, pranatan<sup>45</sup>, angger<sup>46</sup> dan sebagainya. Namun demikian gambaran struktur politik kerajaan masih cukup terbayang dalam cerita Babad yang prosesusal.

## 2. Struktur politik dan karya sastra Babad

2.1. Sebelumnya perlu ditegaskan bahwa bukanlah maksudnya di sini untuk menganalisa struktur (dalam pengertian filologi) cerita salah satu karya sastra Babad dan memunculkan bagian-bagian tertentu yang menguraikan tentang struktur politik, tetapi sebaliknya bahasa ini akan bertolak dari pengan-

---

<sup>41</sup>Antara lain 'Serat Pustaka Raja Puwara', 'Serat Raja Kapa-kapa' dan 'Serat Wadu Aji', lampiran II, III dan IV dari J. Brandes, "Register op de proza-omzetting ....." VBG, LI, 1900.

<sup>42</sup>'Serat Pustaka Raja Puwara', loc.cit.

<sup>43</sup>Seperti tersebut dalam *Serat Rama* pada bagian yang disebut "Asta-Brata"; lihat Soemarsaid Moertono, *State and Statecraft*, hlm. 42, juga n. 81. Ditunjukkannya tulisan Jasadipura I, *Serat Rama* (Semarang, 1919), hlm. 432-435.

<sup>44</sup>*Serat Wulang Reh: Jasan Dalem Sri Susuhunan Pakubuwana IV*, Sala, tp. th. terbit.

<sup>45</sup>Sebagai contoh adalah: "Pranatan Dalem Ingkang Sinuwun kaping II, kala taksih jemeneng wonten Kartasura, bab kewajiban tuwin uruting kalenggahan patih dalem, akalian para Bupati sapangandhap", dalam *Buku Isi Tetedhakan Pranatan Dalem tuwin Serat Warni-warni tumrap Nagari Surakarta*, MS. Perpustakaan Museum Radyapustaka Surakarta, no. 165.

<sup>46</sup>Lihat antara lain Naskah *Angger-angger* (gancaran), MS. Perpustakaan Reksapustaka Mangkunegaran, no. A.6 (berisi: percakapan antara Adipati Danureja Papatih Yogyakarta dengan Adipati Sasradiningrat Papatih Surakarta, merundingkan tentang peraturan dan ketatanegaraan antara kedua kerajaan). Juga lihat *Angger-angger*, MS. Reksapustaka (tp. no.) (berisi: "angger Pradata, Angger Sadasa, Angger Ageng, Angger Gunung dan Angger Aru-biru").

daian keinginan untuk menguraikan struktur kerajaan Mataram (termasuk Surakarta dan Yogyakarta) dengan mempertanyakan seberapa jauhkah karya-karya sastra Babad yang ada dapat memberikan bahan informasi untuk maksud itu.

- 2.2. Jika demikian halnya maka pertama-tama perlu dibuat kerangka model mengenai struktur politik ataupun sistem politik umumnya<sup>47</sup> dari kerajaan Jawa (Mataram Islam). Kerangka itu dapat mempertanyakan berbagai macam aspek dari kerajaan, seperti: seluk-beluk yang mengenai ke-ratu-an (**kingship**) seperti: kemungkinan adanya sifat kedewaan dari raja (**thedivinity of kings**), masalah penggantian raja (**the royal succession**) dan lainnya; menteri-menteri dan dewan-dewan kerajaan (**ministers and councils**); masalah prinsip ketatanegaraan (**principles of statecraft**) yang menyangkut berbagai subtema seperti: pembagian politis wilayah kerajaan (**political subdivisions of the State**), mata-mata dan caranya (**spies and their methods**); status duta kerajaan (**the status of ambassadors**): kebijakan diplomasi dan taktik (**diplomatic policy and tactics**);

---

<sup>47</sup>Bahasa mengenai struktur politik maupun sistem politik keseluruhan dari kerajaan-kerajaan terdapat antara lain dalam buku S.N. Eisenstadt, *The Political System of Empires: The Rise and Fall of the Historical Bureacratc Societies*, New York/London, 1969; Peter C. Lloyd, "The Political Structure of Afrika Kingdoms: An Exploratory Model", dalam *Political Systems and the Distribution of Power*, edisi A.S.A. Monographs, 2, London, 1965. Juga lihat Gerhard E. Lenski, *Power and Priviledge: A Theory of Social Stratification*, New York, 1966. (Terutama mengenai Part I: "Agrarian Societies", hlm. 189 dst.) khusus mengenai "The State, the Ruler, and Social Inequality" (hlm. 210 dst.); "The Governing Classes: Variable Patterns and Their Causes" (hlm. 231); mengenai "The Retainer Classes" (hlm. 243 dst.); "Priestly Class" (hlm. 256 dst.); "The Artisan Class" (hlm. 278 dst.).



masa perang dan damai (**war and peace**); militer (prajurit) kerajaan (**the army**); etik perang (**ethic of war**); sistem kerajaan taklukan sebagai pembayar upeti (**the system of tributary states**) dan beberapa lainnya.

Selain itu masih dapat dibahas masalah-masalah: raja dan sistem ekonomi (**the king and the economic system**), yang menyangkut sub-tema seperti: teori perpajakan (**theories of taxation**); metode mengumpulkan pajak (**Methods of tax collection**); sumber penghasilan praja (**sources of income**); kas kerajaan dan administrasinya (**the treasury and its administration**); pemilikan tanah pribadi dan tanah raja (**private and royal ownership of land**), dan lainnya<sup>48</sup>.

Untuk keperluan pembahasan struktur politik (atau lebih luas sistem politik) dapat dikembangkan pola-pola lain yang tercermin juga dalam karya-

---

<sup>48</sup>Mungkin sekali metode ini pula yang dipergunakan rekan Soemarsaid Moertono dalam menulis karangannya: **State and Statecraft in Old Java: A Study of the Later Mataram Period, 16th to 19th Century**, Monograph Series Modern Indonesia Project, Cornell University, New York, 1968, yang tidak hanya menggunakan sumber Babad, tetapi juga Serat-serat lain non-Babad. Demikian pula tulisan M.N. Sinha, **The Development of Indian Polity**, Bombay: Asia Publishing House, 1963, yang menggunakan sumber karya-karya sastra India kuna seperti: **Rg. Veda, Arthasatra, Jataka** dsb. Juga tulisan John W. Spellman, **Political Theory of Ancient India: A Study of Kingship from the Earliest Times to Circa A.D. 300**, London, 1964, yang menggunakan kitab **Mahabharata, Ramayana, Atharya Veda** dan lainnya.

Dengan cara yang sama juga Bhaskar Anand Saletore, **Ancient Indian Political Thought and Institutions**, London, 1963; Jeannine Auboyer, **Daily Life in Ancient India: from Approximately 200 BC to 700 AD** (Translated from the French by Simon Watson Taylor), New York, 1968; Muhammad Asad, **The Principles of States and Government in Islam**, Berkley/Los Angeles, 1961. J.M. Gullick, **Indigenous Political Systems of Western Malaya**, University of London: The Athlone Press/New York: Humanities Press Inc., 1965.

karya Sastera Babad, seperti: Pola pemberian **triman**, baik dengan tujuan politis ataupun tidak; institusi **seba** bagi kepala-kepala daerah ke istana pusat; institusi **pepe**, sebagai protes halus, konsep penentangan dalam istilah **mirong kampuh jingga**; institusi penyerahan upeti (**asok glondhong penga-rengan**); sistem perang, seperti: **amuk punggung, jarah-rayah, putri boyongan, perang sinandi, telik sandi, asrah bongkolan, rampogan** dan lain sebagainya.

- 2.3. Selanjutnya di sini akan diberikan beberapa contoh operasional mengenai pengambilan unsur-unsur struktur politik yang tercermin dalam beberapa naskah Babad. Namun sebelumnya perlu disadari bahwa penggunaan pola atau model di atas adalah sekedar untuk pedoman guna memudahkan pemilihan bahan-bahan yang diperlukan. Bahan-bahan itu akan dikelompokkan ke dalam pola-pola yang sesuai. Namun demikian perlu diingat bahwa pola tidak boleh memaksakan pemilihan fakta. Bagaimanapun juga fakta yang tercantum dalam sumber Babad adalah esensiil dan dimenangkan. Apabila pola yang tersedia tidak mendapat dukungan fakta dalam Babad, maka pola itu harus dihapuskan. Sebaliknya apabila terdapat fakta-fakta baru yang belum terdapat polanya, dapat dibuatkan pola tambahan.
- 2.4. Beberapa pola sebagai contoh akan diajukan, seperti: **struktur birokrasi, sistem wilayah, hubungan pusat dan daerah, perkawinan politik, pemberian triman, dan sistem perang**, dengan diberikan kutipan-kutipan dari isi Babad yang sesuai. Adakalanya

satu pada (bait) isi Babad dapat mencerminkan satu, dua atau lebih pola-pola yang dicari (semua kutipan ditulis menurut ejaan sekarang).

**Contoh I: Kutipan dari Babad Pakepung:  
pupuh V:49.**

*Wus sami dipun dhawuhi, patih lam para wadana, ing jumangah panyekele, sampun winangsit sadaya, mantri gedhong keparak, kuneng prapteng mangsanipun, Jumungah kaliwon arinya.*

**pupuh V:51.**

*Nursaleh neng jro sinupit, aneng wismane urdenas, samana ta panyekele, Baheman neng wismanira, mantri krapyak Masaran, mantri majegan kang mikut, Bahman nggulung garo (n) jalan.*

*(terjemahan: Semua sudah diperintahkan, patih dan para wedana, penangkapannya pada hari Jum'at, sudah diberi instruksi semua, mantri Gedong dan Keparak, apabila sampai pada masanya, hari Jum'at Kliwon/Nursaleh dikurung di dalam, di rumah ordonnans, demikianlah menangkapnya, Bahman di rumahnya, mantri krapyak Masaran, mantri majeganlah yang menangkap, Bahman bergulung tidak keruan.*

Cerita prosesusal ini menceritakan saat-saat penangkapan-penasehat-penasehat istanayang pengaruhnya sangat menyesatkan Sunan Pakubuwana IV, ialah: Nursaleh, Bahman dan teman lainnya ialah Penengah dan Wiradigja. Bagi sejarawan yang akan

mencari struktur kerajaan ia tidak hanya tertambat pada isi cerita, tetapi mencoba menganalisis unsur-unsur yang mencerminkan struktur birokrasi, seperti pengertian tentang: patih, wedana, mantri gedong, mantri keparak, mantri krapyak dan mantri majegan.

Penulis (pujangga) **Babad Pakepung** cukup bercerita tentang jalannya peristiwa dan tidak berurusan apakah pembaca mengerti atau tidak akan nama-nama jabatan kerajaan itu, dan ia pun tidak perlu menjelaskan dalam cerita. Dalam hal ini sejarawanlah yang harus mengidentifikasi macam-macam jabatan birokrasi itu, tempat masing-masing dalam hierarki birokrasi dan tugas kewajibannya. Untuk itu harus dicari sumber lain untuk dapat menjelaskannya, seperti kitab **Pustaka Raja Puwara**, **Serat Raja Kapa-kapa** dan **Serat Wadu Aji** seperti tersebut dalam butir 1.2 di muka<sup>49</sup>.

Dari dua bait **Babad Pakepung** tersebut imajinasi historis sejarawan dapat terus dikembangkan dengan mempertanyakan seperti: siapakah sebenarnya keempat penggawa penasihat raja yang nasehatnya menyesatkan itu, yang dalam **Babad Pakepung** (pupuh I:3) disebut setan papat: " .... atemahan kawedhar tyasnya sang Aji, kenyut mring setan papat"<sup>50</sup> C. Poensen yang menggunakan sebuah Babad versi Yogyakarta dalam menguraikan Mang-

---

<sup>49</sup>Serat-serat itu dapat dilengkapi dengan ulasan-ulasan beberapa penulis, seperti: B. Schrieke, *Indonesian Sociological Studies*, II (Ruler and Realm in Early Java), The Hague/Bandung, 1957; G.P. Rouffaer "V orstenlanden", *Adatrechtsbundel*, XXXIV, 1931.

<sup>50</sup>Kritik Kyai Ngabehi Yasadipura II terhadap keempat orang penasihat raja itu juga terdapat dalam **Serat Wicara Keras** (pupuh I: 22-26).

kubumi, menyebutkan bahwa ke empat orang tersebut semula adalah **lebe (desa-geestelijken)**<sup>51</sup>. Jika ini benar permasalahan dapat terus dikembangkan, seperti: adakah promosi ulama desa menjadi penggawa tinggi kerokhanian di istana (**up ward vertical mobility**), apakah syarat-syaratnya. Bagaimanakah sistem pencalonan menjadi pejabat birokrasi kerajaan (**recruitment**), demikian seterusnya.

- 2.5. Dalam menjelaskan tentang **sistem wilayah** perlu dikutip isi dari naskah lain.

**Contoh II : Kutipan dari Babad Tanah Jawi:**  
(halaman 124).

*Kacarios pengeran ing Sura-Baya keklempakan kalian para bupati bang wetan, kang dereng kereh ing Matawis, apirembagan, sumedya mbedhah ing Matawis.*

*(terjemahan): Dikisahkan pangeran Surabaya berkumpul dengan para bupati bang wetan yang belum dikuasai oleh mataram, berunding untuk menaklukan Mataram).*

Istilah **bang wetan** dalam **tembang** dikemukakan tanpa penjelasan. Namun jelas bahwa yang dimaksud **bang wetan** adalah wilayah pantai di sekitar Selat Madura, termasuk Surabaya, Pasuruhan, Gresik, Sedayu, Prabalingga, Besuki, bahkan juga Sumenep, Pemekasan, Sampang dan Bangkalan. Ini perlu dijelaskan dalam hubungannya dengan sistem pembagian wilayah kerajaan Mataram secara konsen-

---

<sup>51</sup>C. Poensen, "M angkoeboemi, Ngajogyakarta s'eerste Soeltan", BKI, LII, 1901.

tris yang terdiri dari kuthanegara (kuthagara), negara agung, mancanegara kulon, mancanegara wetan, pesisiran kulon dan pesisiran wetan<sup>52</sup>. Dalam sistem ini wilayah bang wetan adalah termasuk wilayah pesisiran wetan. Pancaran sentrifugal kekuasaan pusat kerajaan ke wilayah ini lebih lemah dibandingkan dengan yang terasa di daerah dekat pusat, seperti daerah negara agung.

Tema lain tercermin juga dalam kutipan satu pada tembang di atas, ialah: tipe penentangan penguasa-penguasa daerah (para bupati) terhadap kekuasaan raja pusat dengan membentuk suatu persekutuan. Dalam konteks kondisi pusat dapat dipertanyakan lebih lanjut: Mengapa penguasa-penguasa daerah bang wetan waktu itu menentang kekuasaan raja pusat; apakah kekuasaan pusat kerajaan sedang mengalami kemerosotan karena raja terlalu lemah atau sebaliknya terlalu sewenang-wenang atau karena intrik-intrik antar bangsawan, demikian seterusnya. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini perlu digali fakta-fakta kejadian atau siratan-siratan di baliknya yang terdapat dalam sejumlah naskah Babad dan Serat-serat lain yang relevan.

- 2.6. Untuk selanjutnya dicoba untuk mengungkap cerminan atau siratan tentang sistem perang dalam Babad, terutama yang berhubungan dengan konsep: mbedhah praja mboyong putri dan konsep jarah-rayah.

**Contoh III : Kutipan dari Babad Tanah Jawi:**

*Antawis wolung wulan malih kangjeng sultan*

---

<sup>52</sup>Lihat tulisan-tulisan pada catatan 49.

*dhawuh mbedhah ing Pasuruhan. Inggah kautus Tumenggung Marta-Laya, kakanthenan bala ing Matawis sepalih. Ing Pasuruhan inggih sampun kelampahan bedhah; estri sarta raja-brana binoyongan (hlm. 126).*

*(terjemahan: Selang delapan bulan lagi Kangjeng Sultan memerintahkan untuk menaklukan Pasuruan. Yang disuruh adalah Tumenggung Martalaya, disertai prajurit Mataram separo. Pasuruan telah berhasil ditaklukkan. isteri-isteri (wanita-wanita) serta harta kekayaan diangkut).*

*Kala semanten Kangjeng Sultan perentah dhateng tumenggung Jaya-Supanta ndikakaken mbedhah ing Tuban. Inggih sampun kelampahan. Ing Tuban raja brananipun jinarahan, esteri binoyongan, sami kabekta dhateng ing Matawis (hlm. 128).*

*(terjemahan: Pada waktu itu Kangjeng Sultan memerintahkan Tumenggung Jayasupanta untuk menaklukan Tuban dan sudah terlaksana. Harta kekayaan Tuban dirampas, isteri-isteri (wanita-wanita) diangkut, semua dibawa ke Mataram).*

Sistem perang orang Jawa dengan melakukan perampasan harta kekayaan penguasa lain yang ditaklukkan, disertai pengangkutan wanita-wanita tidak hanya tercantum dalam berbagai cerita Babad, tetapi juga dalam cerita-cerita pewayangan; ini merupakan kebudayaan perang orang Jawa zaman dahulu. Demikian pula pembagian barang rampasan

perang kepada para prajurit merupakan kebiasaan sebagai balas jasa atas jerih payah dan resiko peperangan.

Membunuh musuh secara bersama-sama (**rompogen**) juga merupakan cara berperang pada masa dahulu. Untuk ini baiklah di sini diambilkan contoh dari isi salah satu Babad.

**Contoh IV : Kutipan dari Babad Pakepung:  
pupuh I : 96.**

*Wicanteno wau ki ngabehi, Yasadipura mbesuk  
yen aprang, Penengah Bahman Nursaleh, yen  
nora bisa ika, metokaken geni sawukir, rom-  
pogen saking wuntat, gawea patiku, agawe ru-  
wedding jagad, bisa nggelar penggulunge nora  
bangkit, rusak angajak-ajak.*

*(terjemahan: Berkatalah Ngabehi Yasadipura,  
besok kalau dalam peperangan Penengah,  
Bahman dan Nursaleh tidak dapat mengeluarkan  
api sebesar gunung, hendaklah kamu kerebut  
(rompogen) dari belakang dan bunuhlah.  
[Mereka] membuat dunia menjadi ruwet, da-  
pat mengatakan tetapi tidak dapat melakukan  
dan mengajak rusak).*

Kata **rompogen** banyak digunakan dalam nas-  
kah Jawa maupun dalam pewayangan yang artinya  
merebut ; atau menyerang bersama-sama atau  
beramai-ramai dengan menggunakan senjata. Istilah  
ini juga dapat diketemukan dalam kebiasaan yang  
berlaku di kerajaan Mataram dahulu, ialah **rom-**



pogan macam<sup>53</sup> (membunuh harimau secara beramai-ramai oleh para prajurit di alun-alun).

- 2.7. Masih ada dua sistem lagi yang akan dikemukakan di sini sebagai contoh, ialah sistem triman dan seba dalam rangka memupuk loyalitas terhadap kekuasaan pusat. Dalam hubungannya dengan kerajaan Mataram hal ini banyak muncul di dalam naskah-naskah Babad. Untuk mengambil beberapa contoh akan dikutipkan bait-bait dari Babad Kitha Pasuruan dan Babad Tanah Jawi.

Contoh V : Kutipan dari Babad Kitha Pasuruan: pupuh II : 10.

*Sakehe para Kumpeni, pan samya rakit sadaya,  
Jeng Pangran [ yang dimaksud adalah pangeran  
Panular] langkung asihe, dhumateng Ki Adipatya,  
lajeng wau ta ginanjar, wanodya ayu pinunjul,  
garwane PangranPribadya.*

pupuh II : 11.

*Awasta Dyanayu, nanging sih nandhang wawra-  
tan, iku kang pinaringake, kocapa Ki Adipatya,  
sakelangkung bingahira, nulya pinerahaken  
[pinrenahaken] sampun, wonten ing dhusun  
Garudha.*

pupuh II : 12.

*Hanjuring [Banjuring] kanda sepalih, saestu  
Kangjeng Pangeran, amunderma ngeterake,*

---

<sup>53</sup> Mengenai rampogan harimau lihat antara lain: Dagregister van den Wel Edelen Achtbaaren Heer Johannes Robbert van der Burgh Gouverneur en Directeur op en langs Java's Noord Oost-Kust etc. behelsende het hoofdzakelijkste voor gevallen gedurende zijn Wel Ed. optogt, naar verblijf aldaar en terugkomst van de bovenlandsche hooven van den keyser, MS. AN, Jakarta, kode Djokja 45 (Register hari Kamis, tanggal 30 Juli 1770).

*maring wadiya [wanodya] punika, satuhune garwanira, nenggih Kanjeng Sinuwun, ing Mataram Kartasura.*

*(terjemahan: pupuh II:10. Semua orang Kompeni, sudah lengkap hadir, Kangjeng Pangeran sangat menaruh kasih kepada Ki Adipati [yang dimaksud adalah Bupati Pasuruan Adipati Nitinegara], maka kemudian ia diberi hadiah seorang wanita yang sangat cantik, isteri Pangeran itu sendiri.*

*pupuh II:11. Ia bernama Raden Ayu Beri. Tetapi wanita yang dihadiahkan ini masih berisi (mengandung). Ki Adipati sangat senang hatinya dan wanita itu segera ditempatkan di desa Garuda.*

*pupuh I:12. Menurut kata setengah orang, sebenarnya Kangjeng Pangeran sekedar mengan-tarkan wanita itu. Sesungguhnya wanita itu adalah isteri dari Sri Susuhunan Mataram di Kartasura).*

Apakah yang dapat diambil dari kutipan Babad tersebut. Kutipan itu menerangkan adanya puteri Kraton, ialah isteri Susuhunan Mataram Kartasura, bernama Raden Ayu Beri, yang diberikan sebagai **trima** kepada Bupati Pasuruan Adipati Nitinegara. Namun wanita itu telah mengandung. Meskipun demikian Bupati tersebut tepat merasa bahagia karena mendapat anugerah dari raja. Selama wanita itu belum melahirkan Nitinegara tidak diperkenankan menggaulinya (ini disebutkan dalam bait selanjutnya, ialah pupuh II:13-15): " ... mangkana wau we-

lenge, ing benjang lamun mbabar, anenggih putranira, poma-poma wekasingsun, sira namanana Radyan./ ... karena tabesuk kiye, kang nurunaken para Radyan, ing nagari Pasuruan, lan malih ing wekasingsun, sadurunge mbabar uga./ Lan aja sira saresmi, hiya lawan garwanira, ....”

**Terjemahan:** ”.... demikian pesannya, besuk kalau sudah melahirkan anakmu, saya pesan sungguh-sungguh supaya anak itu diberi sebutan Raden .... karena besuk ialah yang menurunkan para Raden di Pasuruan, dan lagi pesan saya, sebelum melahirkan kamu tidak boleh bersetubuh dengan isterimu ....”.

Imajinasi historis dapat memperkembangkan rekonstruksi interpretatif sebagai berikut: Pemberian **triman** bekas isteri raja kepada Bupati daerah Pasuruan tidak lain adalah untuk mengeratkan hubungan kekuasaan pusat dengan kekuasaan daerah. Anak yang lahir dari Raden Ayu Beri jelas bukanlah putera Bupati Pasuruan, tetapi adalah putera raja Mataram. Raden Garuda, demikianlah nama anak yang lahir di desa itu, adalah merupakan wakil raja di daerah. Ayahnya adalah seorang raja, sedang ibunya juga isteri raja, meskipun kemudian dihadiahkan menjadi isteri Bupati daerah. Bupati Pasuruan kini bukan orang lain, tetapi ada hubungan keluarga dengan raja Mataram. Setidak-tidaknya ia sekarang menjadi bapak tiri putera raja. Ia menjadi dekat dengan kekuasaan pusat.

Sistem ini juga dapat diketahui dalam peristiwa lain, misalnya mengawinkan Raden Prasena dari Madura dengan adik raja, juga perkawinan antara Pangeran Pekik Surabaya dengan adik raja (Sultan

Agung) bernama Ratu Pandansari, seperti tercantum dalam bait-bait Babad sebagai berikut:

**Contoh VI : Kutipan dari Babad Tanah Jawi:**

*Pangeran Madura teluk serta mbekta tiyang sewu, sanesipun saking punika sami lumajeng sedaya. Bala Matawis nenten bodhol mantuk dhateng ing Matawis, serta mbekta pangeran Madura, kaaturaken ing Kangjeng Sultan. Kangjeng Sultan sekelangkung asih dahteng pangeran Madura, dipun kramani adhi, kada-dosaken wedananipun pulo ing Madura sedaya. (Hlm. 129).<sup>54</sup>.*

(terjemahan: *Pangeran Madura takluk dengan membawa seribu orang pengikut, sedang lainnya melarikan diri. Pasukan Mataram telah berangkat ke Mataram dengan membawa Pangeran Madura. Sri Sultan menaruh kasih kepada Pangeran Madura dan mengawinkannya dengan adik raja dan diangkat untuk mengepalai seluruh pulau Madura).*

*"Yayi ing Sura-Baya, mulane sira sun-timbali, wus pines thi karsa ning Allah, sesotya iku tumrap ing embanan. Upamane ing sun pan-*

---

<sup>54</sup>Cf. tulisan HJ. de Graaf, "De opkomst van Raden Troenodjojo", Djawa, XX (1940), hlm. 57 (mengenai Raden Prasena yang setelah dikawinkan dengan puteri kraton lalu diangkat menjadi Wedana untuk seluruh pulau Madura dengan gelar Pangeran Cakraningrat (I).

Dari perkawinan antara Pangeran Pekik dan Putri Pandan Sari lahirlah seorang anak perempuan, yang kemudian dikawinkan dengan putera Sultan Agung yang setelah menjadi raja bergelar Sunan Amangkurat I. Selanjutnya dari perkawinan ini lahir seorang putera yang kemudian dijadikan putera mahkota dengan gelar Adipati Anom (pada masa Perang Trunajaya), yang setelah menjadi raja bergelar Sunan Amangkurat II.

*curan, sira kang minangka telaga. Upamane  
ingsun isi, sira kang minangka wadhahe.*

*Dese tegese: wue pinesthi karsa ning Allah, yen  
sira bakal milu nurunake para ratu ing tanah  
Jawa, ananging sira kang urun wadon, ingsun  
kang urun lanang. Dene karsaningsun ing saiki  
sira wismaa ana ing Mataram, ngenggonana ing  
Mataram kene, yayi, aja taha-taha, iya ing Ma-  
taram, ya ing Sura-Baya, panganggepmu padha-  
nen bae'.....*

*mBteon antawis lami pangeran Pekik lajeng  
katariman ing rayi sang prabu, kang nama ratu  
Pandhan-Sari. Atut nggenira palakrama (hlm.  
133-134).*

*(terjemahan: "Adinda dari Surabaya, sebabnya  
engkau saya panggil adalah karena sudah men-  
jadi kehendak Allah, permata (embanan).  
Misalkan saya air mancur, engkaulah telaganya.  
Andaikan saya isi, engkaulah tempatnya.  
Adapun maknanya: sudah menjadi kehendak  
Allah, bahwa engkau akan turut menurunkan  
para raja di tanah Jawa, tetapi engkaulah yang  
menyediakan fihak perempuan, saya yang me-  
nyediakan fihak laki-laki. Adapun maksudku  
hendaklah engkau sekarang bertempat tinggal  
di Mataram, menempati Kadipaten.....*

*Di Mataram hendaklah adinda jangan ragu-ragu,  
anggaplah sama di Mataram ataupun di Sura-  
baya".....*

*Tidak lama kemudian Pangeran Pekik menda-  
pat triman adik sang Raja yang bernama Ratu*

*Pandansari, dan kelihatan rukunlah perkawinan mereka).*

Sudah disebutkan bahwa sistem triman tidak lain adalah untuk mengeratkan hubungan antara raja dengan tokoh penguasa penerima triman. Apabila pemberian itu ditujukan kepada penguasa daerah (Bupati daerah) tidak lain adalah untuk mengeratkan hubungan antara pusat dan daerah. Pemantapan kesetiaan penguasa daerah kepada raja pusat antara lain dipelihara dan ditampung dalam institusi seba, yang mengharuskan penguasa-penguasa daerah untuk menghadap raja pada hari-hari *garebeg*<sup>55</sup>. Institusi seba dengan upeti-upeti daerah sebagai tanda kesetiaan (*loyalty*) sekaligus digunakan sebagai cara pengawasan (*means of control*).

- 2.8. Demikianlah telah dikemukakan beberapa contoh tentang pengungkapan cerminan-cerminan struktur politik kerajaan Mataram yang terdapat dalam sejumlah karya sastra Babad (historiografi tradisional

---

<sup>55</sup>Mengenai keharusan Bupati daerah untuk menghadap raja Mataram pada saat-saat tertentu antara lain tercantum dalam Kontrak antara Kompeni dan Sunan Pakubuwana II tertanggal 11 Nopember 1743, yang antara lain terdapat kata-kata : Sunan berjanji dan memberi kesanggupan atas usul Kompeni untuk memberikan persetujuan kepada Bupati Madura Pangeran Cakraningrat (IV), apabila Pangeran itu menyerahkan Kabupaten Sedayu kepada anak-anaknya, tetapi Bupati Sedayu seperti halnya bupati-bupati pesisir lainnya diharuskan bersumpah setia kepada Sunan dan Kompeni, juga tiap tahun pada bulan Maulud ia diharuskan menghadap Sunan ("..... jaarlyks op Herri Moelut ten hove te compareren"). Mengenai teks lengkap kontrak ini lihat: J.K.J. de Jonge, *De Opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indie*, IX, hlm. 434 dst., pada judul "Articulen van reconciliatie, vrede - vrienden bondgenootschap tusschen de Doorlugtige Nederlandsche Oost-Indische Compagnie ter eenre enden Soesoehoenang Pacoeboeana ter andere zyde. ...."

Jawa). Bahwa dalam menghadapi isi uraian naskah Babad diperlukan sikap kritis (**textual oriticism**) dianggap sudah sewajarnya, sehingga tidak perlu mendapat tempat khusus untuk dipermasalahkan dalam masalah ini.

### 3. Kata akhir

Dalam hubungan dengan penggunaan karya sastra Babad sebagai sumber sejarah pernah ada beberapa filolog, bahkan juga sejarawan, yang memberikan peringatan bahwa: "Sebelum karya sastra sejarah diteliti secara ilmiah oleh filolog, janganlah digunakan oleh sejarawan sebagai sumber sejarah". Peringatan (pepeling) ini cukup baik dan simpatik, sehingga sepatasnya perlu disambut dengan gembira dan rendah hati disertai ucapan sangat setuju. Namun sebaliknya kenyataan yang ada sangat menimbulkan rasa keprihatinan. Sudah selang hampir 70 tahun yang lalu, sejak Hoesein Djajadiningrat menggarap disertasinya: *Critiche beschouwing van de Sadjarah Banten*, proefschrift Leiden, 1913, tulisan-tulisan ilmiah para filolog mengenai historiografi tradisional masih sangat terbatas jumlahnya. Di antara jumlah yang terbatas itu sebagian besar tulisan disertai diarahkan pada karya-karya sastra sejarah di luar Jawa, dalam bentuk hikayat-hikayat, kronik-kronik, Babad Bali dan lainnya.

Tulisan ilmiah setingkat disertai mengenai Babad Sunda oleh filolog jumlahnya pun dapat dihitung dengan jari tangan sebelah. Dalam karamaian penelitian ini Babad Jawa (Jawa Tengah dan Jawa Timur) dapat dikatakan tidak pernah tersentuh. Sebuah Babad daerah Jawa Timur (*Babad Blambangan*, puisi, LOr. 2185) kini sedang digarap oleh seorang rekan filolog dari Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada untuk karya disertai, yang berhasilnya sangat diharapkan.

Melihat keadaan yang demikian ini orang mungkin akan bertanya, harus menunggu berapa lama lagi Babad-babad dalam jumlah terbatas yang disajikan dalam masalah ini dikerjakan secara ilmiah oleh para filolog, sehingga Babad-babad tersebut benar-benar "steril" dan aman untuk digunakan sebagai sumber sejarah dalam menyusun masalah ini. Lalu bagaimanakah nasib Babad-babad yang lain yang jumlahnya sangat banyak, baik mengenai Babad kraton, Babad daerah Negara-agung, Babad Mancanegara dan Babad Pesisiran?

Selama keadaan masih seperti ini kiranya masih dapat dibenarkan langkah yang diambil oleh sejarawan-sejarawan seperti H.J. de Graaf, M.C. Ricklefs dan Peter Carey yang dengan tekun menggunakan karya-karya sastra Jawa, baik Babad maupun Serat-serat lain, sebagai sumber untuk tulisan-tulisan sejarahnya.

Sebagai akhir kata penulis masalah menghimbau agar tidak lama lagi akan lahir karya-karya ilmiah para filolog mengenai Babad-babad Jawa. Semogalah.

Yogyakarta, 10 Oktober 1981.



**Lampiran I**

**KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 26/A.I/1981  
TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PENGARAH DAN PENANGGUNG JAWAB  
PENYELENGGARAAN SEMINAR KESEJARAHAN DI JAKARTA  
DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa salah satu kegiatan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional adalah mengadakan Seminar Kesenjaraan di Jakarta;
  - b. bahwa untuk dapat tercapainya trtib kerja yang berdaya guna dalam penyelenggaraan Seminar tersebut, maka dipandang perlu membentuk "Panitia Pengarah dan Penanggung Jawab Penyelenggaraan Seminar Kesenjaraan di Jakarta".
- Mengingat :**
- 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
    - a. Nomor 44 Tahun 1974;
    - b. Nomor 45 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1981;
    - c. Nomor 47 Tahun 1979;
    - d. Nomor 237/M Tahun 1978;
    - e. Nomor 14 A Tahun 1980 beserta penyempurnaannya;
  - 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
    - a. Nomor 0222 e/0/1980 tanggal 11 September 1980;
    - b. Nomor 0122/P/1981 tanggal 7 April 1981;
  - 3. Surat Pengesahan DIP Tahun Anggaran 1981/1982 Nomor 462/XXIII/3/1981 tanggal 12 Maret 1981.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :**
- 1. Membentuk "Panitia Pengarah Seminar" dengan tugas mengarahkan serta menyelesaikan sesuatu agar penyelenggaraan Seminar Kesenjaraan mencapai hasil yang diharapkan.
  - 2. Panitia tersebut pada ayat 1 pasal ini mempunyai anggota sebagai tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :**
- Mengangkat Penanggung Jawab Penyelenggaraan Seminar Kesenjaraan yang bertugas mengadakan persiapan pelaksanaan dan penyelesaian Seminar Kesenjaraan serta segala sesuatu yang berhubungan dengan Seminar Kesenjaraan yang namanya seperti tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :**
- Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang disediakan dalam DIP Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional tanggal 12 Maret 1981 Nomor 462/XXIII/3/1981.

- KEEMPAT** : Apabila pelaksanaan Seminar Kesenjangan telah selesai, Panitia Seminar dianggap bubar, dan kewajiban Ketua Panitia Seminar menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan tugasnya serta pertanggungjawaban keuangan kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.
- KELIMA** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa Keputusan ini berlaku selama 3 bulan mulai 1 Agustus 1981.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 17 Juli 1981.  
DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN,  
ttd.

Prof. Dr. Haryati Soebadio

NIP. 130 119 123

#### SALINAN KEPUTUSAN INI

Disampaikan kepada:

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Negara,
4. Semua Menteri Koordinator,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen Dep. P. dan K.,
8. Inspektur Jenderal Dep. P. dan K.
9. Kepala BP3K Dep. P. dan K.,
10. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
11. Semua Dirjen dalam lingkungan Dep. P. dan K.,
12. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen, dan BP3K dalam Lingk. Dep. P dan K.,
13. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingk. Dep. P. dan K.,
14. Semua Kepala Kanwil Dep. P. dan K. di Propinsi,
15. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
16. Semua Gubernur Kepala Daerah Tk. I.,
17. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Dep. P. dan K.
18. Dit. Perbendaharaan dan Belanja Negara Ditjen Anggaran Dep. Keuangan,
19. Ditjen Anggaran,
20. Ditjen Pajak,
21. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara/Kantor Pembantu Perbendaharaan Negara,
23. Badan Pemeriksa Keuangan,
24. Ketua DPR-RI,
25. Komisi IX DPR-RI,
26. *Ybs. untuk seperlunya.*

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tatalaksana  
Direktorat Jenderal Kebudayaan.

ttd

Sutarso, SH

NIP. 130186291

**LAMPIRAN** Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan Departemen  
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  
Nomor : 26/A.1/1981  
Tanggal : 17 Juli 1981.

**Daftar Susunan Keanggotaan Panitia Pengarah dan Penanggung Jawab  
Penyelenggaraan Seminar Kesejahteraan di Jakarta**

**PELINDUNG:**

1. Prof. Dr. Haryati Soebadio — Sebagai Pelindung;

**PANITIA PENGARAH:**

1. Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo — Sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. Dr. S. Budhisantoso — Sebagai Wakil Ketua merangkap anggota;
3. Drs. Anhar Gonggong — Sebagai Sekretaris;
4. Prof. Dr. Nugroho Notosusanto — Sebagai Anggota;
5. Dr. R.P. Suyono — Sebagai Anggota;
6. Drs. Bastomi Ervan — Sebagai Anggota;
7. Drs. Buchari — Sebagai Anggota;
8. Drs. Uka Tjandrasasmita — Sebagai anggota;
9. Drs. Abdurachman Surjomihardjo : Sebagai anggota.  
Sutrisno Kutouo — Sebagai Penanggung Jawab Penyelenggara.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tatalaksana  
Direktorat Jenderal Kebudayaan

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 17 Juli 1981  
**DIREKTUR JENDERAL KEBU-  
DAYAAN**

ttd.

Sutarso S.H.

NIP. 130186291

ttd

Prof. Dr. Haryati Soebadio

NIP. 130119123

## Lampiran II

### DAFTAR PESERTA SEMINAR SEJARAH NASIONAL III.

#### I. PANITIA PENGARAH

1. Prof. Dr. Haryati Soebadio — Pelindung
2. Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo — Ketua/Anggota
3. Dr. S. Budhisantoso — Wakil Ketua/anggota
4. Drs. Anhar Gonggong — Sekretaris
5. Prof. Dr. Nugroho Notokusanto — Anggota
6. Dr. R.P. Suyono — Anggota
7. Drs. Bastomi Ervan — Anggota
8. Drs. Buchari — Anggota
9. Drs. Uka Tjandrasasmita — Anggota
10. Drs. Abdurrachman Suryomihardjo Anggota

#### II. PANELIS

1. Dr. S. Budhisantoso
2. Dr. Taufik Abdullah
3. Dr. Kuntowijoyo
4. Dr. Edi Ekadjati
5. Drs. Amir Ruchiatmo
6. Prof. Dr. Mattulada
7. Dr. Nico Kana
8. Drs. Mudardjito
9. Prof. Dr. Harsya W. Bachtiar
10. Dr. Steve Jawanao
11. Dr. T. Ibrahim Alfian
12. Dr. Onghokham
13. Dr. Yang Aisyah
14. Prof. Dr. Nugroho Notokusanto
15. Dra. Mona Lohanda
16. Dra. Sumartini
17. Prof. Dr. Sulastin Sutrisno
18. Dr. Sri Wulan Rudjiati
19. Dr. Ayat Rochaedy
20. Drs. F.X. Sutjipto
21. Dr. Nico L. Kalangie

#### III. Sekal-Sekal:

##### Sekal Pra Sejarah

1. Dr. R.P. Suyono — Ketua
2. Drs. Goenadi Nitihaminoto — Anggota/pembawa naskah
3. Drs. Hary Truman Simanjuntak : Anggota/pembawa naskah
4. Drs. D. Suryanto — Anggota/pembawa naskah
5. Drs. Haris Sukendar — Anggota/pembawa naskah
6. D.D. Bintarti — Anggota/pembawa naskah
7. Dr. R.P. Suyono — Anggota/pembawa naskah
8. Drs. Santoso Soegondo — Anggota/pembawa naskah
9. R. Budi Santosa Azis — Anggota/pembawa naskah

10. Ny. Nios A. Subagus — Anggota/pembawa naskah
11. J. Ratna Indraningsih Panggabean : Anggota/pembawa naskah
12. Drs. I Made Sutaba — Anggota/pembawa naskah
13. Drs. Nyoman Purusa Mahaviranata — Anggota/pembawa naskah
14. Dra. Ayu Kusumawati — Anggota/pembawa naskah
15. Dra. Sumiati Atmosudiro

#### Seksi Sejarah Kuno

16. Drs. Buchari — Ketua
17. Drs. I Gde Semado Astra — Anggota/pembawa naskah
18. Drs. M.M. Sukarto K. Atmodjo — Anggota/pembawa naskah
19. Dra. Ricadiana Kartakusumah — Anggota/pembawa naskah
20. Drs. Bambang Budi Utomo — Anggota/pembawa naskah
21. Dra. Sri Soejatmi Satari — Anggota/pembawa naskah
22. Drs. Moh. Umar — Anggota/pembawa naskah
23. Drs. Yanto Ditjosuwondo — Anggota/pembawa naskah
24. Drs. Nur Abbas — Anggota/pembawa naskah
25. Edhie Wuryantoro — Anggota/pembawa naskah
26. D.S. Setya Wardhani — Anggota/pembawa naskah
27. Drs. Buchari — Anggota/pembawa naskah
28. Drs. Rusyay Padmawidjaja — Anggota/pembawa naskah

#### Seksi Sejarah Pasca Kuno

29. Drs. Uda Saputrasasmita — Ketua
30. Drs. P.J. Suwarno, SH — Anggota/pembawa naskah
31. Ahmad Adaby Dahlan — Anggota/pembawa naskah
32. Sagimun M.D — Anggota/pembawa naskah
33. Tawalinuddin Haris — Anggota/pembawa naskah
34. H. Abdullāh Tayib, BA — Anggota/pembawa naskah
35. Drs. H. Ramli Nawawi — Anggota/pembawa naskah
36. Drs. Fendy E.W. Parengkuan — Anggota/pembawa naskah
37. Drs. Aminuddin Kasdi — Anggota/pembawa naskah
38. Drs. A.A. Gde Putra Agung — Anggota/pembawa naskah
39. Dra. Marledily Asmuni — Anggota/pembawa naskah
40. M. Th. Naniek Harkantning-sih — Anggota/pembawa naskah
41. Drs. Moch. Hudan — Anggota/pembawa naskah
42. Drs. Ma'mun Abdullāh — Anggota/pembawa naskah
43. Drs. E. Kosim — Anggota/pembawa naskah
44. Drs. Sa'uki Hadiwardoyo — Anggota/pembawa naskah
45. Drs. Da'ud Limbu Galu — Anggota/pembawa naskah
46. Drs. G. Moedjahto, MA — Anggota/pembawa naskah

#### Seksi Sejarah Penjajahan Kolonial

47. Drs. Dpt Sirkira/Dr. T. Ibrahim Alfani — Ketua
48. Drs. Suhartono — Anggota/pembawa naskah

- 49. Firdaus Burhan — Anggota/pembawa naskah
- 50. Drs. Nasief Chatib — Anggota/pembawa naskah
- 51. Drs. Imam Hilman — Anggota/pembawa naskah
- 52. Ida Bagus Sideman — Anggota/pembawa naskah
- 53. Drs. H. Siahaan — Anggota/pembawa naskah
- 54. Drs. A.A. Bagus Wirawan — Anggota/pembawa naskah
- 55. Drs. Suwardi, MS — Anggota/pembawa naskah
- 56. Dra. Tiurma L. Tobing — Anggota/pembawa naskah
- 57. Drs. Hollius Syamsuddin, MA — Anggota/pembawa naskah
- 58. Drs. R.Z. Leirissa — Anggota/pembawa naskah
- 59. Dra. Julianti Parani — Anggota/pembawa naskah
- 60. Drs. Didi Suryadi — Anggota/pembawa naskah
- 61. Drs. M. Idwar Saleh — Anggota/pembawa naskah
- 62. Drs. Rosad Amidjaja — Anggota/pembawa naskah
- 63. A.M. Djulianti Suroyo — Anggota/pembawa naskah
- 64. Moh. Noor ARS — Anggota/pembawa naskah
- 65. Drs. Djoko Utomo — Anggota/pembawa naskah

#### **Sekal Sejarah Pergerakan Nasional**

- 66. Drs. Abdurrahman Suryosuraba — Ketua
- 67. Tengku Lukman Sinar, SH — Anggota/pembawa naskah
- 68. Dra. Soekesi Soemoatmodjo — Anggota/pembawa naskah
- 69. Wardiningsih Soerjohardjo — Anggota/pembawa naskah
- 70. Drs. Rusdi Sufi — Anggota/pembawa naskah
- 71. Drs. Mardanas Safwan — Anggota/pembawa naskah
- 72. Drs. Yusmar Basri — Anggota/pembawa naskah
- 73. Dra. Irna Hanny Hadisuwito — Anggota/pembawa naskah

#### **Sekal Sejarah Mutakhir**

- 74. Prof. Dr. Nugroho Notosusanto — Ketua
- 75. H.A.M. Effendy, SH — Anggota/pembawa naskah
- 76. Drs. Gazali Usman — Anggota/pembawa naskah
- 77. I Gde Putu Gunawan — Anggota/pembawa naskah
- 78. Drs. Suranto Sutanto — Anggota/pembawa naskah
- 79. J.R. Chaniago, Drs — Anggota/pembawa naskah
- 80. Drs. Adisusilo S.J. — Anggota/pembawa naskah
- 81. Ariwiadi — Anggota/pembawa naskah
- 82. Tri Wahyuning Mahrus Irsyam, SS — Anggota/pembawa naskah
- 83. Husain Haikal — Anggota/pembawa naskah
- 84. Drs. Sutopo Sutanto — Anggota/pembawa naskah
- 85. Tanu Suherly — Anggota/pembawa naskah
- 86. J. Yogaswara — Anggota/pembawa naskah
- 87. Drs. Anhar Gonggong — Anggota/pembawa naskah
- 88. Susanto Zuhdi — Anggota/pembawa naskah
- 89. Amrin Imran — Anggota/pembawa naskah
- 90. Saleh A. Djamhari — Anggota/pembawa naskah
- 91. Masfar R. Hakim — Anggota/pembawa naskah
- 92. M. Idwar Saleh — Anggota/pembawa naskah
- 93. Moela Marboen — Anggota/pembawa naskah

### Lampiran III

## LAPORAN HASIL SEMINAR SEJARAH NASIONAL III

### PENGANTAR

Seminar Sejarah Nasional III dengan tujuan memasyarakatkan kesadaran bersejarah melalui penggalakan penelitian, penulisan, dan publikasi sejarah secara baik telah diselenggarakan pada tanggal 10 sampai dengan 13 November 1981 di Jakarta.

Seminar telah membahas 17 makalah dalam sidang-sidang panel dan 86 dalam sidang-sidang seksi, dengan perincian sebagai berikut:

#### A. SIDANG PANEL

Sidang-sidang panel telah membahas:

1. *Etnohistori* dengan 4 makalah yang terdiri dari:
  - a. "Etnohistori Sebagai Pendekatan Sejarah di Indonesia", oleh Dr. S. Budhisantoso.
  - b. "Studi Kasus Komuniti Sebagai Pendukung Penulisan Sejarah Nasional" oleh Dr. N.S. Kalangie
  - c. "Pengkajian Teks Lisan Sebagai Sumber Sejarah" oleh Dr. Stephanus Djawanai.
  - d. "Etnoarkeologi: Peranannya dalam Pengembangan Arkeologi Indonesia", oleh Drs. Mundardjito.

Kesimpulan: Mengingat keanekaragaman masyarakat dan kebudayaan Indonesia dan jangkauan masa sejarah yang sangat luas, sementara itu tradisi tulis menulis dan sumber sejarah masih sangat terbatas, maka dirasa perlu untuk mengembangkan konsep-konsep, metodologi dan cara pengumpulan data yang mampu menggali dan memanfaatkan berbagai sumber sejarah yang tidak tertulis baik yang berupa teks lisan maupun lain-lain.

Atas dasar kenyataan tersebut, maka pendekatan etnohistori perlu diselenggarakan secara terarah, khususnya dalam mengungkapkan sejarah kelompok etnis sebagai bagian dari masyarakat-masyarakat bangsa.

Sedang etnoarkeologi dirasa perlu dalam usaha memahami sejarah asal-usul, perkembangan, persebaran dan pembauran kebudayaan bangsa di masa lampau sebagaimana bercermin dalam kebudayaan materil.

2. *Historiografi Tradisional* dengan 5 makalah yang terdiri dari:
  - a. "Struktur Politik dan Historiografi Tradisional" oleh Drs. F.A. Sutjipto.
  - b. "Kebudayaan Setempat dan Historiografi Tradisional" oleh Dr. Sri Wulan Rudjiati Mulyadi.
  - c. "Sastra dan Historiografi Tradisional" oleh Prof. Dr. Sulastin Sutrisno.
  - d. "Tokoh dan Historiografi Tradisional: Studi Kasus Tokoh Dipati Ukur" oleh Dr. Edi S. Ekajati.
  - e. "Peranan Benda Purbakala dalam Historiografi Tradisional" oleh Dr. Ayatrohaedi.

Kesimpulan: Historiografi Tradisional sebagai satu jenis penulisan sejarah yang disusun secara tradisional, berbeda dengan historiografi modern, karena ia berlandaskan pada pengertian dan pandangan penulis tentang sejarah dan kebudayaannya. Oleh karena itu pengkajian tulisan

sejarah tradisional yang penting artinya bagi penulisan sejarah nasional, khususnya dalam mengungkapkan nilai-nilai budaya, gagasan utama dan keyakinan yang melatarbelakangi peristiwa-peristiwa sejarah.

3. *Sejarah Lokal* meliputi 3 makalah, yaitu:

- a. "Di sekitar Sejarah Lokal di Indonesia" oleh Dr. Taufik Abdullah.
- b. "Sebelah catatan Tentang Bagaimana Lokalnya Sejarah Lokal" oleh Dr. Ibrahim Alfian.
- c. "Sejarah Lokal" oleh Dr. Onghokham.

Kesimpulan: Penulisan sejarah lokal sangat penting artinya dalam menyusun sejarah nasional mengingat perkembangan masyarakat yang beragama sebelum dan sesudah terbentuknya negara kesatuan Indonesia. Kerajaan-kerajaan besar maupun kecil yang pernah berkembang dan banyaknya masyarakat kesukuan serta perkauman yang mengalami sejarah di lokalitas masing-masing, memerlukan pendekatan penulisan sejarah yang lebih banyak memperhatikan keadaan setempat dengan dinamikanya masing-masing.

4. *Sejarah Lisan* meliputi 3 makalah yang terdiri dari:

- a. "Wawancara Simultan: Suatu Eksperimen Dalam Sejarah Lisan" Oleh Prof. Dr. Nugroho Notosusanto.
- b. "Sumber Sejarah Lisan Dalam Penulisan Sejarah Kontemporer Indonesia" oleh Dra. Mona Lohanda.
- c. "Kegunaan Sejarah Lisan Dalam Penulisan Sejarah Nasional" oleh Dr. Kuntowijoyo.

Kesimpulan: Kelangkaan sumber dokumenter mendorong sejarawan untuk mencari sumber lisan. Untuk penulisan sejarah mutakhir terutama sejarah revolusi, pengumpulan sumber lisan sudah sangat mendesak untuk dilakukan, karena semakin jauh jarak waktu yang semakin surut usia serta daya ingat para pelaku sejarah, akan semakin sukarlah penggaliannya. Dikhawatirkan bahwa sumber sejarah lisan itu akan punah sebelum berhasil direkam.

B. SIDANG SEKSI

Sidang-sidang seksi telah membahas:

1. *Prasejarah* yang meliputi 14 makalah (lihat lampiran daftar makalah).
  2. *Sejarah Kuno*: meliputi 12 makalah (lihat lampiran daftar makalah)
  3. *Sejarah Abad XVI — XVIII* meliputi 15 makalah (lihat lampiran daftar makalah).
  4. *Sejarah Abad XIX — Masa Perlawanan Terhadap Penjajah*, meliputi 16 makalah (lihat lampiran daftar makalah).
  5. *Sejarah Awal Abad XX — Perguruan Nasional* meliputi 10 makalah (lihat lampiran daftar makalah).
  6. *Sejarah Mutakhir* meliputi 19 makalah (lihat lampiran daftar makalah).
- C. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sidang-sidang seksi telah menyimpulkan bahwa jarak antara Seminar Sejarah Nasional II dan III terlalu jauh, sehingga tampak adanya kesenjangan mutu antara makalah yang ditulis oleh para peserta Senior dan peserta junior.

Adapun kesimpulan dari masing-masing seksi ialah sebagai berikut:



## 1. PRASEJARAH

- a. Beberapa makalah mengungkapkan data baru yang penting untuk melengkapi sejarah manusia dan kebudayaannya. Pada masa prasejarah di Indonesia.
- b. Sebagian makalah membahas keadaan masyarakat masa kini yang masih hidup dengan tradisi prasejarah (etnoarkeologi).
- c. Dari pembahasan ternyata terdapat kesinambungan unsur-unsur kebudayaan prasejarah yang melintasi batas kurun waktu Indonesia Hindu, Indonesia Islam dan berlanjut sampai masa kini.

## 2. SEJARAH KUNA

- a. Tampak kemajuan dalam penelitian Sejarah Kuna, ternyata dibahasnya temuan-temuan baru, dan munculnya tafsiran-tafsiran baru atas sumber yang telah tersedia.
- b. Munculnya muka-muka baru yang di antaranya baru pertama kali tampil dalam forum nasional, tetapi telah menunjukkan karya ilmiah yang cukup bermutu.
- c. Adanya beberapa makalah yang mutunya agak kurang, yang diajukan oleh peserta dari daerah, yang rupa-rupanya amat kekurangan sumber kepustakaan sebagai bahan referensi.
- d. Nampak kurangnya perhatian terhadap penggunaan sumber-sumber naskah kuna, baik yang membahas segi-segi prosesusual, maupun segi struktural Sejarah Kuna Indonesia.
- e. Dari makalah-makalah yang diajukan tampak bahwa para peneliti sejarah kuna dihambat oleh kurang tersedianya hasil-hasil penelitian filosofis, khususnya, mengenai naskah-naskah yang berkenaan dengan pemerintahan, hukum, keagamaan, peraturan tentang tingkah laku bagi golongan-golongan masyarakat, dan lain-lain.

## 3. SEJARAH ABAD XVI — XVIII

- a. Di antara 14 makalah, hanya ada lima yang mengungkapkan data-data baru yang penting bagi memperkaya pengetahuan Sejarah Indonesia, yaitu mengenai masuk dan proses perkembangan Islam di Bima, Lombok, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Bali.
- b. Masuk dan proses perkembangan Islam di Indonesia menimbulkan perubahan sosial-budaya dan pergeseran kekuasaan. Walaupun demikian tetap terdapat kesinambungan sosial-budaya yang berdiri Indonesia.

## 4. SEJARAH ABAD XIX/MASA PERLAWANAN TERHADAP PENJAJAH

Minar dan peran-serta dalam penulisan dan pembahasan sejarah abad XIX sangat besar, namun demikian kritisisme historis belum mendapat perhatian yang serius. Di samping itu masalah pendekatan atau kerangka acuan masih belum mendapat tempat dalam sebagian besar makalah.

## 5. SEJARAH AWAL ABAD XX/PERGERAKAN NASIONAL

Beberapa makalah yang dibahas mengenai sejarah awal abad XX dan Pergerakan Nasional menunjukkan adanya penguasaan metodologis dan kemampuan penulisannya.

## 6. SEJARAH MUTAKHIR

Nampak besarnya minat masyarakat terhadap sejarah kutakhir, sehingga menuntut kecermatan dan peningkatan kemampuan metodologis dalam penelitian dan penulisan sejarah.

### Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan di atas maka diajukan saran-saran

nam sebagai berikut:

- a. Agar Seminar Sejarah Nasional diselenggarakan secara bersinambung sekurang-kurangnya 4 tahun sekali.
- b. Agar topik yang hendak dibahas ditentukan terlebih dahulu, sehingga masalahnya lebih terpusat dan lebih banyak waktu untuk pembahasan. Selanjutnya saran dari masing-masing saksi ialah sebagai berikut:

#### 1. PRASEJARAH

- a. Untuk menyempurnakan/memantapkan kronologi prasejarah Indonesia, penggunaan metode pertanggalan radiometris sangat diperlukan.
- b. Untuk menyusun perkerangkaan prasejarah Indonesia berdasarkan pada sosial ekonomi, diperlukan peningkatan penelitian paleo-ekologi yang terpadu.
- c. Penyebarluasan pola sosial ekonomi dalam perkerangkaan prasejarah Indonesia perlu ditingkatkan pola pendidikan mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi.

#### 2. SEJARAH KUNA

- a. Diharapkan kepada pemerintah, cq. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, untuk menyediakan perpustakaan yang memadai bagi Universitas dan Institut yang mempunyai jurusan Sejarah dan Arkeologi, khususnya majalah-majalah ilmiah dalam kedua bidang tersebut. Baik dari dalam maupun dari luar negeri.
- b. Disarankan agar pemerintah memberi rangsangan bagi para ahli filologi untuk menggarap naskah-naskah kuna sebagai sumber informasi bagi penelitian dan penulisan sejarah dan arkeologi Indonesia.

#### 3. SEJARAH ABAD XVI — XVIII

Peningkatan penelitian sejarah abad XVI — XVIII dirasa perlu untuk dilakukan secara lebih mendalam dengan memperhatikan sumber-sumber informasi dan metodologi yang sesuai, sehingga dapat mengungkapkan sejarah secara objektif.

#### 4. SEJARAH ABAD XIX/MASA PERLAWANAN TERHADAP PENJAJAH

- a. Dirasa perlu peningkatan penelitian dan penulisan sejarah perlawanan terhadap penjajah dari seluruh daerah di Indonesia, sehingga hasilnya dapat dipetik untuk dijadikan bahan guna menanamkan semangat patriotisme dan cinta tanah air bagi segenap lapisan masyarakat bangsa Indonesia.
- b. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, diperlukan penyusunan bibliografi yang menyangkut sejarah dan kebudayaan dari setiap daerah yang antara lain memuat daftar makalah yang terdapat dalam majalah-majalah seperti *IMT*, *TNI*, *TBG*, *BKI*, dan lain-lain.
- c. Hendaknya diusahakan pula bahan-bahan arsip yang penting untuk penulisan sejarah suatu daerah.

#### 5. SEJARAH AWAL ABAD XX/PERGERAKAN NASIONAL

Agar makalah-makalah yang baik segera diterbitkan untuk disebarluaskan kepada masyarakat.

#### 6. SEJARAH MUTAKHIR

Agar makalah-makalah yang baik segera diterbitkan untuk disebarluaskan kepada masyarakat.

Jakarta, 13 Nopember 1981

Tim Perumus Seminar Sejarah Nasional III

## Lampiran IV

### Daftar Masalah Sumber Sejarah Nasional III

#### I. MAKALAH SEKSI PRA SEJARAH:

1. Tradisi Megalitik pada Makam Islam/Asta Tinggi Sumenep, oleh Drs. Goenadi Nitihaminoto.
2. Tradisi Masa Perundagian pada Masyarakat Batak, oleh Drs. Harri Truman Sinanjuntak.
3. Watu Kandang Matesih: Arti pentingnya dalam Masa Perundagian, oleh Drs. D. Suryanto.
4. Peninggalan Megalitik khususnya tentang kubur Batu Megalitik Terjan, oleh Drs. Haris Sukendar.
5. Moko sebagai salah satu unsur penting masa perundagian, oleh DRA. D.D. Bintarti.
6. Masalah-masalah kronologi Prasejarah Indonesia, oleh Dr. R.P. Suyono.
7. Awal perdagangan gerabah di Indonesia, oleh Drs. Santoso Soegondo.
8. Tinjauan tentang tradisi kapal perimbas-penetak di Indonesia, oleh Drs. R. Budi Santosa Azis.
9. Tradisi serpih bilah di Indonesia, oleh Dra. Ny. Nies A. Subagus.
10. Situs kubur tempayan di Anyer, Jawa Barat, oleh Drs. J. Ratna Indraningsih.
11. Bentuk-bentuk megalit di Pura Bukit Mentik di desa Buwahan Kintamani, Bangli, oleh Drs. I Made Sutaba.
12. Pola penguburan sarkofagus di desa Tigawasa Buleleng, oleh Drs. Nyoman Purusa Mahaviranata.
13. Peninggalan tradisi masa perundagian di Sumba Timur, oleh Drs. Ayu Kusumawati.
14. Tradisi masyarakat bercocok tanam di Liwolere, Larantuka, Nusa Tenggara Barat, oleh Dra. Sumiati Atmosudiro.

#### II. MAKALAH SEKSI SEJARAH KUNO

1. Teori tentang asal usul Ratu Qi Sang Ajnadevi, oleh Drs. Gde Made Astra.
2. Betulkah Artasura Retna Bumi Banten seorang raja Bali yang murka dan hina oleh Drs. M.M. Sukarto K. Atmodjo.
3. Rakryan Sanjiwana, oleh Dra. Richadiana Kartakusumah.
4. Timbul dan berlanjutnya pemukiman di daerah Kediri, oleh Drs. Bambang Budi Utomo.
5. Sejarah Batang Kuno dan sekitarnya. Studi wilayah Sejarah Lama, oleh Drs. Moh. Oemar.
6. Mithos Ratu Adil Jawa sebagai usaha motivasi penyatuan kembali Kerajaan Jengala, oleh Drs. Yanto Dirjosuwondo.
7. Peninggalan Hinduisme di Aceh, oleh Drs. Nur Abbas.
8. Wanua I Tpi Siring, data prasasti jaman Balitung, oleh Drs. Edhi Wurjantoro.
9. Sri Jayawarsa Digjaya Sastraprabhu, oleh Dra. D.S. Setya Wardani.
10. Ulah pemungut pajak dalam masyarakat Jawa Kuno (Faudulent tax officials in ancient Javanese Society), oleh Drs. Buchari.
11. Candi Cangkuang dan permasalahannya, oleh Drs. Rusyai Padmawidjaja.
12. Kerajaan Kuantan, oleh Dra. Marlaely Asmuni.

### III. MAKALAH SEKSI SEJARAH ARAB KE-16 -- 18

1. Sejarah Kauman Yogya. Sebuah Studi perubahan Sosial, oleh Ahmad Adaby Darban.
2. Sombaopu, Bungaya dan beberapa kesalahan dalam penulisan sejarah, oleh Sagimun M.D.
3. Sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Lombok, oleh Tawalinuddin Haris.
4. Sejarah masuk dan berkembangnya agama Islam di Bima, oleh H. Abdullah Tayib, B.A.
5. Perkembangan agama Islam di Kalimantan Selatan sampai akhir abad ke-18, oleh Drs. H. Ramli Mawawi.
6. Pengaruh penyebaran agama Islam terhadap kehidupan sosial politik di daerah Sulawesi Utara, oleh: Drs. Fendy E.W. Parengkuan.
7. Peranan kepurbakalaan Islam untuk memahami kedatangan dan persebaran Islam di Jawa, oleh Drs. Aminuddin Kasdi.
8. Sejarah masuknya Islam di Karangasem Bali, oleh Drs. A.A. Gde Putra Agung.
9. Faham keislaman dan perkembangan politik dalam masa kerajaan Islam di Demak, oleh Drs. Moch Hudan.
10. Caatan singkat tentang Masyarakat kota Banten Lama abad ke-16, oleh Dra. M. Th. Naniek Harkantingsih.
11. Masuk dan berkembangnya agama Islam di daerah Sumatera Selatan; suatu tinjauan historis, oleh Drs. Ma'mun Abdullah.
12. Pertumbuhan idem kekuasaan Jawa: Studi kasus Kerajaan Matram pada masa pertengahan abad XVIII, oleh Drs. Sauki Hadiwardoyo.
13. Masa pertumbuhan dan perkembangan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, oleh Drs. Daud Limbu Gau.
14. Pergeseran kekuasaan dalam sejarah Mataram, oleh Drs. G. Moedjanto, MA.

### IV. MAKALAH SEKSI MASA PERLAWANAN TERHADAP PENJAJAH

1. Beka! dan Gerakan sosial: Kasus Srikaton Surakarta 1888, oleh Drs. Suhartono.
2. Interpretasi positif atas pengaruh Inggeris Bengkulu, oleh Firdaus Burhan.
3. Perlawanan Sultan Mangkurat terhadap Belanda di Mandiling, oleh Drs. Nazief Chatib.
4. Peristiwa pembunuhan Asisten residen Nagel tahun 1845, oleh Drs. Imam Hilman.
5. Perang Kusamba 24-Mei 1949, oleh Ida Bagus Sidemen.
6. Keterlibatan Belanda dalam percaturan politik di Kalimantan Barat pada abad ke-19, oleh Drs. H. Siahaan.
7. Pupufan Klungkung 28 April 1958. Perlawanan terhadap penjajah, oleh Drs. A.A. Bagus Wirawan.
8. Perlawanan Raja Haji Marhum Telok Ketapang-Malaka menghadapi Belanda (1782 - 1784), oleh Drs. Suwardi MS.
9. Pengristenan Tanah Batak pertemuan dua kepentingan (Usaha mempertahankan Hababatahon dan kolonialisme Belanda) oleh Drs. Tiurma L. Tobing.
10. Perang Ngali dan Perang Sapugara di pulau Sumbawa tahun 1908, oleh Drs. Helius Syamsuddin, M.A.
11. Raja Jailolo (1811 - 1932). Gerakan Nativisme di Maluku, oleh Drs. R.Z.

Leirissa.

12. Tradisi lokal dan penemuan sejarah Buton. Dra. Julianti Parani.
13. Pemberontakan Petani di Tangerang 1924, Drs. Didi Suryadi
14. Wajib kerja di Keresidenan Kedu pada abad ke-19, oleh A.M. Djulianti Suroyo.
15. Pangeran Parigi dari Kerajaan Pasir, oleh Noor Ars.
16. Pemogokan Buruh ten. di Yogyakarta tahun 1882, oleh Drs. Djoko Utomo.

#### V. MAKALAH SEKSI PERGERAKAN NASIONAL.

1. Tuhan Sang Nahuatu Raja Siantar, oleh Tengku Lukman Sinar S.H.
2. Sekolah Kartini suatu usaha untuk menyebarkan dan meningkatkan kecerdasan wanita pada permulaan abad ke XX, oleh Drs. Sukesi Soemoatmodjo.
3. Dua Radicale Concentric; Sebuah perbandingan, oleh Wardiningsih Soerjohardjo, SS.
4. Pengaruh Pendidikan Barat terhadap kedudukan ekonomi Uleebalang di Aceh oleh Drs. Rusdi Sufi.
5. Beberapa pengalamari wawancara untuk menulis sejarah perintis kemerdekaan oleh Drs. Mardanan Safwan.
6. Pelaksanaan Sejarah Lisan dalam penelitian sejarah pemberontakan De Zeven Provinciën, oleh Drs. Yusmar Basri.
7. Soewardi Soerjaningrat dalam pengasingan, oleh Dra. Irna Hanny Hadi Soewito.
8. Peranan Inlandsche Matine Bond (IMB) dalam pemberontakan di atas kapal De Zeven Provinciën, oleh Rochmani Santosa.
9. Mangkungegaran dan Nata Surata, oleh Dra. Darsiti Suratman.
10. Suatu Pendekatan Sejarah Sosial Kota Yogyakarta akhir abad ke-19 awal abad ke-20.

#### VI. MAKALAH SEKSI SEJARAH MUTAKHIR

1. Kapan lahirnya Pancasila, oleh R.A.M. Effendy, SH
2. Pengaruh persetujuan Linggarjati terhadap perjuangan ABRI Divisi IV, Periode revolusi Fisik 1945 — 1949, oleh Drs. Gazali Usman.
3. Usaha Petani dalam mempertahankan hidup. Kisah pendudukan Jepang di Madiun, oleh Drs. I Ode Putu Gunawan.
4. Pemberontakan PKI Mr. Mohammad Joesoeph tahun 1946 di Cirebon, oleh Drs. Soeranto Soetanto.
5. Wajah dua muka sebuah kekuatan politik. Badan Pekerja KNIP periode Jakarta, oleh Drs. J.R. Chaniago.
6. Pengaruh Rasionalisme terhadap Badan-badan Perjuangan dan TNI (1947 — 1950), oleh Drs. Ariwiadi.
7. Cina Islam di Indonesia (Pengenalan awal terhadap PITI) oleh Tri Wahyuning Mahrus Irsyam, SS.
8. Minoritas Tionghoa dalam sastra Indonesia, oleh Husain Raikal.
9. Pemerintahan Nasional kota Jakarta, oleh Drs. Soetopo Soetanto.
10. Kekuatan Gerilya di daerah Priangan pada waktu Divisi Siliwangi hijrah 1948, oleh Drs. Tanu Suherly.
11. Lahirnya Badan-badan Perjuangan dan BKR di kota Bandung sampai timbulnya MDPP/MPPP, oleh Drs. J. Jogaswara.
12. Qahhar Mudzakkar: Pergumulan dalam siri, Suatu Sisi situasi gerakan

- Pemberontakan DI/TII di Sulawesi Pada 1950 — 1965, oleh Drs. Anhar Gonggong.
13. Bogor Shu pada masa pendudukan Jepang (1942 — 1945) oleh Sumanto Zuhdi
  14. Markas Besar Komando Sumatera 1948 — 1949, oleh Drs. Amrin Imran.
  15. Kekuatan-kekuatan revolusi di Surabaya (1945), oleh Saleh S. Djamhari.
  16. Operasi lintas laut menembus blokade Belanda (1946 — 1949), oleh Drs. Masfar R. Hakim.
  17. Sejarah pembentukan UUD '45 dan pengesahannya, oleh Drs. Moela Marbun.
  18. Sumbangan Prof. Dr. Soepomo terhadap perumusan Dasar Negara dan UUD 1945, oleh Prof. Dr. Nugroho Notosusanto.
  19. Perkembangan Peranan Ulama Dalam Arena Politik di Aceh Utara, oleh Drs. P.J. Suwarno, SH.
  20. Rakyat dan Tentara di Bibis 1949, oleh Drs. Adisusilo S.J.

Panitia Seminar Sejarah  
Nasional III

Perpustakaan  
Jenderal